

DRAFT PAPER



Kebun batatas di Lembah Ballem,
penerapan teknik bertani yang sangat mengagumkan.

STUDI KELAYAKAN

Pendanaan Konservasi Berkelanjutan Tanah Papua

**Melestarikan Alam dan Budaya,
Memuliakan Manusia dan Kehidupan Semesta**



WWF Agustus 2010

Daftar Isi

Pengantar	I
1. Mengenal Papua	4
1.1 Geologi dan Geografi	6
1.2 Keanekaragaman Kehidupan	8
1.3 Asal-usul Orang Papua	12
2. Pembangunan Papua	17
2.1 Awal Perdagangan dan Penjelajahan	17
2.2 Pasca Integrasi ke Indonesia	23
2.3 Peta Persoalan dan Konflik	31
2.4 Profil Daerah Provinsi Papua	35
2.5 Profil Daerah Provinsi Papua Barat	38
3. Pelestarian Papua	41
3.1 Keanekaragaman Ekosistem	41
3.2 Interaksi Manusia dan Lingkungan	44
3.3 Keterancamannya Ekosistem	53
3.4 Upaya Konservasi Papua	58
4. Pendanaan Papua	64
4.1 Upaya Pendanaan Berkelanjutan	64
4.2 Kebutuhan Pendanaan Konservasi	77
4.3 Opsi Pengembangan Kelembagaan	81
4.4 Catatan Akhir: Demi Papua yang Lebih Baik	90

Pengantar

Pendanaan Berkelanjutan atau *Sustainable Financing* untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penting dalam menyediakan opsi keberlangsungan manajemen konservasi. Meskipun terlihat adanya indikasi peningkatan anggaran pemerintah untuk konservasi, peningkatan anggaran tersebut tetaplah tidak sepadan dibanding dengan inflasi biaya konservasi, perluasan area konservasi, dan mitigasi peningkatan tekanan pada konservasi. Pada 2006, kajian dari KLH dan TNC telah mencatat angka defisit anggaran konservasi yang mencapai USD 82 –138 juta per tahun.

Upaya menggalang pendanaan berkelanjutan perlu difokuskan pada penetapan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan kredibel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan (termasuk kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi). Mekanisme yang dibangun perlu memperhatikan besarnya potensi Indonesia menerima pendanaan bagi pelestarian lingkungan, yang akhir-akhir ini banyak dikaitkan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Di samping sumber-sumber pendanaan yang dapat bersumber dari lembaga multilateral, pemerintah atau bilateral, korporasi ataupun yayasan filantropi, sumber pendanaan berupa pengalihan hutang

negara (*Debt for Nature Swap*) juga bisa menjadi bagian penting dalam skema pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, manfaat inisiatif pendanaan berkelanjutan ini tidak lagi hanya terfokuskan pada kegiatan perlindungan sumber daya alam semata, namun juga pada upaya pembangunan berkelanjutan.

Skema pendanaan berkelanjutan dalam skala menengah telah dikembangkan di berbagai negara seperti Madagaskar, Cameroon, Brazil, Costa Rica, Paraguay, Filipina. Kesemuanya melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat madani, dengan kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Pada tanggal 22–23 Juni 2009, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan WWF Indonesia menyelenggarakan lokakarya mengenai pendanaan berkelanjutan untuk konservasi. Guna mewujudkan rekomendasi-rekomendasi lokakarya, dipandang perlu untuk membentuk suatu gugus tugas (*task force*) pendanaan berkelanjutan (GTPB) yang akan bekerja di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan.

Tujuan pembentukan gugus tugas ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai jalur pendanaan berkelanjutan yang paling *cost-effective*; memiliki kerangka kerja

kelembagaan yang memadai; mampu mempercepat pencapaian sasaran konservasi dan mampu mewujudkan mekanisme finansial yang transparan dan akuntabel;

2. Merancang mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk konservasi, termasuk diantaranya usulan pengembangan dana amanah berkelanjutan untuk konservasi (*conservation trust fund/CTF*);
3. Melakukan studi kelayakan CTF untuk Indonesia pada tiga kawasan prioritas (Sumatra, *Heart of Borneo* dan *Coral Triangle Initiative*);
4. Menyusun materi bagi serangkaian lokakarya awareness pendanaan berkelanjutan untuk konservasi, terutama berkait dengan pembentukan CTF Indonesia;
5. Menyusun kerangka legal untuk pembentukan CTF di Indonesia dan/atau usulan revisi bagi peraturan nasional yang sudah ada;
6. Menginventarisasi sumber dana potensial bagi pendanaan berkelanjutan serta rekomendasi tata-cara fundraising yang fleksibel dengan mengingat portofolio sumber-sumber dana yang dimaksud.

Berdasarkan mandat *workshop* nasional pendanaan berkelanjutan tersebut serta selaras dengan kebijakan WWF Indonesia (*WWF Indonesia Strategic Plan 2009–2013*) untuk mengembangkan pendanaan berkelanjutan untuk konservasi, beberapa model *trust fund* telah, sedang, dan akan dibangun di beberapa wilayah strategis. Pendanaan berkelanjutan bagi konservasi dan pembangunan berkelanjutan untuk

Sumatra telah dibangun dan memperoleh bentuk kelembagaan hukum pada tanggal 30 Maret 2010. Sumatra Sustainability Fund (SSF) diresmikan secara formal pada tanggal 22 Juni 2010 di Jakarta (*lihat box di halaman berikut*).

Saat ini, tim kerja pendanaan berkelanjutan WWF Indonesia sedang mempersiapkan mekanisme kelembagaan untuk Tanah Papua. Tahapan dalam pengembangan kelembagaan pendanaan berkelanjutan Tanah Papua adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan pendanaan konservasi berkelanjutan bagi Papua;
- b. Pengembangan mekanisme dan kelembagaan pendanaan berkelanjutan, meliputi pengembangan struktur pengelolaan, sistem pengelolaan dan program strategis; dan
- c. Penyiapan materi diseminasi dan strategi penggalangan sumber daya.

Dokumen ini merupakan hasil studi kelayakan atas potensi pengembangan pendanaan konservasi berkelanjutan di Papua, yang bagian-bagiannya akan meliputi: latar belakang kondisi ekosistem Papua; pemetaan kegiatan konservasi, termasuk aspek pendanaannya; perkiraan kebutuhan dan defisit pendanaan konservasi; potensi pendanaan, meliputi sumber, jenis, dan tantangan dalam pemanfaatannya; serta kajian pelaksanaan beberapa upaya pengembangan *trust fund* di Papua.

Dana Lestari Sumatera (SSF) Diluncurkan



Jakarta (22/06) — Setelah melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, lembaga Dana Lestari Sumatera atau Sumatra Sustainability Fund (SSF), hari ini diluncurkan di Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, tokoh nasional dan kepala daerah provinsi di Sumatera hadir untuk menyatakan dukungannya.

Dalam sambutan tertulisnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa SSF adalah respon konstruktif terhadap hasil kesepakatan sepuluh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera yang ditegaskan dalam rangkaian Kongres IUCN di Barcelona pada tahun 2008. “Komitmen yang kuat untuk melakukan konservasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek pendanaan, maka sistem pendanaan yang sesuai adalah yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan,” jelasnya.

“Lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Sumatera. Sumatera yang lestari adalah sebuah cita-cita pembangunan berkelanjutan Pulau Sumatera dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan, bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di pulau Sumatera, melainkan juga bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia,” tambahnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Emil Salim menyatakan dukungannya, “Saya berharap SSF mampu memfasilitasi peluang pendanaan untuk menyelamatkan alam dan lingkungan Sumatera melengkapi yang sudah ada untuk konservasi di Sumatera.”

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, “Dengan didirikannya SSF sebagai lembaga penyalur dana hibah, diharapkan tercipta benang merah pengikat dalam kerja sama lintas sektor, lintas institusi dan lintas aktor bagi pengelolaan ekosistem sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terpadu.”

Lebih lanjut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ekosistem Sumatera sangat spesifik dan bernilai penting secara nasional dan global. “Di pulau ini terdapat empat satwa kunci

(flagship species) yang hidup berdampingan, yakni harimau, gajah, orangutan dan badak Sumatera. Hutan-hutan di Sumatera juga merupakan daerah resapan air, penyimpan cadangan karbon, gudang tanaman obat, serta sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat sekitarnya. Saya sangat mendukung didirikannya SSF ini yang diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara stakeholder yang bekerja untuk penyelamatan ekosistem pulau Sumatera dan melengkapi pendanaan yang sudah ada.”

Sementara, Chief Executive Officer WWF-Indonesia, Dr. Efransjah menyambut baik peluncuran SSF ini. “Tingginya dukungan dan komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk penyelamatan ekosistem pulau Sumatera. WWF-Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pengelolaan kawasan yang memiliki fungsi ekologi penting bagi masyarakat Sumatera”.

Tentang Sumatra Sustainability Fund

SSF awalnya dibentuk oleh enam orang pendiri pada tanggal 12 Februari 2010 di Jakarta dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan WWF-Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai inisiatif untuk penggalangan dana berkelanjutan bagi pelestarian Pulau Sumatera. Dana berkelanjutan itu diharapkan mampu mendukung proses pembangunan Pulau Sumatera yang telah dan sedang berjalan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Pelestarian ekosistem Pulau Sumatera tidak mungkin terwujud jika hanya dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil secara terpisah. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antarpihak demi mewujudkan Sumatera yang lestari. SSF memosisikan dirinya sebagai jembatan antarpihak. Selain itu, SSF tidak akan bekerja langsung terhadap pelestarian ekosistem, namun menyediakan mekanisme pendukung bagi berbagai pihak dalam kegiatan konservasi ekosistem di Sumatera.

1

Mengenal Papua

Setelah beberapa kali berganti-ganti nama, sejak tahun 2000, "Papua" menjadi nama resmi kawasan barat Pulau Nugini yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada masa penjajahan Belanda, kawasan itu dinamai "Dutch New Guinea" (Nugini Belanda). Setelah kemerdekaan Indonesia, namanya diubah menjadi "Irian Barat", yang kemudian diubah menjadi "Irian Jaya", lalu "Papua".

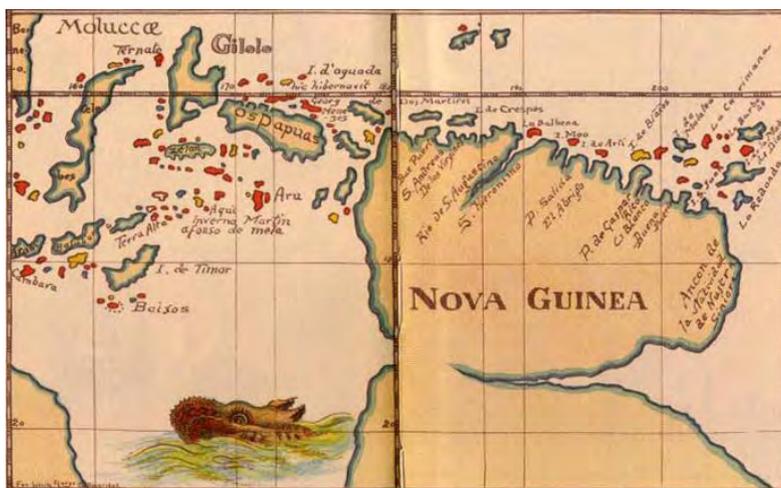
Papua mulai dikenal orang luar sejak abad ke-6 Masehi, saat para pedagang Persia dan Gujarat menemukannya dan menyebut pulau itu sebagai "Samudranta": ujung samudera. Dua abad kemudian, para pelaut Cina menamakannya "Tungki". Pada abad yang sama, pelaut-pelaut Sriwijaya mengenalnya sebagai "Janggi".

Pada awal abad ke-16, Antonio d'Abrau (1511) dan Francesco Serano (1521) menyebut wilayah besar itu "Os Papuas".

Lalu pada 1527, saat Gubernur pertama Portugis di Maluku, Jorge de Meneses, singgah di wilayah itu, ia bertemu penduduk berkulit hitam dan berambut keriting, dan menyebut mereka orang "Papua".

Konon, nama "Papua" itu sebenarnya berasal dari bahasa Tidore, yang artinya rambut keriting. Ada pula yang mengartikan sebutan itu sebagai tanda merendahkan, karena kosa kata itu juga berarti "budak".

Setahun berikutnya, pada 1528, Alvaro de SAVEDRA, pelaut Spanyol, berlabuh di pantai utara pulau dan menamakan pulau itu sebagai "Isla de Oro", Pulau Emas. Karena sebutan pulau emas ini, para pelaut Eropa berbondong-bondong mendatangnya untuk mencari emas. Salah satunya adalah Oertis de Retes, yang kemudian menamakan pulau itu "Nueva Guinea" karena melihat penduduknya hampir mirip dengan penduduk Guinea di Afrika Barat. Sejak itu, nama "Nueva (Nova) Guinea" menjadi populer karena tercantum pada peta dunia, bersaing dengan kepopuleran nama "Papua".



Kedua nama itu tak diusik orang sampai pertengahan abad ke-20, yaitu pada 1940. Saat itu, Residen JP Van Eechoud membentuk suatu panitia untuk mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama Pulau Papua dengan nama yang lebih mencerminkan budaya Papua. Ketua panitianya, Frans Kaisiepo, menawarkan sebuah nama yang diambil dari mitos Masren Koreri, legenda masyhur dan dikenal luas di Biak. Nama itu adalah "Irian", yang artinya tanah panas. Nama itu pun dikenal oleh masyarakat Serui, tetapi dengan arti berbeda: tiang bangsa, atau tanah air. Sementara masyarakat Merauke mengenalnya dalam arti bangsa yang diangkat tinggi, bangsa utama.

Dalam konferensi Malino, 16 Juli 1946, Frans Kaisiepo berpidato, mengganti nama "Papua" dan "Nieuw Guinea" menjadi "Irian". Tercatat dalam notulen Konferensi Malino:

"Tuan Kaisiepo mengatakan, bahwa ... Ikatan kawasan Tidore dengan Guinea Baru bendaknya diputuskan. Nama Papua perlu dibatalkan, karena kata ini adalah kata Bahasa Tidore yang berarti "budak". Rakyat menginginkan supaya negerinya dinamakan "Guinea Baru" dan bangsanya dinamakan "Irian".

Nama "Irian" baru secara umum digunakan setelah 1 Mei 1963 dengan sebutan "Irian Barat". Presiden Soekarno, dalam rangka konfrontasi perebutan wilayah dengan Belanda, mempolitikasi nama "Irian" sebagai singkatan dari "Ikut Republik Indonesia Anti Netherland".

Sepuluh tahun kemudian, nama ini diganti oleh Presiden Soeharto menjadi "Irian Jaya", tepatnya pada 1 Maret 1973, bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia.



Patung Pembebasan Irian Barat di Jakarta.

Memasuki era reformasi, sebagian masyarakat menuntut penggantian nama "Irian Jaya" menjadi "Papua". Tuntutan itu dipenuhi. Pada pagi 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memaklumkan penggantian nama "Irian Jaya" menjadi "Papua". Menurutnya, kata "Irian" adalah manipulasi dari Bahasa Arab "'uryaan" yang artinya telanjang; Mungkin saja para pelaut berbahasa Arab sekian abad yang lalu bertemu penduduk Papua yang hanya memakai koteka.

Sejak itulah nama "Papua" secara resmi menjadi sebutan bagi provinsi paling timur Indonesia ini.

1.1 Geologi dan Geografi



Papua terletak di paruh barat Pulau Nugini (New Guinea), berbatasan dengan Negara Papua Nugini (Papua New Guinea) yang terletak di paruh timur pulau. Papua merupakan wilayah terluas di Indonesia; Luasnya sebanding dengan 22% keseluruhan luas wilayah Indonesia. Namun, populasinya sangat sedikit, hanya 1% dari total populasi Indonesia.

Salah satu ciri khas Pulau Nugini (termasuk Papua) yang luar biasa adalah jajaran pegunungan sepanjang kira-kira 2000 kilometer, membentang dari timur ke barat. Puncak-puncak gunungnya mencapai tinggi 3000 meter. Yang tertinggi adalah Nemangkawi Ningkok (Puncak Jaya), 4.884 mdpl (meter di atas permukaan laut)—tergolong salah satu puncak gunung tertinggi di dunia, selain Puncak Himalaya dan Andes. Namun, usia geologis

pegunungan di Pulau Nugini masih sangat muda dibanding pegunungan lain di dunia. Pegunungan Pulau Nugini kebanyakan berlereng curam. Massa gunungnya sebagian besar terdiri dari endapan batu kapur dan batu pasir yang dulunya merupakan dasar laut. Posisi jajaran pegunungan Pulau Nugini itu tepat searah garis lurus dengan tempat terjadinya pertemuan Lempeng Sahul (Lempeng Australia) dan Lempeng Pasifik.

Dataran tinggi Papua membentang sepanjang 600 kilometer dari timur sampai barat Pulau Nugini. Ujung paling baratnya terletak di arah barat Danau Paniai, sedang ujung paling timurnya berada tepat di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini.

Aktivitas vulkanik yang sering terjadi di bagian timur Pulau Nugini berakibat

munculnya teramat banyak bebatuan beku. Kawasan bebatuan beku ini sekarang menjadi Tambang Grasberg yang digali oleh PT Freeport Indonesia, dan menjadi salah satu galian tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.

Jajaran pegunungan tengah terbagi menjadi tiga wilayah. Wilayah pertama adalah Pegunungan Wisnumurti, yang pada zaman Belanda dikenal sebagai Pegunungan Bintang. Letaknya di arah timur, berbatasan dengan Papua Nugini. Puncak tertinggi pegunungan Wisnumurti adalah Gunung Mandala (dulu disebut Gunung Juliana). Tingginya mencapai 4.700 mdpl.

Wilayah kedua adalah Pegunungan Jayawijaya (pada masa Belanda dikenal sebagai Pegunungan Oranye). Gunung tertinggi dalam jajaran Pegunungan Jayawijaya adalah Gunung Trikora (dulu disebut Gunung Wilhelmina), 4.743 mdpl. Namun, puncak tertingginya adalah Nemangkawi Ninggok (nama lokal pemberian Suku Amungme untuk Puncak Jaya atau Puncak Carstenz). Ketinggiannya 4.884 mdpl.

Wilayah ketiga adalah Pegunungan Sudirman, yang pada masa Belanda dikenal sebagai Pegunungan Nassau. Letaknya di ujung barat, yaitu di Danau Paniai.

Bagian selatan dataran tinggi wilayah Papua-tengah sangat curam, sementara bagian utaranya agak landai. Hal itu karena massa Lempeng Pasifik yang berada di utara mendorong tepian Lempeng Sahul (Lempeng Australia) yang bergerak dari arah selatan saat kedua lempeng itu berbenturan.

Di bagian barat, daerah pegunungan terjauhnya mencapai Laut Arafura, dekat Teluk Etna. Makin ke timur dan ke barat, daerah pesisir menjadi makin rata dan luas sehingga didiami banyak suku di Papua.

Daerah di bagian tenggara Papua merupakan wilayah pesisir yang penuh rawa-rawa hutan bakau. Di sana-sini juga dijumpai kawasan savana kering berumput.

Di penghujung barat Papua, ada wilayah sangat luas yang hampir-hampir menjadi pulau terpisah. Wilayah ini disebut Kepala



Nemangkawi Ninggok, Puncak Jaya, atau Puncak Carstenz, 4.884 mdpl.

Burung. Sepintas, bentuknya memang menyerupai kepala burung terhadap keseluruhan Pulau Nugini yang berbentuk seperti burung sedang duduk dengan kaki terlipat.

Yang menjadi 'pemisah' kawasan kepala Burung dengan keseluruhan Pulau Nugini adalah Teluk Bintuni, yang terbentang sejak Laut Banda sampai Teluk Cendrawasih. Teluk ini terkenal sebagai salah satu wilayah rawa bakau terluas di

dunia, serta menyimpan cadangan gas alam yang sangat besar.

Di kawasan Kepala Burung, dijumpai formasi karst yang terbentuk akibat pengaruh iklim tropis yang menyebabkan terjadinya pengikisan batuan kapur. Proses ini menyebabkan munculnya ngarai-ngarai berbatu kapur yang sangat curam. Inilah sebabnya maka perjalanan darat di wilayah ini sangat tidak mungkin dilakukan.



1.2 Keanekaragaman Kehidupan

Banyak sekali flora dan fauna Papua yang tidak bisa dijumpai di tempat lain di dunia. Namun, flora dan fauna di dataran rendah Papua umumnya mirip dengan flora dan fauna di Asia Tenggara (khusus flora) dan Australia (khusus fauna). Sedangkan flora dan fauna di dataran tinggi Papua tergolong unik dan beraneka ragam akibat keterisolasiannya.

Papua adalah habitat 15.000–20.000 spesies tanaman (55% di antaranya endemik Papua), 602 spesies burung (52% endemik), 125 spesies mamalia (58% endemik), dan 223 spesies reptil (35% endemik), serta 3000 spesies ikan.

Fauna

Jumlah total mamalia yang ditemukan di Pulau Nugini adalah 225 jenis, dan masih mungkin akan bertambah karena penelitian tentang hal ini masih terus berlanjut. Dari

225 jenis itu, 212 di antaranya adalah mamalia asli Nugini, sedangkan 13 jenis lainnya merupakan hasil introduksi.



Kanguru pohon mantel emas (*Dendrolagus pulcherrimus*). Pada 2005 ditemukan di daerah terpencil di Pegunungan Foja, Provinsi Papua.

Hanya ada 5 spesies monotreme—salah satu jenis mamalia—yang bisa bertahan hidup sejak zaman purba sampai hari ini, 2 di antaranya ditemukan di Nugini (sisanya, 3 spesies, ditemukan di Australia). Monotreme yang terdapat di Nugini adalah babi duri moncong panjang (*Zaglossus bruijnii*, landak irian) dan babi duri

moncong pendek. Landak irian ini hanya bisa ditemukan di daerah dataran tinggi, karena umumnya daerah ini jarang dijelajahi manusia.



Landak-irian, babi duri moncong panjang (*Zaglossus bruijnii*)

Mamalia lainnya adalah jenis marsupial. Ada sekitar 200-an jenis marsupial di dunia, 200 spesies yang tergolong unik dijumpai di Australia, sedangkan 70 spesies lainnya dapat ditemui di wilayah Nugini. Ketujuh puluh spesies marsupial di wilayah Nugini itu merupakan spesies khas Nugini, karena marsupial itu tak dijumpai di Australia.

Marsupial terbesar sedunia adalah jenis walabi tangkas yang hanya dapat ditemukan di areal padang rumput kering musiman di sekitar Merauke. Bentuk fisiknya mirip kangguru di Australia.

Salah satu fauna Papua adalah buaya. Buaya Papua terdiri dari dua jenis. Yang pertama berukuran kecil dan hidup di pedalaman, sedang yang kedua berukuran besar (dikenal juga sebagai buaya estuaria) dan sering ditemui di pesisir. Panjang buaya estuaria bisa mencapai 7 meter, dan masih menjadi momok yang menakutkan

bagi penduduk setempat karena sering menyerang manusia.

Selain buaya, terdapat kadal air yang umumnya hidup di lingkungan yang sama dengan tempat tinggal buaya. Berbeda dengan buaya yang sudah cukup langka, kadal air termasuk relatif mudah dijumpai karena populasinya masih banyak.



Buaya papua. Panjangnya bisa mencapai 7 meter.

Kodok merupakan salah satu binatang yang berguna bagi penduduk Papua, karena merupakan sumber protein, terutama di dataran tinggi. Kodok-kodok ini bahkan bisa ditemukan di ketinggian di atas 3.800 mdpl. Jenis kodok gunung



Katak hidung pinokio (*Litoria sp. nov.*), spesies baru yang ditemukan di Papua pada 2008.

seperti ini hanya ada di Pulau Nugini, termasuk Papua.

Sekitar 3.000 spesies ikan ditemukan di Papua, baik di wilayah laut lepas maupun di pesisir pantainya. Ikan laut yang melimpah ini diambil masyarakat untuk dijual dan dimakan. Bagi penduduk pesisir, ikan laut merupakan sumber protein terpenting dan lezat, sekaligus sebagai makanan pokok (bersama sagu) sebagian besar dari mereka. Tak demikian halnya dengan ikan air tawar, mereka tidak menjadikannya sumber makanan utama.



Ikan Pelangi Alleni (*Chilatherina alleni*), ditemukan di aliran sungai di bagian utara Papua, termasuk sungai Wapoga dan Siriwo.

Ikan air tawar Papua terkenal unik, misalnya ikan hiu air tawar yang hanya bisa ditemukan di Danau Yamur dan ikan gergaji sepanjang 5 meter di Danau Sentani. Sayangnya, ikan hiu air tawar itu tak lagi ditemukan di sana, kemungkinan besar karena sering dijaring penduduk sekitar danau. Sementara ikan gergaji di Danau sentani sejak lama dilindungi penduduk setempat, karena mereka percaya bahwa arwah nenek moyang mereka berdiam di dalam ikan ini. Namun, ikan gergaji ini juga sudah tak pernah lagi terlihat.

Selain kedua ikan itu, ada ikan pelangi. Ikan kecil beraneka warna ini banyak ditemukan di perairan air tawar Papua. Sebanyak 158 spesies dapat dijumpai,

sebagian besar merupakan spesies endemik Papua, meski beberapa di antaranya didapati juga di Australia.



Ikan Pelangi Sungai Fasin, Sorong Selatan, Papua, yang ditemukan peneliti asal Prancis dan Indonesia pada Juni 2009.

Keanekaragaman burung di Papua sangat luar biasa. Yang terpopuler adalah cendrawasih. Ada 42 spesies cendrawasih di dunia, 36 di antaranya ditemukan di wilayah Nugini dan pulau-pulau sekitarnya, sementara 6 spesies lainnya ditemukan di Australia dan Seram.

Jenis burung unik lainnya adalah kasuari, burung endemik Papua yang dianggap galak karena ukurannya cukup besar dan cakarannya sangat tajam. Sebagai seekor burung, kasuari tak dapat terbang, namun sulit ditangkap. Dagingnya yang padat kerap dikonsumsi penduduk, meski sebelumnya harus direbus berkali-kali karena sangat keras.



Tendangan kasuari. Cakarnya mampu mengoyak perut manusia.



Ulat sagu (*Rhynchophorus ferrugineus*), sumber protein yang "berdenyut-denyut". Ulat sagu adalah larva kumbang merah kelapa.

Serangga termasuk salah satu sumber makanan bagi banyak orang Papua. Misalnya ulat sagu yang sebenarnya merupakan telur sejenis kumbang tertentu. Ulat sagu juga berperan penting dalam ritual sebagian orang Papua, misalnya pada Suku Asmat.

Di Papua bisa dijumpai kurang lebih 100.000 spesies serangga. Jumlah terbanyak adalah kumbang. Yang juga didapati melimpah jumlahnya adalah laba-laba, sekitar 800 spesies. Salah satu spesies laba-laba yang unik adalah laba-laba raksasa pemakan burung (*Selenocosmia crassipes*).



Kupu-kupu sayap burung.

Jenis serangga lainnya adalah kupu-kupu. Yang terunik adalah kupu-kupu sayap burung, yang memiliki aneka warna dan merupakan spesies kupu-kupu terbesar. Kupu-kupu ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Papua, tetapi konsentrasi dan keragaman terbesarnya hanya dijumpai di kawasan Pegunungan Arfak, pedalaman Manokwari.

Flora

Papua merupakan daerah flora terkaya se-Indonesia, dari segi jumlah dan keanekaragamannya. Flora di hutan hujan tropis dataran rendah Papua mirip dengan flora yang ditemukan di bagian utara Queensland, Australia. Sementara flora dataran tinggi Papua mirip dengan flora Asia Tenggara.

Sebagian besar tanaman di Papua merupakan tanaman obat tradisional yang potensial menjadi bahan baku obat modern. Misalnya kulit kayu masoi.

Ada 3000 spesies anggrek ditemukan di Pulau Nugini. Sebagian besar anggrek itu ditemukan di wilayah dataran tinggi, dan merupakan anggrek yang hanya ada di kepulauan tersebut.

Di dataran rendah, daerah rawa-rawa, dapat dijumpai areal pepohonan sagu yang luas. Sagu tergolong salah satu jenis makanan utama penduduk yang bisa bertahan lama disimpan.

1.3 Asal-usul Orang Papua



Diyakini, pada dasarnya nenek moyang semua manusia modern di dunia— termasuk nenek moyang orang Papua— berasal dari Afrika. Mereka, nenek moyang orang Papua itu, perlu waktu sepanjang kira-kira 150.000 tahun untuk sampai ke Nugini dan menjadi cikal-bakal penduduk Papua asli.

Pada 200.000 tahun lalu, sebagian penghuni Afrika bermigrasi menuju Eropa, Asia, serta tempat-tempat lainnya. Di antara para migran itu terdapat kelompok nenek moyang orang Papua, yang awalnya berkelana di dekat garis pantai suatu wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Arab. Selanjutnya, mereka menjelajahi wilayah pesisir pantai utara Samudra Hindia, sebelum kemudian mencapai Nugini pada 50.000 tahun yang lalu dan menetap di sana.

Dari Semenanjung Arab, tak semuanya bisa mencapai Nugini. Keturunan mereka yang tidak mencapai Nugini masih bisa dijumpai di India selatan, kepulauan Andaman, Malaysia, dan Filipina. Waktu itu, nenek moyang bangsa Asia Tenggara seperti yang dikenal hari ini belum mencapai wilayah tersebut; dan leluhur mayoritas bangsa Indonesia baru mencapai Indonesia pada 5.000 tahun yang lalu.

Setelah mencapai Kepulauan Nugini, para nenek moyang orang Papua itu mula-mula bermukim di sepanjang pesisir. Baru kemudian pada 10.000–9.000 tahun yang lalu, ketika iklim bumi berubah menghangat dan menjadi lebih ramah, kelompok-kelompok kecil para migran itu mulai memasuki wilayah pedalaman pulau.

Kelompok-kelompok nenek moyang orang Papua yang pertama kali menjelajahi

pedalaman itu adalah para pemburu dan pengumpul. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan sumber makanan yang dapat mereka temui. Namun, kegiatan pertanian agaknya telah mulai diselenggarakan sejak 9.000 tahun yang lalu di dataran tinggi Kuk, Papua Nugini. Mereka, nenek moyang orang Papua itu, menanam taro (*Colocasia esculanta*) untuk diambil kandungan tepungnya dari umbinya.



Situs pertanian purba di Kuk, Papua Nugini.

Lama sesudah tibanya leluhur orang Papua dari Afrika itu di Kepulauan Nugini, datanglah gelombang kedua leluhur lainnya, orang-orang Austronesia, yang meninggalkan Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu dan menyebar ke selatan. Dari sana, mereka mencapai Filipina, lalu memisahkan diri menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama berlayar ke barat daya, mencapai Kalimantan, Malaysia, Sumatra, dan Jawa—merekalah nenek moyang orang Malaysia serta Indonesia-barat. Kelompok kedua menjelajah ke tenggara, dan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu mencapai Halmahera serta pesisir utara Nugini (terutama wilayah Kepulauan Bismarck). Sebagian di antara mereka menetap di wilayah Kepulauan Bismarck, dan kemungkinan besar juga menetap di Biak serta Yapen. Sebagian lainnya meneruskan perjalanan ke Pulau Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, Fiji, dan terus ke timur hingga akhirnya menetap di wilayah Polinesia.

Ada kemungkinan bahwa di mana pun kelompok pendatang baru Austronesia itu menetap, mereka bisa berintegrasi dengan kelompok orang Papua yang telah lebih dulu mendiami kawasan itu. Mereka adalah masyarakat pemburu, nelayan, dan pengumpul; sebagian lainnya telah mempraktikkan berkebun.

Waktu itu, kebudayaan dan teknologi leluhur Papua gelombang kedua (orang Austronesia) ini sudah sangat maju. Mereka telah menjinakkan berbagai jenis hewan (termasuk ayam, anjing, dan babi), serta membiakkan aneka tanaman impor yang berguna. Perkakas dan alat-alat yang mereka gunakan sudah lebih baik.

Organisasi kemasyarakatannya sudah lebih terstruktur, dengan sistem hierarki. Mereka juga mampu berkarya menghasilkan ornamen-ornamen dan perkakas dari bahan baku kulit kerang, seperti mata kail, gelang tangan, dan trompet.

Pada awalnya, nenek moyang orang Austronesia berkulit agak terang. Ketika

terjadi perkawinan campuran dengan orang Papua, warna kulit keturunan mereka menjadi agak gelap, dan sebagian berambut keriting yang menjadi ciri khas semua

keturunan Papua dan Afrika. Bahasa mereka pun akhirnya bercampur dengan bahasa Papua.



Suku dan Bahasa

Bahasa-bahasa di Pulau Nugini (Papua dan Papua Nugini) dikelompokkan menjadi dua kelompok besar: Bahasa Austronesia dan Bahasa Non-Austronesia, yang biasanya disebut Bahasa Papua.

Para penutur Bahasa-bahasa Austronesia adalah masyarakat pesisir, seperti Biak, Wandammen, Waropen, dan Maya. Jumlah bahasa-bahasa rumpun Austronesia kira-kira 150 ragam. Sementara Bahasa-bahasa Non-Austronesia yang jumlahnya hampir 750 ragam dituturkan oleh masyarakat di pelosok dan pedalaman pulau, sejak wilayah barat Kepala Burung sampai ujung bagian timur Nugini, seperti Meybrat, Dani, Ekari, Asmat, Muyu, dan Sentani.

Jadi, totalnya ada sekitar 900 bahasa di Nugini (Papua dan Papua Nugini). Jumlah ini merupakan jumlah bahasa paling banyak yang bisa ditemukan dalam hanya satu wilayah.

Meski kesulitan mengelompokkan ke-750 bahasa Non-Austronesia itu, tetapi setidaknya dapat disimpulkan bahwa sekitar 500 bahasa di Nugini dapat dikategorikan dalam filum Trans-Nugini. Penutur ke-500 bahasa itu tak semuanya

berdiam di Nugini. Bahasa tersebut juga digunakan di Timor, Pantar, dan Alor, yang secara geografis sangat jauh dari Nugini.

Sementara itu, 250 bahasa lainnya yang tak termasuk filum Trans-Nugini banyak dituturkan di daerah Kepala Burung, daerah aliran Sungai Sepik bagian tengah dan hulunya, serta di daerah hulu sungai Ramu di Papua Nugini.

Meskipun bahasa-bahasa dalam filum Trans-Nugini (500 bahasa) itu mirip antara satu dengan lainnya, tetapi banyak sekali bedanya dengan bahasa-bahasa Papua lainnya yang sama-sama Non-Austronesia (250 bahasa).

Di Papua saja (tak termasuk Papua Nugini), lebih kurang 269 bahasa saat ini hidup dan dituturkan oleh orang-orang lokal Papua. Karena bahasa adalah alat komunikasi sekaligus merupakan identitas kelompok (suku), hal itu menunjukkan bahwa sedikitnya ada 269 kelompok etnis yang berbeda di Papua.

Masyarakat Pesisir dan Dataran Tinggi



Masyarakat Papua yang mendiami daerah pesisir punya pola hidup yang berbeda dengan masyarakat dataran tinggi. Sebab, perbedaan lingkungan mereka pun sangat mencolok. Perbedaan itu kemudian memengaruhi pola kedua kelompok itu dalam memilih tumbuhan dan hewan yang bisa mereka konsumsi untuk melangsungkan hidup.

Masyarakat pesisir Papua cenderung menjadi pemburu, nelayan, dan pengumpul (kecuali masyarakat pesisir utara dan daerah lepas pantai). Sedangkan masyarakat dataran tinggi Papua cenderung menjadi petani.

Umumnya, makanan pokok masyarakat pesisir Papua adalah sagu, yang tidak dibiakkan secara tradisional dan proses

pengolahannya relatif tidak rumit. Sementara masyarakat pegunungan Papua harus bekerja ekstra keras bercocok tanam aneka tumbuhan untuk bertahan hidup. Makanan pokok mereka adalah ubi jalar yang mereka tanam di kebun-kebun.

Meski masyarakat pesisir ada juga yang memelihara babi hasil tangkapan, tetapi beternak babi bukanlah kegiatan utama mereka. Berbeda dengan masyarakat dataran tinggi yang sangat menggantungkan hidup mereka dari beternak babi. Dalam tradisi masyarakat pegunungan ini, babi menjadi simbol kekayaan, bahkan lambang kekuasaan.

Sebenarnya, berburu dan mengumpulkan makanan adalah pola hidup awal nenek moyang orang Papua yang pindah ke

dataran tinggi. Tetapi pola hidup itu lambat-laun ditinggalkan karena makin berkurangnya hewan buruan di pegunungan akibat seringnya diburu; sementara pada saat yang sama mereka mulai mengenal pertanian. Sebaliknya, di daerah pesisir, hewan buruan masih relatif melimpah.

Kepadatan penduduk di pesisir pada umumnya relatif rendah—kemungkinan besar karena seringnya masyarakat terserang malaria, kecuali di beberapa tempat yang punya nilai historis dan berlokasi di sekitar perkotaan. Padahal sumber daya alamnya, yang menjadi sumber makanan, melimpah. Misalnya, berbagai jenis kerang-kerangan, buah dan sayuran liar, binatang buruan, serta berbagai macam ikan. Sementara di dataran tinggi, sumber makanan yang bisa dijumpai di danau-danau dan sungai-sungai adalah udang karang. Pada dasarnya tak ada ikan di dataran tinggi. Ikan baru masuk wilayah

pegunungan setelah adanya introduksi sejumlah spesies ikan.

Sebagian besar wilayah di zona transisi antara dataran rendah dan dataran tinggi berpopulasi sangat sedikit. Di utara, dataran Mamberamo yang sangat luas menjadi kediaman orang dari berbagai macam kelompok bahasa, tetapi jumlah anggota tiap kelompok amat sangat sedikit. Di selatan, wilayahnya meliputi pegunungan tengah sampai Teluk Etna. Di timur, alur gunung-gunung makin menjauh dan biasanya ditemukan dataran seluar 50–500 meter yang tak ada penduduknya, atau bila ada, jumlahnya sedikit sekali. Berabad-abad yang lalu, orang-orang dari Suku Mee mulai bergerak masuk dalam zona ini, sampai mereka kian mendekati wilayah pesisir barat Kamoro dan akhirnya menetap di sana. Sementara itu, di ujung timur, tingkat populasinya cukup tinggi; pemukimnya adalah Suku Moyo dan Mandobo.



2

Pembangunan Papua

2.1 Awal Perdagangan dan Penjelajahan



Lagatoi, perahu dagang besar penduduk Manubada, Papua Nugini.

Sejak lama sebelum kedatangan orang Austronesia, leluhur orang Papua yang mendiami pulau-pulau di pesisir utara Nugini (Biak, Yapen, Raja Ampat, Irlandia Baru, Britania Baru, dan Bougainville) telah belajar memanfaatkan obsidian—batu beling vulkanik yang sangat keras—untuk ditempa menjadi mata pisau. Sebagian batu beling itu mereka perdagangkan dalam suatu perdagangan laut jarak menengah (sampai 350 km). Namun, baru pada sekitar 3.500 tahun

yang lalu lingkup wilayah perdagangan mulai meluas. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya obsidian dari Britania Baru dan Pulau Manus di Sabah, Kalimantan, sampai ke arah barat, serta di Fiji sampai ke arah tenggara. Jaringan dagang orang Papua-Melanesia itu termasuk yang paling mula-mula sekaligus paling luas jangkauannya pada zaman dahulu kala.

Setelah kemunduran jaringan dagang itu pada sekitar 2.500 tahun lalu, ada bukti

konkret tentang transaksi antara Asia Tenggara, Indonesia, dan Papua. Barang komoditasnya adalah genderang besar dari tembaga dan berbagai barang tembaga lainnya seperti kapak upacara. Barang-barang tembaga itu diproduksi di lokasi yang kini menjadi wilayah bagian utara Vietnam, antara 2.400–2.100 tahun yang lalu. Kepingan-kepingan genderang tersebut ditemukan terkubur dekat Danau Aimura di daerah Kepala Burung. Barang-barang tembaga lainnya yang berasal dari Dongson juga ditemukan jauh di timur, di wilayah Danau Sentani.

Tidak ada bukti tentang barang-barang yang dibarter oleh pedagang Papua kepada pedagang luar. Mungkin saja komoditas yang paling dicari pedagang luar dari Papua

adalah bulu-bulu burung Cendrawasih dan, bahkan, budak.

Ada kemungkinan bahwa wilayah barat Papua pada abad ke-14 pernah didatangi pedagang dari Jawa, Majapahit, berdasarkan informasi dari Negarakertagama (1365). Diperkirakan, tujuan para pedagang itu adalah mencari kulit massoy, yang bisa menghasilkan minyak beraroma menyenangkan dan berasa tajam. Di Jawa, minyak itu dipakai sebagai bahan obat tradisional.

Singkatnya, sejak zaman dahulu, Papua telah menjadi salah satu pusat jaringan dagang, jauh sebelum datangnya para penjelajah-penjelajah dari Eropa.



Perdagangan Antar-Penduduk

Alur perdagangan di antara penduduk di dataran tinggi Papua hampir secara eksklusif hanya meliputi rute timur dan barat. Komoditas utama yang diperdagangkan masyarakat dataran tinggi umumnya adalah garam, mata pisau dari batu, dan babi. Garam-garam itu bukan berasal dari pesisir, melainkan dari kolam-kolam air asin yang letaknya terpencar-pencar di dataran tinggi. Lokasi tambang asal batu bahan mata pisau juga terpencar-pencar, namun sebagian besar berasal dari Yalime, suatu tempat di sebelah utara wilayah orang Lani.

Alat tukar utama dalam perdagangan masyarakat di dataran tinggi adalah 'cowries' (rumah sebangsa kerang-kerangan tropis berwarna terang) dan 'rumah' bangsa

kerang-kerangan lain yang berukuran besar. Nilai tukarnya bervariasi, tergantung umur dan sejarahnya. Tapi, dari mana mereka yang bermukim di pegunungan itu mendapat rumah kerang?



Cowries, alat tukar dalam perdagangan masyarakat dataran tinggi Papua.

Di dataran tinggi masih bisa dijumpai beberapa jenis moluska laut, karena dulunya wilayah itu merupakan dasar laut. Namun, rumah kerang yang menjadi alat tukar di dataran tinggi semuanya berasal dari pesisir, sebagian besar dari Teluk Cendrawasih.

Salah satu alat penting bagi masyarakat dataran tinggi adalah busur. Mereka membikinnya dari bahan baku pohon-pohon lokal di sekitar mereka. Namun, yang dianggap bahan baku paling baik adalah pohon palem hitam, yang tidak tumbuh di dataran tinggi.

Karena itulah maka sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah pinggiran pegunungan kemudian sering bepergian ke dataran rendah untuk mencari kayu pohon palem hitam, sekaligus melakukan barter dengan penduduk dataran rendah. Alat barter mereka yang dari dataran tinggi adalah tembakau dan bulu burung. Kedua jenis

komoditas itu biasanya ditukar dengan busur palem hitam dan... rumah kerang.

Namun, konflik sering terjadi antara masyarakat dataran tinggi dengan masyarakat dataran rendah, baik dalam praktik ilmu sihir maupun perang. Kemungkinan besar, konflik-konflik semacam inilah yang menghalangi terjalannya hubungan persahabatan (dan perdagangan) antara kedua kelompok.

Sebab lain terkait sangat minimnya transaksi dagang antara mereka adalah faktor jarak yang jauh, struktur wilayah yang sulit dijangkau, serta saling curiga yang tinggi antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya, tak ada satu pun perkakas logam dikenal di wilayah dataran tinggi sebelum alat-alat itu diintroduksi oleh orang Eropa sekitar akhir 1930-an. Inilah sebabnya banyak tempat di dataran tinggi masih berada di "zaman batu" jauh setelah diintroduksinya alat-alat tersebut.

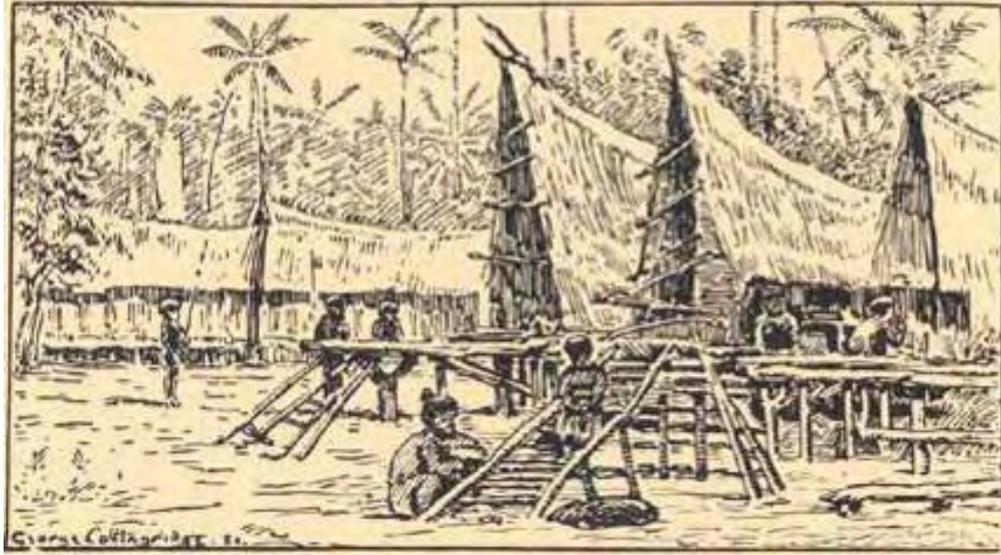


Kontak Dagang dengan Penjelajah Eropa

Para penjelajah (pedagang) dari Eropa beranggapan bahwa merekalah yang menemukan Nugini (*NuevaNova/New Guinea*). Kenyataannya, tentu saja pulau itu ditemukan oleh nenek moyang orang Papua. Ketika para pelaut Eropa "menemukan"-nya, orang-orang Papua telah lama berkomunikasi dan berkontak dagang dengan orang-orang luar Papua. Misalnya dengan Jawa (Majapahit), Sumatra (Sriwijaya), bahkan Cina, India, dan Persia di arah barat. Juga dengan orang-orang dari Pasifik di selatan dan

timur. Mereka telah sejak lama sering melaut pergi-pulang ke Nugini, menjelajah pulau-pulau sekitar. Salah satu buktinya adalah kemiripan bahasa penduduk di Halmahera, Alor, dan Timor dengan bahasa-bahasa Papua dibanding bahasa-bahasa di wilayah Indonesia lainnya (rumpun Melayu-Polinesia).

Pada awal abad ke-16, tersiar kabar di Ternate tentang adanya suatu tempat di dunia yang berlimpah-ruah dengan emas. Konon, tempat itu diperintah oleh Raja



Papua. Kabar itu terbawa sampai Eropa, mungkin melalui para pelaut Portugis yang sejak 1512 telah berkegiatan di Ternate.

Bangsa Eropa yang pertama mencapai Papua adalah Portugis. Orang Portugis pertama yang sampai Papua, karena suatu kebetulan, adalah Jorge de Menezes, Gubernur Portugis di Ternate. Dalam pelayarannya menuju Ternate pada sekitar 1526/1527, badai membelokkan layarnya terlalu ke timur dan memaksanya singgah di Pulau Waigeo, pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat, barat laut kawasan Kepala Burung. Dia namakan kawasan itu sebagai *Ilhas dos Papuas*, pulau orang-orang Papua.

Akibat persaingan menguasai lalu-lintas perdagangan cengkeh antara Portugis dan Spanyol, seorang prajurit Spanyol di Tidore ditawan Portugis. Dengan niat membebaskannya dan sekaligus mencari pulau yang dikabarkan sebagai pulau emas, Alvaro de Saavedra, pelaut Spanyol, melintasi Samudra Pasifik dari Meksiko ke Tidore. Sepulang dari sana, badai memaksanya mendarat di Biak yang lalu disebutnya

sebagai *Isla de Oro*, pulau emas. Tapi tak sekerikil pun emas didapatnya dari sana.

Karena sebutan pulau emas ini, para pelaut Eropa berbondong-bondong mendatangnya untuk mencari emas. Salah satunya adalah Ortiz de Retes, yang kemudian menamakan pulau itu "Nueva Guinea" karena melihat penduduknya hampir mirip dengan penduduk Guinea di Afrika Barat. Ortiz pun tidak menemukan emas yang dicarinya di sana.

Orang Spanyol lainnya yang mencapai Papua adalah Luis Vaez de Torres. Ia mendarat di teluk Triton. Dalam laporannya, ia menulis bahwa saat itu orang-orang Papua sudah mengenal teknik menempa besi.

Pada 1606, kapal-kapal Belanda pertama kali menyusuri pesisir Nugini. Salah satunya adalah Kapten William Janz yang hendak mencari emas, tetapi secara kebetulan mendarat di berbagai tempat—di antaranya muara Sungai Digul.

Pada 1623, Jan Carstenz, saat melintasi pantai selatan Laut Arafura, sempat menyaksikan puncak-puncak yang diselimuti salju di Papua. Laporan perjalanannya dicemooh orang-orang Eropa yang sulit memercayai adanya salju di dekat khatulistiwa. Puncak gunung yang dilihat Carstenz itu pada kenyatannya adalah Nemangkawi Ningkok, atau Puncak Jaya, atau Puncak Carstenz.

Setelah 1623, hampir tak ada penjelajahan ke Nugini oleh orang Eropa, meski hanya sebatas menyusuri wilayah pesisirnya saja. Banyak pelaut terkenal yang melintasi Nugini, tetapi sangat jarang mereka mendarat di sana.

Pada 1793, Kapten John Hayes dari Inggris mencoba membangun perkampungan orang-orang Inggris di dekat Manokwari. Mereka mendirikan benteng Fort Coronation, dan mencoba mematahkan monopoli Belanda dalam perdagangan rempah-rempah. Tetapi setelah bertahan sekitar 1,5 tahun, akhirnya mereka harus menyerah dan keluar dari Papua—bukan kalah oleh orang Belanda, tetapi karena serangan orang Papua dan malaria.

Pada 1828, Belanda membangun benteng Du Bus di Teluk Triton, dekat Kaimana. Benteng itu didirikan sebagai reaksi Belanda atas kabar burung yang santer tersiar, bahwa Inggris akan membangun benteng di Pulau Melville, lepas pantai utara Australia; juga bahwa Inggris telah punya perusahaan perdagangan di wilayah barat daya Papua. Kabar itu terbukti tidak

benar, tetapi pendudukan Papua oleh Belanda telah dilakukan. Pada akhirnya, keberadaan koloni Belanda yang tak disukai penduduk Papua itu pun bubar. Sebabnya sama: wabah malaria.

Permukiman permanen orang-orang Eropa di Papua baru terwujud pada 1855, ketika dua orang misionaris Protestan dari Jerman—C.W. Ottow dan Johann Gessler—membangun sebuah rumah di Pulau Mansiam, Teluk Manokwari. Keduanya merupakan pionir peletak dasar iman Kristen di Papua. Sekitar 50 tahun setelah masuknya agama Kristen Protestan di Papua itu, misi Katolik Roma untuk pertama kalinya masuk di Merauke, yakni sejak 1905.



Penjajahan Belanda

Pada 1660, Kompeni Belanda menganggap Sultan Tidore punya kedaulatan penuh atas

kepulauan Papua secara umum. Karenanya, Belanda membuat kesepakatan dengan

Tidore yang isinya menyebutkan bahwa tak boleh ada orang Eropa lain masuk ke Papua kecuali Belanda. Lalu klaim Sultan Tidore atas Papua itu kemudian dijadikan dasar oleh Belanda untuk menguasai bagian barat Nugini (Papua).

Tetapi Belanda tak terlalu peduli pada Papua, karena Papua dinilai bukan sumber ekonomi yang berarti. Namun, dua abad kemudian, sikap Belanda terhadap Papua tiba-tiba berubah. Saat itu, 1884, Inggris memproklamkan di Port Moresby bahwa wilayah tenggara Nugini ada di bawah kekuasaannya. Pada tahun yang sama, bendera Jerman berkibar di timur laut pesisir Nugini. Belanda sadar harus bertindak segera, jika tak ingin Papua beralih menjadi kekuasaan bangsa Eropa lain.

Jadilah kemudian Belanda mengklaim sebagian wilayah barat Nugini (Papua), kira-kira dari Jayapura sampai Merauke, sebagai wilayah kekuasaannya. Penjajahan

Papua oleh Belanda, yang telah dimulai jauh-jauh hari sejak 1850-an, secara "resmi" dimulai.

Klaim Belanda itu akhirnya diakui Inggris pada 1895, diikuti pengakuan oleh Jerman pada 1910. Tentu saja, pendudukan dan pengakuan itu kedua-duanya tidak melibatkan orang Papua. Garis batas internasional itu masih berlaku sampai hari ini, hanya saja kini batas itu untuk memisahkan Papua Nugini dan wilayah Indonesia (Provinsi Papua).

Belanda baru mulai menentukan pos-pos administratifnya di Papua pada 1898. Itu pun karena tekanan internasional pada Konferensi Berlin. Konferensi itu mempertanyakan klaim kekuasaan Belanda atas Papua, bahwa klaim terhadap suatu daerah jajahan harus juga disertai adanya pendudukan yang efektif. Sementara saat itu peserta konferensi menganggap tidak ada pendudukan Belanda di Papua, baik efektif atau tidak.



Perang Dunia Kedua di Papua

Belanda, yang tergabung dalam front ABDA (America, British/Inggris, Dutch/Belanda, Australia), meyerah kalah kepada Jepang pada 1942. Akibatnya, semua wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, termasuk Papua.

Setelah berhasil merebut Sorong yang letaknya di ujung paling barat Papua, praktis kekuatan militer Jepang tidak menemui perlawanan berarti di Papua. Mereka berhasil menduduki wilayah pesisir selatan—tepatnya di desa Kamoro, Timika Pantai. Pada awalnya, masyarakat Papua di pesisir selatan bersikap netral, bahkan ramah terhadap pasukan Jepang. Tetapi

lambat-laun sikap ini berubah, akibat perlakuan Jepang yang sering tidak manusiawi. Kenangan buruk penyiksaan, sampai hukuman mati, oleh Jepang itu mungkin masih bisa diingat oleh orang-orang Kamoro sampai sekarang.

Di dataran tinggi, sikap anti-Jepang terang-terangan ditunjukkan. Masyarakat dataran tinggi Papua, khususnya orang Mee dan Moni, membantu Dr. de Bruijn—seorang tokoh pemerintahan Belanda legendaris, yang banyak bersahabat dengan masyarakat dataran tinggi—melawan Jepang. Bantuan mereka berupa suplai makanan, tenaga

sebagai pengangkut barang, juga jasa mata-mata.

Di pesisir utara, perang dahsyat berkecamuk pada 1944, membuat Nugini menjadi pusat perhatian dunia. Jenderal MacArthur, pemimpin pasukan Sekutu, yang baru saja menghabisi pasukan Jepang di pesisir barat laut Papua berhasil merebut pantai Hollandia (Jayapura) sampai Tanah Merah pada April 1944. Ia mendirikan pangkalan militer di sana. Hanya dalam waktu semalam, Jayapura berubah dari kota kecil yang sunyi menjadi kota berpenduduk 250.000 manusia: pasukan Sekutu. Jembatan-jembatan serta pipa pembuangan air didirikan di sepanjang sungai; rawa-rawa ditimbun dengan kerikil dan batu-batu menjadi jalan raya.

Di Biak, Pasukan Jepang yang bersembunyi di gua-gua karang yang tinggi

dan saling terhubung dengan mudah membantai tentara Sekutu. Namun, pada Juni 1944 Biak berhasil dikuasai Sekutu, yang kemudian mulai membangun kembali pangkalan udara Biak.



Salah satu gua Jepang di Biak.

Secara keseluruhan, Sekutu hanya membutuhkan waktu 4 bulan, sejak April sampai Juli 1944, untuk menaklukkan seluruh pesisir utara Papua.



2.2 Pasca Integrasi ke Indonesia

Papua bagian utara, barat, dan selatan berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Tidore pada periode 1453–1890 (Alua 2006:8). Kesultanan Ternate mengakui kekuasaan Kesultanan Tidore atas Papua pada abad ke-16 (Kamma 1981:61). Walaupun secara resmi Belanda menguasai Tanah Papua sejak Traktat London tahun 1824 dan pendirian Fort du Bus di Teluk Triton pada 24 Agustus 1828, namun pemerintahan pertama di Manokwari baru terlaksana pada 9 November 1898.

Penyerahan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Indonesia pada 27

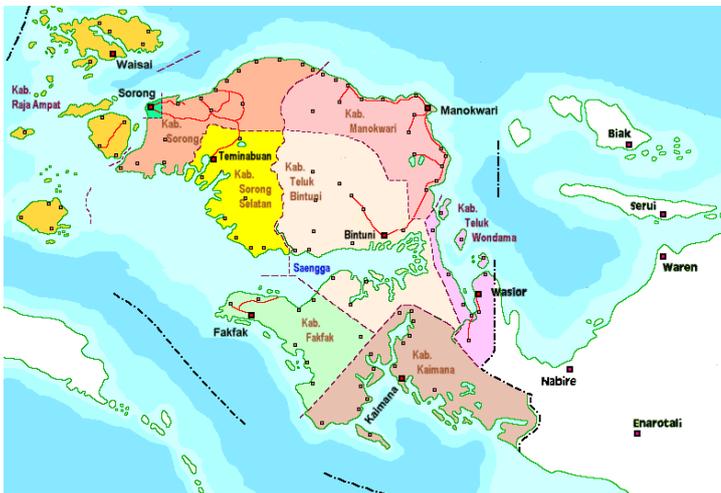
Desember 1949 memunculkan persoalan tentang status politik Papua yang masih diduduki Belanda. Konflik Indonesia-Belanda berkaitan dengan persoalan ini berakhir dengan persetujuan New York 1962, saat Belanda menyerahkan Papua ke UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority), dan selanjutnya UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia.

Sebagai bagian dari Persetujuan New York, Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Hasil resminya, wakil-wakil orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia.

Tanah Papua pada masa Kolonial Belanda biasa disebut dengan *Nederlandse Nieuw Guinea* atau Nugini Belanda. Setelah bergabung dengan Indonesia, nama ini diganti menjadi Provinsi Irian Barat. Lalu pada masa Orde Baru, Soeharto mengganti Irian Barat dengan nama Irian Jaya.

Sesudah berakhirnya rezim Orde Baru, tepatnya pada 1 Januari 2000, nama Irian Jaya berubah menjadi Papua.

UU No.45/1999 dan Inpres No. 1/2003 telah memekarkan Provinsi Papua menjadi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya. Namun dalam praktiknya, provinsi ini berubah menjadi dua provinsi yakni Papua dan Irian Jaya Barat yang berganti nama menjadi Papua Barat sejak 18 April 2007, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.



Provinsi Papua Barat (atas) dan Provinsi Papua (bawah).



Papua dari Penguasa ke Penguasa

Era Prakemerdekaan

- **17 Maret 1824**
Perjanjian London. Belanda dan Inggris membagi wilayah Hindia. Belanda memperoleh Sumatra, Jawa, Maluku, dan Netherlands New Guinea (Nugini Belanda).
- **1942–1944**
Sebagian Besar wilayah utara Nugini Belanda diduduki pasukan Jepang.

Era Presiden Soekarno

- **23 Agustus 1945**
Enam hari setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno mendeklarasikan kesatuan Indonesia “ Dari Sabang sampai Merauke”.
- **15 November 1946**
Dalam persetujuan Linggarjati, Nugini Belanda tidak termasuk wilayah RI.
- **16 Agustus 1956**
Pihak RI membentuk pemerintahan provinsi otonom Irian Barat yang berkedudukan di Tidore.
- **1 Desember 1961**
Oleh Belanda, Nugini Belanda diganti nama menjadi Papua Barat.
- **19 Desember 1961**
Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat.
- **15 Agustus 1962**
Persetujuan New York, Belanda menyerahkan kekuasaan atas Papua Barat kepada Indonesia.
- **1 Oktober 1962**
Badan PBB, The United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih pemerintahan dari Belanda.
- **1 Mei 1963**
Penyerahan pemerintah atas Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Pembagian wilayah enam keresidenan peninggalan pemerintahan Belanda dipertahankan.

Era Presiden Soeharto

- **10 September 1969**
Presiden Soeharto meresmikan sembilan kabupaten di Provinsi Irian Barat dan meresmikan provinsi tersebut menjadi provinsi Indonesia yang ke-17.
- **1 Maret 1973**
Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Era Presiden BJ Habibie

- **4 Oktober 1999**
UU No 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat. Seminggu kemudian, dengan Dekrit No 327/1999 Presiden Habibie mengangkat Gubernur Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Dua keputusan ini ditolak DPRD Irian Jaya. UU No 45/1999 lalu ditunda, dan Dekrit No 327/1999 dibatalkan.

Era Presiden Abdurrahman Wahid

- **1 Januari 2000**
Di Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan pergantian nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua.
- **23 Mei-3 Juni 2000**
Kongres Rakyat Papua menolak penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era Presiden Megawati Soekarnoputri

- **21 November 2001**
UU No 21/2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- **27 Januari 2003**
Inpres No 1/2003 tentang percepatan Pelaksanaan UU No 45/1999 yang sempat tertunda.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

- **23 Desember 2004**
Majelis Rakyat Papua disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- **18 April 2007**
Perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

Otonomi Khusus

Guna mempercepat pembangunan di Papua dan memperkecil kesenjangan, Pemerintah mulai memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Provinsi Papua dan Papua Barat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana wilayah lain di tanah air. Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri.

Namun, ruang yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dianggap masih belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua.

Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu, kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi Khusus bagi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan

alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua.

Kebijakan otonomi Khusus merupakan suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lainnya di tanah air, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 21 Tahun 2001, telah memberikan warna tersendiri dalam model desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Ada aspek-aspek khusus yang harus dibedakan dalam pola relasi kewenangan yang normal antara Jakarta dan Papua.

Dalam konteks percepatan pembangunan nasional, kehadiran UU tersebut merupakan sebuah peluang bagi rakyat dan daerah Papua untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya secara bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen berjudul Pokok-Pokok Pikiran yang Melatarbelakangi Penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua menyebutkan 7 (tujuh) nilai-nilai dasar. Ketujuh nilai dasar tersebut adalah:

1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua;
2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi;

3. Penghargaan terhadap etika dan moral;
4. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
5. Supremasi hukum;
6. Penghargaan terhadap pluralisme; dan
7. Persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

UU Nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal merupakan suatu pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan, bahwa ada 4 (empat) aspek strategis yang menjadi materi dari undang-undang Otonomi Khusus ini, yaitu:

Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 21/2001 menguraikan, bahwa kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 4 ayat (6) menegaskan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan gubernur. Provinsi Papua dapat juga mengadakan

kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama (ayat 7).

Dalam aspek pertahanan dan kepolisian, Gubernur memiliki ruang koordinasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga otoritas terkait. Dalam hal ini, pemerintah dan gubernur menjalin koordinasi dalam kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua (Pasal 4 Ayat 8). Demikian pula, Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Papua saling berkoordinasi menyangkut kebijakan keamanan, serta Gubernur memberikan persetujuan kepada calon Kapolda Papua yang akan diangkat oleh Kapolri (Pasal 48 Ayat 2 dan Ayat 5).

Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.

Sebagaimana yang diberlakukan bagi Aceh, Undang-Undang ini juga memberikan peluang kepada Provinsi Papua untuk memiliki lambang daerah. Lambang daerah merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Selain itu, hak-hak masyarakat adat dilindungi, dihormati, dan diberdayakan. Salah satu aspek yang diurus adalah tanah ulayat dari masyarakat adat.

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- (a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam proses pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan dalam wadah Majelis Rakyat Papua (MPR);

(b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

(c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang ini juga memuat aspek-aspek pembangunan seperti pendidikan dan kebudayaan, keagamaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, serta sosial.

Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Undang-Undang ini juga merubah hubungan keuangan antara Pusat dan Papua.

Provinsi Papua memiliki 5 sumber penerimaan, yaitu: (1) pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; (2) dana perimbangan; (3) penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus; (4) Pinjaman daerah; (5) lain-lain penerimaan yang sah. Berikut ini rincian dana perimbangan dalam Konteks Otonomi Khusus.



Tabel Dana Perimbangan dalam UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

No.	RINCIAN DANA PERIMBANGAN	PEMERINTAH PROV. PAPUA	PEMERINTAH PUSAT
1.	Bagi Hasil Pajak:		
1.	Pajak Hasil Bumi dan Bangunan	90%	10%
2.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	80%	20%
3.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20%	80%
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam:		
1.	Kehutanan	80%	20%
2.	Perikanan	80%	20%
3.	Pertambangan Umum	80%	20%
4.	Pertambangan Minyak Bumi	70%	30%
5.	Pertambangan Gas Alam	70%	30%
3.	Dana Alokasi Umum	Ditetapkan sesuai perundang-undangan	
4.	Dana Alokasi Khusus	Ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan dengan memberikan prioritas pada Provinsi Papua	
5.	Penerimaan Khusus Dalam Rangka Otonomi Khusus	Setara dengan 2% dari plafon DAU Nasional, terutama ditujukan untuk pendidikan dan kesehatan	
6.	Dana Tambahan Dalam Rangka Otonomi Khusus	Besarnya ditetapkan antara pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, terutama ditujukan untuk infrastruktur	

Kebijakan Baru bagi Papua

Pada 16 Mei 2007, Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Inpres Nomor 5/2007). Inpres itu mengintroduksi arah kebijakan baru bagi Papua (*the new deal policy for Papua*) dengan memberikan prioritas pada 5 (lima) kebijakan. Kebijakan baru itu adalah:

1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara; dan
5. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra-putri asli Papua.

Inpres Nomor 5 Tahun 2007 itu mengandung langkah-langkah yang terfokus dan bersifat percepatan terhadap sektor-sektor utama yang selama ini merupakan persoalan yang dialami di tanah Papua. Untuk itu, kiranya perlu memaknai kehadiran Inpres tersebut sebagai instrumen kebijakan yang bersifat teknokratis yang berguna bagi optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus menuju percepatan kesejahteraan rakyat Papua.

Kehadiran Inpres ini bukan untuk meniadakan atau menegasi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, tetapi untuk melengkapi payung hukum otonomi khusus; serta untuk mengkonsolidasi, mensinergikan, dan mensinkronisasi berbagai kebijakan, program, dan lintas sumber pembiayaan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, dunia usaha, maupun masyarakat umum.



Desentralisasi Fiskal bagi Papua

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan di DPR RI pada Oktober 2001, dan mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2002. Pada awal tahun 2002, Gubernur JP Solossa dan wakilnya drh. Constant Karma secara gencar melaksanakan sosialisasi kepada jajaran aparat di pemerintah provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat, dan berusaha meyakinkan masyarakat, bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan dan dana yang relatif besar untuk membiayai pembangunan daerah dan masyarakat.

Berbicara tentang desentralisasi fiskal, terdapat hubungan keuangan (*fiscal relations*) antara 3 (tiga) tingkatan, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Polanya dapat berbentuk Pusat–Provinsi; Pusat–Kabupaten/Kota; dan Provinsi–Kabupaten/Kota.

Dalam konteks pola hubungan keuangan antara Pusat–Provinsi, UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan kerangka pembiayaan dalam bentuk Dana Perimbangan.

Di samping Dana Perimbangan, Pusat juga mengalokasikan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari pos Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, yang biasanya diserahkan kepada Dinas-dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dana yang mengalir dari Pemerintah Pusat ke tanah Papua dalam 2 (dua) tahun terakhir ini meningkat secara drastis. Pada 2006, total jumlah dana untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 17 triliun, kemudian meningkat

menjadi Rp 20,3 triliun pada 2007, dan terus meningkat menjadi sekitar Rp 28 triliun, di mana Provinsi Papua menerima "subsidi" sekitar Rp 21,3 triliun, sedang Provinsi Papua Barat memperoleh dana sekitar Rp 7,9 triliun.

Secara lengkap dapat dilihat dari data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), khususnya pada Tim Teknis Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Tabel Gambaran Jumlah Dana yang Mengalir ke Tanah Papua pada Tahun Anggaran 2006–2008 (Dalam Milyar Rupiah)

STATUS PENDANAAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT 2006–2008	PROVINSI PAPUA			PROVINSI PAPUA BARAT		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1. Belanja Pemerintah Pusat	658,61	758,54	4.560,99	345,95	366,79	1.946,01
a. Dana Dekonsentrasi	531,49	540,46		226,31	213,05	
b. Dana Tugas Pembantuan	127,12	218,08		119,64	153,74	
2. Transfer ke Daerah	12.409,28	14.618,18	16.752,14	3.847,85	4.748,74	5.971,52
a. DBH (i+ii)	1.001,34	1.407,92	2.400,94	841,61	1.084,35	1.147,47
I. Pajak	559,74	820,47	1.481,59	561,38	804,43	276,33
II. SDA	551,00	649,61	919,35	280,22	279,91	871,14
b. DAU	7.251,92	7.863,53	8.506,66	2.746,29	3.159,17	3.458,60
c. DAK	656,74	1.028,07	1.211,82	259,95	396,72	511.623,00
d. Dana Penyesuaian	11,00	294,43	392,29	-	108,50	853,81
e. Dana Otsus (2% DAU Nas)	2.913,28	3.274,23	3.590,14	-	-	-
f. Dana Tambahan Insfrastruktur	575,00	750,00	330,00	-	-	-
JUMLAH	13.067,89	15.376,72	21.313,40	4.193,80	5.115,53	7.922,80

Dalam konteks pola hubungan keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, tampaknya dapat diarahkan pada pola pembagian Dana Otonomi Khusus yang besarnya 2 (dua) persen dari DAU Nasional. Jumlah Dana Otonomi Khusus ini meningkat dari tahun ke tahun, di mana alokasi pertama diberikan pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 1.382.300.000.000 atau sekitar Rp 1,3 triliun, dan meningkat terus

hingga mencapai Rp 3.590.142.895.000 atau Rp 3,5 triliun pada 2008. Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Provinsi Papua menerima dana Otonomi Khusus sekitar Rp 2.609.800.000.000 atau Rp 2,6 triliun, sedangkan Provinsi Papua Barat memperoleh dana sekitar Rp 1,1 triliun, atau tepatnya sebesar Rp 1.118.480.000.000.

2.3 Peta Persoalan dan Konflik

Hasil penelitian tim Papua LIPI (2004) menjelaskan bahwa sumber konflik Papua mencakup empat isu strategis sebagai berikut:

- (i) Sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik Papua;
- (ii) Kekerasan politik dan pelanggaran HAM;
- (iii) Gagalnya pembangunan di Papua; dan
- (iv) Inkonsistensi pemerintah dalam implemmentasi Otsus serta marjinalisasi orang Papua.

Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua.

Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Sementara itu, inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca-Orde Baru. Keempat hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Persoalan, Konteks dan Kontradiksi Narasi

PERSOALAN	KONTEKS	NARASI DOMINAN (NASIONALIS)	NARASI TANDINGAN (NASIONALIS PAPUA)
Sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik.	Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia dan perang dingin.	<ul style="list-style-type: none"> - Teritori Papua bagian dari NKRI - Status politik sudah sah melalui Pepera dan Resolusi PBB - Integrasi = pembebasan dari kolonialisme Belanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang Papua bukan dari Indonesia karena Melanesia. - Pepera tidak sah karena tidak merepresentasikan aspirasi rakyat Papua. - Integrasi = kolonialisasi oleh Indonesia
Kekerasan politik dan pelanggaran HAM	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme internasional	Kekerasan = cara untuk menjaga keutuhan NKRI	Kekerasan adalah pelanggaran HAM
Kegagalan pembangunan	Rezim otoritarianisme Orde Baru dan kapitalisme internasional	Pembangunan = upaya modernisasi orang Papua	Pembangunan = migrasi tenaga kerja dari luar Papua dan marjinalisasi orang Papua
Inkonsistensi kebijakan Otsus dan marjinalisasi orang Papua	Reformasi dan demokratisasi	Otsus = diletakan dalam konteks integrasi nasional dan pembangunan	Otsus = pelurusan sejarah Papua, perlindungan hak-hak orang Papua, pembangunan untuk orang Papua, dan rePapuanisasi

Sumber: Penelitian Tim Papua LIPI (2004, 2005, dan 2006)

Sejarah Integrasi dan Identitas

Konflik Papua lebih disebabkan oleh perbedaan tajam dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Bagi para nasionalis Indonesia, Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia, terlepas dari perbedaan-perbedaan ras maupun kebudayaan. Sementara menurut nasionalis Papua, ke-Papua-an didasarkan pada perbedaan ras antara orang Indonesia yang berakar Melayu dengan orang Papua yang berakar Melanesia.

Untuk memperkuat argumentasi rasial ini, ditambahkan pula perbedaan identitas

politik dan identitas nasional yang didasarkan atas interpretasi terhadap hukum internasional dan sejarah Papua. Menurut nasionalis Papua, prosedur penentuan status politik Papua dalam Pepera 1969 telah dicurangi oleh Indonesia melalui pemilihan yang tidak adil terhadap 1.025 perwakilan rakyat Papua. Sebagai implikasinya, hasil Pepera tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua yang sebenarnya.

Selain itu, dalam perspektif nasionalis Papua, Negara Papua Barat telah ada dan diproklamasikan sejak 1 Desember 1961.



Kekerasan Politik

Sebagai implikasi dari konstruksi nasionalisme Indonesia yang didefinisikan secara militeristik, upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI serupa dan sebangun dengan perang melawan musuh yang nyata dan bersenjata. Bagi para nasionalis Indonesia yang didominasi wacana patriotisme, keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan untuk memisahkan dari NKRI ialah bertentangan dengan hukum. Konsepsi NKRI sampai sekarang ini adalah *hegemonic official text* tentang nasionalisme yang absah dan mendapat legitimasi. Pada masa Orde Baru, negara di representasikan oleh militer dan kepentingan negara ialah kepentingan militer dengan formulasi politik NKRI.

Ketika kebijakan politik negara gagal mengakomodasi kepentingan rakyat, maka tindakan mengkritik institusi negara tidak lain adalah mengkritik institusi militer. Implikasinya, gerakan protes yang

dilakukan rakyat Papua terhadap kebijakan negara yang meminggirkan mereka dihadapi dengan pendekatan keamanan.

Walaupun Orde Baru telah jatuh, namun karakteristik militerisme, yaitu kekerasan dan sentralisme dalam pendekatan negara terhadap rakyat Papua masih nampak. Kehadiran pemerintah Indonesia pada 1962 di Papua menandai babak awal kekerasan politik. Periode 1962 dan 1984 dapat dikatakan sebagai perang rahasia antara TNI dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Representasi menonjol negara dan pemerintah pusat di Papua adalah aparat-aparat militer dan kepolisian. Negara sebagai institusi hadir di Papua dalam bentuk kekuatan-kekuatan militer. Sebaliknya, negara sebagai seni memerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak hadir di Papua.



Kegagalan Pembangunan

Disparitas ekonomi dan pembangunan antara Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari adanya *conflict of interest* para pendatang di tanah Papua, diskriminasi kebijakan pusat pada daerah, dan eksploitasi budaya dan SDA Papua. Otsus tidak menjamin kesejahteraan dan pembangunan ekonomi untuk rakyat Papua.

Pertumbuhan ekonomi sebelum Otsus pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998, mencapai 20,18%, 13,87%, 7,42%, 12,72%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sesudah Otsus diimplementasikan pada tahun 2002, 2003, 2004, hanya mencapai 8,7%, 2,96%, dan 0,53% (BPS Papua 2006).

Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi justru menurun pada saat Otsus diimplementasikan.

Seiring dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi pada saat otonomi khusus diimplementasikan, jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan juga meningkat. Dari 2.556.419 orang penduduk Papua pada tahun 2004, jumlah

keluarga yang dapat dikategorikan miskin juga menjadi bertambah.

Menurut keterangan ketua BPS provinsi Papua, 47,99% keluarga di Papua dan 36,85% keluarga di Irian Jaya Barat pada maret 2006 dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin (Elsham News Service 6 september 2006).

Selain itu, desa-desa di Papua juga termasuk dalam kategori desa miskin atau desa tertinggal. Mayoritas desa di Papua (82,83%) dan Irian Jaya Barat (81,29%) merupakan desa tertinggal (Sinar Harapan 12 September 2006).

Secara ekonomi, posisi penduduk asli Papua berada dalam posisi marjinal. Sebagai buktinya, pada tahun 2003, kota-kota provinsi, kabupaten, dan kota dihuni oleh pendatang (90%) yang menguasai sebagian besar (90%) perekonomian, perdagangan, tenaga kerja, transportasi, kantor-kantor swasta, dan bisnis lainnya (Kompas, 23 Februari 2003). Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli dan pendatang.



Marjinalisasi Orang Asli Papua

Marjinalisasi adalah situasi yang dialami oleh kelompok subordinat sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang bersifat asimetris dengan kelompok dominan, namun masih terdapat ruang bagi kelompok subordinat ini untuk bertahan. Pada konteks pengalaman orang Papua, marjinalisasi dapat dilihat pada aspek demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Pada aspek demografi, jumlah asli orang Papua mengalami penurunan sebagai akibat

membanjirnya pendatang dari luar, baik berupa transmigrasi maupun migrasi.

Fenomena ini sering disebut sebagai *displacement* orang asli Papua. Pada 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%, menjadi 4% pada 1971, dan menjadi lebih dari 35% pada 2000. Pada 2005 diperkirakan penduduk pendatang mencapai 41% dan terus melonjak sampai 53,5% pada 2011. Pada masa depan,

dikhawatirkan orang asli Papua akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sebagai akibatnya adalah timbulnya kekhawatiran orang asli Papua akan marjinalisasi pada ranah politik. Dengan menjadi penduduk minoritas, misalnya, posisi politik orang asli Papua melemah karena suara mereka lebih kecil daripada pendatang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Dari segi budaya, banyak orang asli Papua merasa ekspresi budayanya selalu dicurigai terkait dengan praktik politik separatisme.

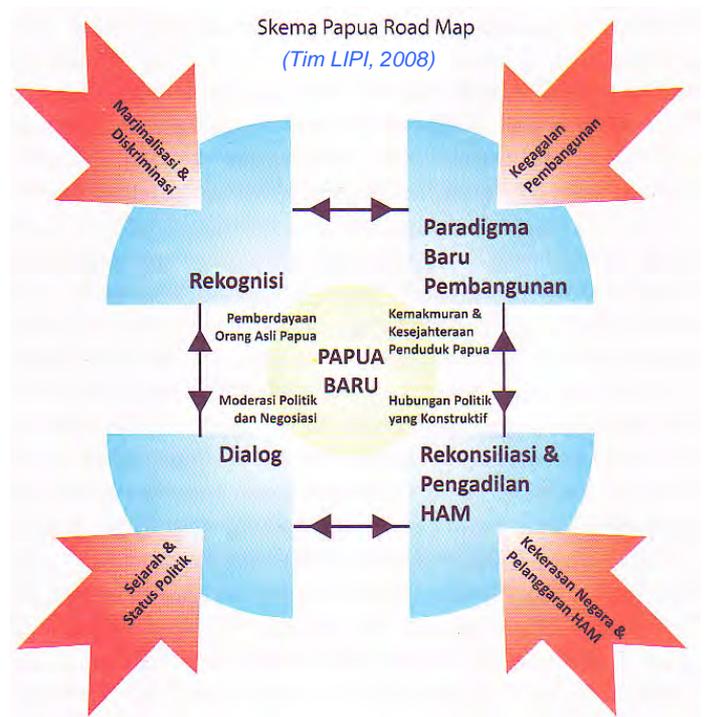
Sementara itu, marjinalisasi dalam ranah politik dapat dilihat dalam kurangnya orang-orang asli Papua yang menduduki jabatan-jabatan politik di atas tanah Papua pada masa Orde Baru.



Papua Road Map: Menuju Papua Baru

Tim LIPI (2004–2008), dalam bukunya *Papua Road Map*, merumuskan empat agenda kerja utama dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh seluruh pihak sebagai berikut:

1. Rekognisi yang berorientasi pemberdayaan atas rakyat asli Papua sebagai semacam 'kompensasi' atas marjinalisasi dan diskriminasi yang mereka alami selama ini;
2. Paradigma baru pembangunan yang berorientasi pemenuhan hak-hak dasar rakyat Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya;
3. Dialog yang dilandasi saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dalam rangka menyamakan persepsi dalam menatap masa depan; dan
4. Rekonsiliasi yang berorientasi pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami rakyat Papua serta kesediaan otoritas politik dan negara mengakuinya sebagai kekerasan masa lalu.



Dokumen tersebut dinamakan *road map*, karena ia seperti peta perjalanan yang dimulai dari hulu masalah yang berbeda-beda tetapi sama-sama menuju Papua baru yang lebih baik, yang lebih damai dan berkeadilan. Seperti rekonsiliasi sosial dalam pengertian luas, empat langkah ini diharapkan mampu memutus lingkaran konflik dan membawa Indonesia-dengan-

Papua di dalamnya memasuki tahapan baru yang konstruktif dan progresif. Semua akar masalah, termasuk yang paling sensitif bagi pemerintah pusat, direkonstruksi di dalam peta perjalanan ini. Peta perjalanan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan jujur tentang sumber konflik Papua, dan membantu para pengambil keputusan menjawab sebagian besar persoalan Papua dalam jangka sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

Perlu disadari sepenuhnya bahwa keempat langkah yang saling terkait tersebut bukanlah agenda yang mudah dan bisa dilakukan sekali jadi. Apalagi sikap saling

curiga masih melembaga, baik di kalangan unsur negara di pusat maupun di berbagai elemen masyarakat Papua. Dukungan komitmen politik sangatlah dibutuhkan untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh. Pada tingkat paling awal, salah satu bentuk komitmen politik yang diperlukan adalah dukungan penuh dan konsisten terhadap implementasi otonomi khusus Papua sebagai bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Terlepas dari berbagai kekurangannya, UU Otsus Papua sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar yang memadai sehingga dapat menjadi pijakan awal bagi penyelesaian secara menyeluruh masalah-masalah Papua.



2.4 Profil Daerah Provinsi Papua

Nama Resmi	: Provinsi Papua
Ibu Kota	: Jayapura
Letak Geografis	: 9° 20' – 0° 10' LS; 134° 10' – 141° 10' BT
Zona Waktu	: WIT
Luas	: 317.062 km ²
Jumlah Penduduk	: 2.056.000 jiwa
Kepadatan Penduduk	: 6,49 jiwa/km ²
Wilayah Administrasi	: 26 Kabupaten 1 Kota 357 Kecamatan 3.464 Desa/Kelurahan
Suku	: Papua (52%): Suku Aitinyo, Suku Aefak, Suku Asmat, Suku Agast, Suku Dani, Suku Ayamaru, Suku Mandacan, Suku Biak, Suku Serui. Non Papua/Pendatang (48%): Jawa, Makassar, Batak, Manado, Aborigin, Huli, Dayak, Indonesia-Australia
Agama	: Kristen Protestan 51,20%, Katolik 25,42%, Islam 23%, Budha 0,13%, Hindu 0,25%, lain-lain 1%.
Bahasa	: Bahasa Indonesia dan 268 Bahasa Daerah
Lagu Daerah	: Apuse, Yamko Rambe Yamko

(Sumber: BPS Provinsi Papua, *Papua dalam Angka*, 2009)

PDRB Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha

Total nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi di Papua selama tahun 2008 adalah 54.73 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar -1,17 persen dari tahun sebelumnya. Atas dasar harga konstan, nilai PDRB tahun 2008 adalah 18.91 triliun rupiah atau turun sebesar -1.49 persen dari tahun 2007.

Sementara tanpa sub sektor pertambangan tanpa migas, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 telah mencapai nilai 22.03 triliun rupiah atau meningkat 25.93 persen dari tahun sebelumnya dan atas dasar harga konstan telah bernilai 10.23 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8.79 persen dari tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian, sebagai kontributor tertinggi terhadap PDRB provinsi Papua, pada tahun 2008 berperan sebesar 60.17 persen. Kontributor tertinggi kedua adalah sektor pertanian (11.86 persen) diikuti sektor bangunan dan jasa-jasa dengan kontribusi masing-masing 6.89 persen dan 6.12 persen. Sementara sektor-sektor lainnya berperan di bawah 6 persen.

Rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian selama lima tahun terakhir adalah 65.37 persen namun mengalami penurunan trend seiring dengan meningkatkan peranan dari sektor bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi;

dan jasa-jasa. Tanpa nilai tambah dari sub sektor pertambangan tanpa migas, perekonomian Papua masih didominasi sektor pertanian dimana pada tahun 2008 berperan sebesar 29.47 persen diikuti sektor bangunan 17.13 persen. Urutan ketiga dan keempat adalah sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masing-masing berperan sebesar 15.19 persen dan 14.50 persen. Selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang 12.63 persen sementara sektor lainnya hanya berperan di bawah 5 persen. Produktifitas ekonomi suatu daerah terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan. Selama lima tahun terakhir, Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup berfluktuasi. Setelah mencapai pertumbuhan tertinggi di tahun 2005 (36.40 persen), tahun 2006 secara drastis turun ke -17.14 persen. Tahun berikutnya kembali ke pertumbuhan positif 4.34 persen dan tahun 2008 berkontraksi kembali ke -1.49 persen. Tanpa sub sektor pertambangan tanpa migas, grafik pertumbuhan provinsi Papua khususnya lima tahun terakhir (2004-2008) terlihat jauh lebih stabil dengan rata-rata pertumbuhan 7.39 persen. Pada tahun 2008 perekonomian tumbuh 8.79 persen, tidak jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang tumbuh pada kisaran 8 persen.



PDRB Provinsi Papua Perkapita

Pada tahun 2008 PDRB perkapita provinsi Papua turun 3.13 persen dari tahun 2007 atau berkurang dari 27.48 juta rupiah menjadi 26.61 juta rupiah. Tanpa sub

sektor pertambangan tanpa migas, tercatat PDRB perkapita tahun 2008 adalah 10.71 juta rupiah atau meningkat 23.43 persen dari tahun 2007.

PDRB Provinsi Papua Menurut Penggunaan

Sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Papua digunakan untuk konsumsi rumah tangga (51.91 persen pada tahun 2008). Disusul untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik 31.55 persen, konsumsi pemerintah 21.88 persen dan untuk komponen-komponen pengeluaran lainnya hanya di bawah 2 persen.

Pada tahun 2008 konsumsi rumah tangga tumbuh 13.46 persen dari tahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda, komponen lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah dan PMTB tumbuh pada kisaran 12 hingga 13 persen pada tahun 2008. Sementara itu, di tahun yang sama nilai ekspor mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar -20.24 persen.



PDRB Provinsi Papua atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2004–2008 (Dalam Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian/Agriculture	3.913.769	4.539.675	5.147.877	5.544.526	6.493.368
2. Pertambangan & Penggalian	14.291.971	31.248.690	32.245.723	38.056.447	32.933.340
3. Industri Pengolahan	623.152	707.230	836.832	896.875	996.532
4. Listrik & Air Minum	65.351	72.479	80.745	89.277	97.925
5. Bangunan/Construction	1.248.208	1.537.839	1.929.556	2.579.329	3.773.804
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1.489.545	1.751.934	2.083.578	2.459.999	3.194.197
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.173.072	1.501.538	1.821.102	2,244,085.	2.782.868
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	311.400	360.192	506.050	820.177	1.114.612
9. Jasa-jasa	1.726.431	1.895.737	2.243.762	2.689.735	3.346.977
PDRB/GRDP	24.842.904	43.615.319	46.895.229	55.380.453	54.733.627



2.5 Profil Daerah Provinsi Papua Barat

Nama Resmi	: Provinsi Papua Barat
Ibu Kota	: Manokwari
Letak Geografis	: 0° 0' – 4° 0' LS; 124° 0' – 132° 10' BT
Zona Waktu	: WIT
Luas	: 126.093 km ²
Jumlah Penduduk	: 722.981 jiwa
Kepadatan Penduduk	: 5,7 jiwa/km ²
Wilayah Administrasi	: 8 Kabupaten 1 Kota 104 Kecamatan 1.160 Desa/Kelurahan
Agama	: Kristen (55,7%), Islam (41,27%), Katolik (7,7%), lainnya: kurang dari 7% (Hindu, Buddha, Konghucu,dll.)
Bahasa	: Bahasa Indonesia

(Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, *Papua Barat dalam Angka, 2008*)



PDRB Provinsi Papua Barat dan Perkembangannya

Perekonomian Papua Barat selama tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan yang positif apabila dibandingkan dengan tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar sektor yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pada tahun 2007, besarsan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta adalah sebesar 10,37

triliun Rupiah, mengalami kenaikan sebesar 13,03 persen dibanding tahun 2006 yang sebesar 8,95 triliun Rupiah.

Pada tahun 2007, nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,93 triliun Rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2006 yang besarnya 5,55 triliun Rupiah.



Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Papua Barat adalah sebesar 6,95 persen, lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 4,55 persen. Selama kurun waktu 7 tahun, sejak tahun dasar 2000, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Papua Barat untuk harga berlaku cenderung meningkat semakin cepat, sedangkan untuk harga konstan 2000 meningkat lebih cepat hingga tahun 2003 dan selebihnya sampai tahun 2006 pertumbuhannya melambat.

Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat

Sektor Pertanian di Provinsi Papua Barat yang didominasi oleh Subsektor Kehutanan dan Perikanan mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Provinsi Papua Barat.

Hasil di Sektor Pertanian sangat besar pengaruhnya terhadap penciptaan PDRB Propinsi Papua Barat, walaupun sejak tahun 2002 peranannya terus mengalami penurunan hingga sebesar 26,64 persen pada tahun 2007.

Urutan kedua adalah Sektor Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 20,10 persen. Jika dilihat dari sub-sektornya, peningkatan nilai tambah pada Subsektor Industri Migas sangat mempengaruhi adanya peningkatan pada Sektor Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 12,93 persen.

Sektor Pertambangan dan Penggalan menempati urutan ketiga pembentuk PDRB Provinsi Papua Barat dengan peranan sebesar 15,98 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2006 yang besarnya 17,36 persen. Subsektor Migas yang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya peranan Sektor Pertambangan dan Penggalan memiliki peranan tertinggi apabila dibandingkan dengan subsektor-subsektor pada sektor lainnya yaitu sebesar 15,21 persen.

Urutan keempat pembentuk PDRB Provinsi Papua Barat adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Peranan sektor ini pada tahun 2007 sebesar 10,58 persen sedikit mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2003 yang besarnya 10,01 persen.



Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Menurut Sektor

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat mencapai 6,95 persen, lebih cepat daripada tahun 2006 yang mencapai pertumbuhan 4,35 persen.

Apabila mengamati sektor-sektor yang membentuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat maka dapat diketahui sektor yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2007 adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan sebesar

24,91 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2006 yang mengalami kontraksi sebesar -1,80 persen.

Pertumbuhan tertinggi kedua pada tahun 2007 adalah Sektor Bangunan sebesar 12,57 persen, melambat dari tahun 2006 yang tumbuh sebesar 13,06 persen. Di urutan ketiga adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,89 persen, lebih lambat dari tahun 2006 yang tumbuh sebesar 14,84 persen.



PDRB Provinsi Papua Barat atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2003–2007 (dalam juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian/Agriculture	1.769.974	1.936.920	2.152.323	2.428.811	2.762.425
2. Pertambangan & Penggalian	1.023.198	1.216.984	1.528.176	1.522.891	1.656.866
3. Industri Pengolahan	885.720	1.242.807	1.580.370	1.741.954	2.084.468
4. Listrik & Air Minum	23.929	30.593	39.718	40.039	57.746
5. Bangunan/Construction	386.898	438.790	565.568	715.645	893.250
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	556.305	644.544	769.089	925.805	1.097.002
7. Pengangkutan & Komunikasi	349.663	413.290	508.224	646.121	771.098
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	85.720	123.393	143.133	151.430	214.746
9. Jasa-jasa	474.190	577.215	627.172	734.844	832.235
PDRB/GRDP	5.555.597	6.576.537	7.913.777	8.945.540	10.369.836

3

Pelestarian Papua



3.1 Keanekaragaman Ekosistem

Aneka rupa tipe ekosistem yang ditemukan di Papua seperti menjawab pertanyaan, mengapa Tanah Papua punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan berkelimpahan flora-fauna endemik. Keanekaragaman ekosistem Papua itu menciptakan berbagai kondisi ekologi—sejak hamparan terumbu karangnya yang punya jumlah spesies terbanyak di dunia, sampai kelompok vegetasi-tahan-bekunya (*cryovegetation*) yang tumbuh di es dan salju di puncak gunungnya yang tertinggi. Setiap kondisi ekologi itu menunjang kelangsungan hidup komunitas flora dan fauna yang sangat khusus.

Beberapa tipe ekosistem Papua telah dapat dikenali dengan baik. Sementara itu beberapa lainnya ada yang nyaris tidak dikenal, begitu pula keragaman dan interaksi ekologis yang terjadi di dalamnya belum lagi ditemukan orang (misalnya, ekosistem gua). Namun keunikan, kompleksitas, dan keragaman setiap tipe ekosistem itu sangatlah jelas, dan itulah yang menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan biologi terpenting di dunia.

Sekitar 85% kawasan Papua adalah hutan pada tahun 2000. Lebih dari 60% hutan itu merupakan hutan hujan dataran rendah

(atau sekitar 51% dari total luas Papua)—menjadikan Papua sebagai hutan tropis dataran rendah terluas yang masih tersisa di wilayah Indonesia.

Kawasan luas berupa hutan mangrove, ekosistem rawa, dan hutan pegunungan juga ditemukan di Papua, selain beberapa tipe ekosistem lainnya.



Tabel Jenis-Jenis Lahan Utama di Papua

JENIS LAHAN	LUAS (Km ²)	% dari Luas Lahan yang Tertutup Hutan	% dari Luas Total Lahan
Hutan mangrove	15,124	4.3 %	3.6 %
Rawa	7,465	2.1 %	1.8 %
Rawa semak-semak	10,559	3.0 %	2.5 %
Hutan rawa	50,288	14.3 %	12.1 %
Hutan hujan dataran rendah	213,627	60.8 %	51.3 %
Hutan hujan pegunungan rendah	8,658	2.5 %	2.1 %
Hutan hujan pegunungan tinggi	27,373	7.8 %	6.6 %
Hutan Subalpin	4,266	1.2 %	1.0 %
Semak-semak	4,490	1.3 %	1.1 %
Padang rumput (Savana)	9,298	2.6 %	2.2 %
TOTAL TUTUPAN HUTAN (Tahun 2000)	351,147		84.4 %
Tanah gundul, sawah-sawah, permukiman transmigrasi	64,982	-	15.6 %
TOTAL LUAS LAHAN	416,129		100.0 %

Keterangan: Angka-angka di atas adalah hasil perkiraan interpretasi foto Landsat 7 ETM+ atas Papua, kombinasi foto tahun 1999 dan 2000. Sumber: Forest Watch Indonesia, Conservation International, Kementerian Kehutanan.



Kekayaan Alam

Sekitar 50% dari keanekaragaman hayati di Indonesia terdapat di Tanah Papua (Consevation International,1999). Terdapat tambang emas terbesar di dunia dan kandungan gas bumi nomor tiga terbesar di Indonesia. Diperkirakan, cadangan tembaganya adalah terbesar di dunia, yaitu sekitar 2,5 milyar ton. Salah satu cadangan

gas terbesar terdapat di daerah Teluk Bintuni.

Potensi tambang di Papua itu meliputi minyak dan gas bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan lainnya. Merauke menyimpan sekitar 14,4 kaki kubik potensi migas dengan mutu dan

jumlah terbanyak di dunia. Sementara potensi emas dan tembaga terdapat di sebagian besar wilayah Papua. Adapun potensi batubara terdapat di Memberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika hingga Merauke.



Selain potensi pertambangan, Papua menyimpan kekayaan hutan berupa kayu merbau atau kayu besi dengan kualitas terbaik. Sekitar enam juta hektare hutan di Papua kaya dengan kayu merbau, yang setiap hektarenya menyimpan potensi sekitar 13,65 meter kubik kayu merbau. Sementara potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektare. Setiap batang sagu menghasilkan sekitar 100 kg tepung yang jika diolah akan dapat menghasilkan 25 liter etanol.

Juga terdapat kekayaan ekosistem, mulai dari terumbu karang, hutan bakau, rawa, sabanah, hutan dataran rendah, montane dan alpin. Tanah Papua merupakan salah satu dari tujuh kawasan di dunia yang masih memiliki 10 persen hutan yang belum disentuh (Green Peace, 2006).

Hasil penelitian Konservasi Internasional Indonesia (CII) menyimpulkan bahwa Provinsi Papua mengandung 20.000 sampai 25.000 tumbuhan berpembuluh. Perhitungan tersebut didasarkan pada keragaman anggrek (sekitar 3000 spesies) dan pteridofita (keluarga paku-pakuan, kira-kira sebanyak 2000 spesies) yang sangat tinggi, serta proporsi kedua taksa tersebut dalam keragaman flora secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang ada diperkirakan sekitar 60–90 % tumbuhan di Pulau Papua merupakan spesies endemik, hanya terdapat di Papua. Banyak di antara tetumbuhan itu memiliki sebaran yang sangat terbatas. Hampir 80% luas wilayah Papua masih dalam bentuk hutan yang masih relatif utuh dan menjadi rumah bagi lebih dari 50% jenis satwa dan tumbuhan yang ada di Indonesia (CI, 1999).



3.2 Interaksi Manusia dan Lingkungan



Kesadaran mencintai lingkungan hidup, dalam interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya, timbul dari keseharian setiap suku-suku bangsa di dunia ini, termasuk dalam masyarakat asli di Tanah Papua. Pandangan kosmis masyarakat tradisional, menurut Dr. JR Mansoben, antropolog dari Universitas Cendrawasih, hampir menjadi patokan sebagian besar kelompok etnik di Tanah Papua. Mereka bisa tergolong ke dalam masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan pengetahuan dan kearifan lokal masing-masing suku.

Masyarakat Suku Amungme, misalnya, memasukkan simbol-simbol lingkungan hidup dengan tubuh seorang manusia.

Tanah bagi orang Amungme adalah ibu atau mama, karena itu tak heran kalau mereka memiliki hubungan yang begitu kuat dengan tanah dan alam. Alam sekitarnya dianggap sebagai tubuh seorang mama yang memberi dan menjamin hidup mereka. Begitu pula masyarakat Asmat yang menganggap pohon sebagai penjelmaan jati diri manusia. Pandangan ini telah menyebabkan terbentuknya norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang berfungsi sebagai pengendali sosial bagi masyarakat adat untuk berintegrasi dengan ekosistem. Norma-norma itu mengatur dan menetapkan aturan-aturan yang baik untuk dijalankan maupun larangan-larangan termasuk pantangan yang harus dipatuhi.

Sistem pengetahuan (kearifan) tradisional itu melarang masyarakat untuk mengambil hasil hutan atau hasil laut pada suatu tempat tertentu yang telah disepakati selama beberapa waktu tertentu. Larangan-larangan ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi berbagai jenis flora dan satwa serta biota laut guna berkembang-biak

tanpa diganggu selama jangka waktu tertentu. Hal itu penting agar sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan masyarakat itu tetap lestari, dan senantiasa bisa memberikan hasil yang banyak bagi kecukupan masyarakat sekitarnya.



Kearifan Lokal: Hutan adalah Ibu

Bagi masyarakat Papua, hutan bukan saja merupakan sumber pangan dan pendapatan, melainkan juga sumber pengetahuan dan budaya. Beragam kebudayaan di kalangan Masyarakat Adat Papua bersumber dari hutan mereka. “Jika tidak ada hutan lagi, maka adat kita sudah tidak ada lagi,” kata Rafel Numberjelas, salah seorang kepala suku di wilayah Keerom.

Masyarakat Adat Papua yang berada jauh dari wilayah perkotaan sangat paham akan hal ini. Mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam secara turun-temurun.

Penduduk Sukikai di Mapia bisa tahu kapan mereka akan mengalami musim hujan, musim kering, atau musim angin dari waktu ayam bertelur, gugurnya daun pohon tertentu, hingga suara burung. Jika ayam-ayam mulai bertelur, itu menandakan musim hujan akan segera tiba. Ketika pohon *digii* menggugurkan daunnya, itu pertanda musim kering akan tiba dan sekaligus menandakan waktu yang tepat untuk berburu kodok. Jika burung *pudidi* mulai berkicau ramai, itu pertanda musim

kering segera tiba. Sedangkan suara burung *wagibo* menandakan musim hujan lah yang akan tiba.



Selain tanda-tanda alam ini, dalam kehidupan sehari-hari, Orang Mee yang hidup di Wanggar, Kamuu, Mapia, dan Piyaiye telah memiliki

pengetahuan tinggi mengenai cara memperlakukan tanah. Meskipun Orang Mee berkebun dalam tradisi peramu, yakni berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara membuka hutan, namun dalam pandangan Orang Mee, ini bukanlah perambahan hutan yang negatif sebagaimana pandangan masyarakat modern terhadap tradisi peramu ini. Sehingga bukanlah sesuatu yang merusak lingkungan jika mereka membuka satu lokasi untuk berkebun kembali.



dilanggar, segala macam tanaman di kebun mereka akan habis dimakan ulat.

Keyakinan Orang Mee lainnya adalah bahwa di dalam tanah ada sesuatu berupa duri tanah. Duri

Dalam memperlakukan tanah, orang Mee mengenal tiga istilah. *Tutuma* adalah istilah orang Mee terhadap tanah yang baru saja dipanen hasilnya dan mulai tumbuh rerumputan. Lahan yang disebut *tutuma* adalah lahan yang tidak boleh ditanami kembali. *Utougibo* adalah istilah Orang Mee untuk lahan yang sudah ditumbuhi pohon namun belum memiliki humus. Lahan seperti ini juga belum boleh ditanami. Sedangkan *nagamoteka* adalah istilah untuk lahan yang sudah memiliki humus. Lahan seperti ini sudah boleh ditanami kembali karena sudah memiliki humus. Hanya jika lahan *nagamoteka* ini tidak bisa ditemukan oleh masyarakat Mee saja lah maka mereka akan membuka hutan untuk berkebun lagi.

Orang Mee juga meyakini keterhubungan mereka dengan tanah dan hutan, seperti hubungan dua individu, ibu dan anak. Kenyataan ini membuat orang Mee yakin bahwa setelah memegang uang mereka tidak boleh pergi ke kebun. Hal yang sama juga berlaku jika seseorang telah melakukan perkelahian atau membunuh, baik manusia atau anjing. Orang Mee mempelajari ini secara turun-temurun dari alam di sekitar mereka. Jika kebiasaan ini

tanah ini akan memberikan tulahnya jika Orang Mee memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil kayu atau isi bumi (menambang) dari tanah milik mereka. Seorang pemuka adat Kamuu, Gregorius Bobii, menegaskan kearifan lokal orang Mee sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka.

“Pengelolaan kebun orang Mee melibatkan kearifan lokal yang telah mereka hayati. Hasil kebun tergantung pada pemeliharaan dan larangan-larangan yang dipatuhi. Kebun dipandang sebagai sesama yang memiliki pengertian dan perasaan. Jika manusia memberikan perhatian terhadap kebun dan mengikuti larangan-larangan, hasilnya pasti baik. Jika tidak dipelihara dan larangan-larangan tidak dipatuhi, itu sama dengan tidak menghormati kebun, tidak memenuhi permintaan kebun. Jadi kebun itu ibarat sosok yang meminta perhatian manusia sebelum menyerahkan miliknya kepada manusia,” kata Gregorius Bobii.

Dalam memandang tanah, Orang Mee tidak pernah menganggap diri mereka sebagai tuan atas tanahnya. Tanah tidak diberikan oleh Yang Mahakuasa dalam arti manusia memiliki kekuasaan tak terbatas



atas tanah. Inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi Orang Mee yang tidak memiliki keturunan dalam mewariskan tanah/hutan kepada orang lain. Ini juga yang membuat orang Mee meyakini bahwa hak ulayat tidak didapatkan karena jasa tertentu. Hak ulayat adalah anugerah Yang Mahakuasa. Relasinya adalah vertikal, antara Yang Mahakuasa dengan manusia. Bukan relasi horisontal, antara manusia dengan manusia. Menurut para peneliti, hal seperti ini juga ditemukan pada Masyarakat Jerisiam maupun Watee di sekitar Pantai Nusi.

Meski Orang Mee berpandangan bahwa hak ulayat tidak bisa didapatkan atau diberikan karena jasa tertentu, namun pandangan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan tak terbatas atas tanah ini bisa jadi merupakan alasan satu marga suku Mee mengalihkan kepemilikan tanah mereka kepada marga lainnya. Peralihan kepemilikan ini biasanya terjadi karena salah satu marga membalas jasa marga yang lainnya. Marga yang mendapatkan kepemilikan tanah tersebut bisa

memanfaatkan tanah itu untuk berburu, berkebun, atau membangun tempat tinggal, dan tanah pemberian ini pantang untuk diambil kembali oleh marga pemilik semula.

Konsep tanah bagi Orang Mee mirip dengan konsep hak asasi manusia. Seperti juga HAM yang dimiliki dan sekaligus mengikat manusia sejak ia lahir, maka tanah juga dimiliki oleh orang Mee sejak ia lahir. Demikian juga sebaliknya, tanah memiliki manusia sejak manusia dilahirkan. Pemahaman ini bisa menjelaskan mengapa Orang Mee menganggap tanah mereka sebagai ibu mereka.

Dari pengalaman masyarakat Mee ini, kita bisa melihat bahwa Masyarakat Adat Papua memiliki kearifan tradisional yang berfungsi sebagai benteng pertahanan alam sekitar mereka. Setidaknya, meskipun laju kerusakan hutan terus terjadi di Papua, namun melalui kearifan tradisional ini Orang Mee telah sejak dulu paham untuk menahan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Masyarakat Suku Dani di pedalaman tanah Papua juga telah mengenal prinsip keseimbangan lingkungan sejak dulu. Mereka membuat parit-parit mengelilingi bedeng-bedeng agar terhindar dari kerusakan oleh babi. Parit-parit itu juga sangat berguna karena mengeluarkan air

bekas tanah dari akar-akar batatas (*Ipomea batatas/ipere*), memberikan kesuburan bagi bedeng-bedeng batatas (*ipere*) dan menyalurkan air saat musim kemarau tiba. Sistem pengairan ini sangat berguna bagi kesuburan tanah dan juga mencegah terjadinya banjir.



Kearifan Lokal: Melestarikan Sumber Daya Laut

Sejak dahulu kala, masyarakat kepulauan Raja Ampat menangkap ikan dengan teknologi tradisional seperti *kalawai* atau *penikam*. Mereka juga membuat karamba dari kayu, yang dibuat melingkar atau memanjang, dengan berliku-liku dan dirancang seperti tempat yang mengundang datangnya kawanan ikan. Ketika ikan telah berada di dalam karamba pada saat air pasang, ikan-ikan itu tidak dapat keluar ketika air surut. Kemudian ikan-ikan ini ditangkap oleh para nelayan dengan serok atau tangguk yang dibuat dari jaring yang telah di jahit.

Teknik lain yang sering digunakan adalah cara *molo* atau menyelam dengan alat senapan yang dirancang khusus untuk menembak ikan, yang dibuat dari kayu dan kawat sebagai penikam yang dapat dilontarkan dari senapan. Para *pemolo* dilengkapi dengan kaca *molo* atau kaca selam untuk melindungi mata.

Ada keunikan lain yang sering dijumpai di kepulauan Raja Ampat, antara lain memancing dengan kail tanpa umpan yang sering disebut dengan istilah *bacigi*. Hal ini dilakukan pada ikan yang berkumpul dalam jumlah besar dan padat mulai dari

pertengahan laut sampai di permukaan air sehingga mudah dikait dengan kail kosong.

Saat menangkap ikan pada malam hari, biasanya masyarakat di kawasan teluk Mayalibit, kampung Lopintol, hanya menggunakan lampu gas (petromaks) untuk mengajak ikan dalam jumlah besar ke tepi pantai, lalu ditimba dengan serok atau tangguk yang dibuat dari jala atau jaring. Masyarakat di kampung ini juga melakukan *lobe* malam.

Ada beberapa cara yang lazim digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Papua yang tinggal di pesisir pantai dan pulau-pulau. Yang paling sederhana dan biasa dilakukan adalah menggunakan perahu dayung dan alat pancing seperti tali pancing atau nilon, kail, dan timah sebagai pemberat untuk memancing ikan di dasar laut. Selain itu, ada juga cara tunda untuk jenis ikan tuna/cakalang dan tenggiri yang menggunakan umpan dari tali rafia yang dihaluskan dan dipasang pada kail dengan cara diikat.

Cara-cara seperti itu merupakan bagian dari kearifan lokal yang cara penangkapannya sangat ramah lingkungan

dan tidak merusak laut. Selain cara-cara tradisional tadi, masyarakat Papua juga memiliki budaya *sasi* yang sering diterapkan pada jenis ikan yang mempunyai nilai jual tinggi. Selain ikan, *sasi* juga diberlakukan pada beberapa jenis siput atau kerang dan lobster dalam jangka waktu tertentu.

Budaya *sasi* dikenal sebagai suatu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian dibuat larangannya, yang berlaku bagi seluruh penduduk kampung selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Misalnya, dalam jangka setahun, ikan, udang, dan beberapa jenis kerang tertentu tidak boleh ditangkap. Setelah batas waktu yang ditentukan selesai, barulah diselenggarakan musyawarah bersama untuk memutuskan apakah hasil laut yang tadinya telah di-*sasi* boleh dipanen atau ditangkap oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar populasi jenis ikan, kerang, udang, dan teripang dapat berkembang biak dengan jumlah yang besar sehingga tetap terjaga dan tidak punah. Juga, dengan cara seperti itu, sumber daya laut itu akan siap dipanen pada waktu yang telah ditentukan—jika diperlukan untuk memanennya.

Sistem pelarangan semisal itu juga banyak dikenal suku-suku lainnya di Tanah Papua. Misalnya, Suku Tepera di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, yang mengenal sistem *takayeti* atau *tiatiki*; juga Orang-orang Maya di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, yang menyebutnya *rajaba*; serta masyarakat Pulau Misol yang menamakan sistem konservasi tradisional mereka dengan nama *samsom*. Arti *samsom* dalam bahasa Matbat (Pulau Misol) adalah larangan.

Bagi masyarakat Suku Tepera di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, *tiatiki* melarang warga kampung mencari ikan pada lokasi tertentu selama beberapa bulan. Ini artinya masyarakat setempat telah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dr. Wiklif Yarisetou dalam bukunya berjudul *Tiatiki Konsep dan Praktek* menyebutkan pembagian zonasi menurut klan di Kampung Senamai, Tablanusu, Tablasupa, dan Maruway. Zonasi itu antara lain terdiri dari: *akadame*, *kia-kia*, *nau koti*, dan *beta nau*.

Akadame adalah bagian laut yang diukur mulai dari batas surut air laut sampai air pasang di kedalaman 12 meter. Saat air laut surut, wilayah itu dinamakan *akademi*, kering (*meti*). Saat itu warga mempunyai kesempatan untuk mencari ikan di padang lamun, termasuk mencari siput dan kerang-kerangan.

Kia-kia merupakan zonasi bagian laut yang berkedalaman 12–25 meter. Dasar laut masih bisa dilihat atau tampak oleh mata. Bila air laut surut, lokasi ini tak sampai kering atau *meti*.

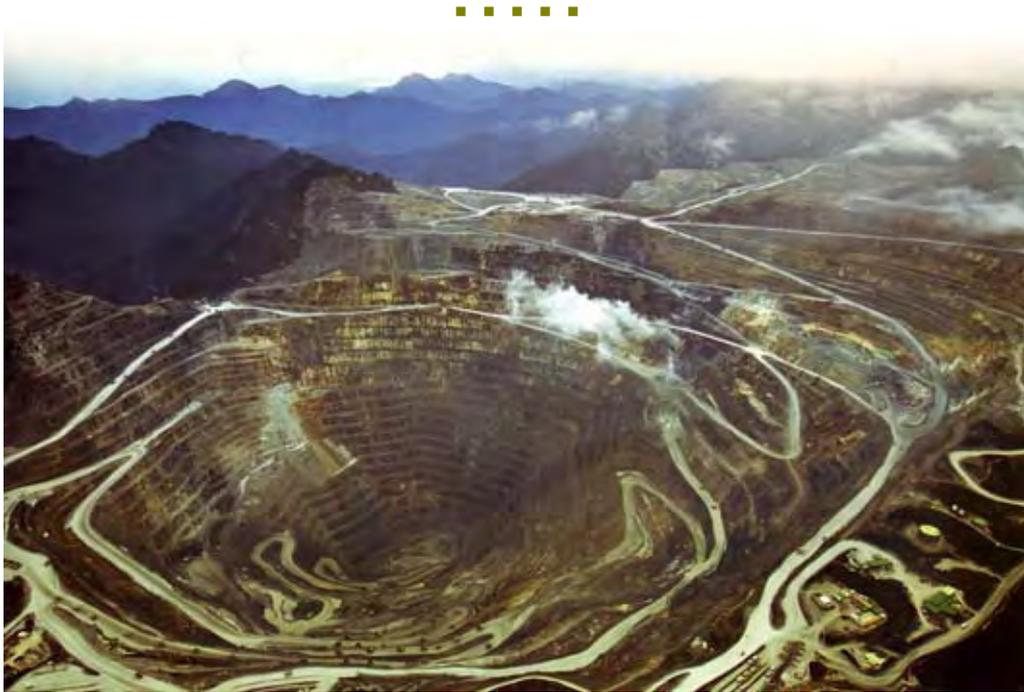
Nau koti ialah bagian laut yang kedalamannya 25–100 meter. Bagian dasar laut tidak kelihatan dan warna air sudah kebiru-biruan. Sedangkan *Beta nau* adalah bagian laut yang kedalaman lautnya 100 meter sampai ke zona laut lepas atau laut bebas di Samudera Pasifik.

Dari beberapa zonasi tersebut, wilayah-wilayah laut *akadame*, *kia-kia* dan *nau koti* termasuk dalam areal kekuasaan tanah-tanah adat. Jika ada warga lain yang menangkap ikan di lokasi tersebut dianggap melanggar adat. Wilayah laut

inilah yang menjadi pusat kegiatan *tiaitiki* karena lokasi *akadame* dan *kia-kia* merupakan tempat pemijahan, pemeliharaan, dan pertumbuhan ikan-ikan.

Lokasi ini sangat aman dari arus dan gelombang laut sehingga ikan-ikan dan biota lainnya dapat berkembang-biak.

(Kearifan Lokal, disarikan dari beberapa tulisan di Tabloid Jubi, tabloidjubi.com.)



ERTSBERG dan GRASBERG. Bagi penduduk lokal Papua, Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika khususnya, Gunung Ertsberg dan Grasberg adalah seperti ibu suci yang menghidupi mereka, memberi lahan untuk menghasilkan makanan dan air. Tanah ulayat di kedua gunung itu sekaligus tempat spiritual suku mereka. Kini kulit gunung itu dikupas untuk menyerap biji batuan induk emas dan tembaga.

Jauh sebelum kedatangan para penjelajah dari Eropa, penduduk asli Papua hanya mengambil serba sedikit dari alam. Mereka tinggal di bivak atau rumah dari kulit kayu dan pelepah daun sagu. Mereka makan dari meramu sagu, umbi, dan berburu hewan atau mencari ikan. Tak ada istilah kekurangan atau kemiskinan dalam pandangan masyarakat subsisten ini. Apa yang akan dimakan malam nanti, bisa dengan mudah dicari pada siang harinya. Hanya dengan usaha sedikit saja sudah bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Namun, segalanya berubah ketika para pendatang dari peradaban lain begitu terobsesi untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari tanah mereka, Tanah Papua. Konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam pun mulai mengemuka.

Awalnya adalah orang-orang kaya dari Amerika, Inggris, dan Belanda yang membentuk perusahaan bersama pada 1935, *NV Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij* (NNGPM). Mereka

terobsesi menemukan minyak di daerah jajahan Belanda itu, Nugini Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memberi konsesi seluas 10 juta hektare, meliputi sepertiga wilayah Papua. Inilah awal pengaplingan Tanah Papua oleh pemodal pendatang, sekaligus awal munculnya konflik sumber daya alam yang berkepanjangan.

Eksplorasi minyak bumi oleh NNGPM itu mendorong eksplorasi lebih luas. Berdasarkan temuan Jean Jacques Dozy pada 1936, mengenai sebuah gunung tembaga di jajaran puncak es abadi di Papua, Freeport mulai menanamkan modalnya di Papua, dan meneliti temuan itu lebih lanjut.

Pada 1960, Forbes Wilson yang memimpin eksplorasi Freeport menyaksikan kekayaan bijih tembaga terhampar luas di Gunung Tembaga, Papua. Keuntungan besar membayang di mata Freeport.

Tetapi, ketika Papua (Irian) bergabung ke Republik Indonesia, Presiden Soekarno yang antikapitalisme Barat menentang para pemodal pendatang itu. Namun, Freeport kembali bersuka cita ketika rezim baru, Soeharto, yang proinvestasi berkuasa. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Presiden Soeharto pascapengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), 1967.

Kontrak itu meliputi izin eksplorasi wilayah seluas 10 kilometer persegi selama 30 tahun. Kontrak itu kemudian diperpanjang lagi 30 tahun pada 1991, berikut dua kali perpanjangan 10 tahun.

Freeport berkembang cepat. Keuntungannya diperkirakan lebih dari USD 1,5 miliar per tahun. Areal pertambangan Freeport di Papua disebut-sebut mempunyai deposit tembaga terbesar ketiga di dunia, dan cadangan emas terbesar pertama sedunia. Dalam laporan resmi PT Freeport Indonesia pada 2005, sekitar 7,25 miliar kilogram tembaga dan 3,4 juta ons emas digerus dan disalurkan melalui pipa-pipa raksasa sepanjang 100 kilometer dari Grasberg, Tembaga-pura, ke Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu.

Akan tetapi, nasib penduduk asli Papua dari Suku Amungme, pemilik gunung-gunung emas dan tembaga itu, dan masyarakat Suku Kamoro yang tanahnya menampung *tailing* (limbah tambang), tak beranjak lebih baik. Malah, sejak 1973, setiap harinya 7.257 ton *tailing* dibuang ke Sungai Aikwa yang menjadi sumber penghidupan suku-suku di sekitar Timika. Tahun 1988, *tailing* yang dibuang mencapai 31.000 ton; dan tahun 2006 melonjak menjadi 223.000 ton per hari. *Per hari!* Kebun sagu Suku kamoro di wilayah Ayuka dan Koperaporka mati. Ikan juga makin sulit dicari.

Tak cuma kehilangan sumber daya alam, warga lokal pun kehilangan "diri sendiri". Suasana berubah drastis setelah penambangan dibuka. Sebagian masyarakat tradisional dengan cepat mengenal uang, minum-minuman keras, dan lokalisasi pelacuran. Berapa pun uang yang didapat masyarakat lokal dari meramu limbah penambangan Freeport—mendulang *tailing*, mencari sisa-sisa emas bekas penambangan—segera ludes-tandas dalam

semalam. Kearifan lokal merosot. Masyarakat mengalami dekadensi moral.

Kisah *meno*—"sobat", panggilan untuk orang gunung di Papua—yang mabuk-mabukan dan menghambur-hamburkan uang puluhan juta rupiah dalam semalam, sehabis menjual serbuk emas hasil mendulang *tailing*, adalah realitas sehari-hari di Timika saat ini.

"*Tailing* emas itu tak hanya merusak sungai kami, tapi juga mental masyarakat," kata Gregorius Okoare, tokoh muda Kamoro, suku asli di Timika.

Keadaan itu diperparah oleh konflik-konflik bersenjata yang sering terjadi, baik konflik antarsuku maupun konflik antara masyarakat adat dengan Freeport di sekitar areal konsesi tambang mereka.



Benturan Budaya Akibat Penistaan Kearifan Lokal

Ketika mula pertama Freeport berekspedisi, orang Amungme yang menguasai ulayat di konsesi Freeport sebenarnya sudah merasa terganggu. Pada 1967, rombongan Freeport dicegat masyarakat Lembah Waa yang dipimpin Tuarek dan Naimun Narkime. Mereka melarang Freeport menjamah Ertsberg—dalam bahasa Amungme: *Dugu-dugu*—yang menurut kepercayaan Amungme merupakan tempat peristirahatan kepala ibu (*ninggok*), tempat arwah mereka kembali setelah mati.

Benturan budaya semacam itu juga dialami banyak masyarakat Papua di berbagai tempat lain. Misalnya, masyarakat Marind-anim di Merauke. Rencana pembukaan lahan sawit 1 juta hektare oleh Pemerintah Kabupaten Merauke ditentang keras oleh masyarakat adat Marind-anim. (Lihat MIFEE: *Peluang atau Ancaman?*, hal. XX)

Orang-orang Marind-anim percaya kepada totem tertentu yang berkaitan dengan alam sekitar mereka. Sebagai contoh, marga Gebze memiliki totem kelapa. Itu berarti mereka akan menjaga kelestarian bumi, tanah, batu, dan semua hewan yang bersimbiosis dengan kelapa. Ada marga lain yang bertotem kasuari, sagu, bahkan rayap (*musamus*). Totem mereka harus dijaga, tak boleh punah, karena kepunahannya berarti runtuhnya eksistensi mereka.

"Hutan di tanah ulayat tidak boleh dirusak karena di sana tempat tinggal kasuari, totem kami," kata Amandus Yolliu Kaize, ketua adat Suku Marind-ezam di Kampung Keisa, "jika kasuari hilang, marga Kaize pun akan hilang. Kami akan lawan perusakan hutan untuk sawit di Merauke."

(Dekadensi Akibat Pendatang dan Benturan Budaya disarikan dari Ekspedisi Tanah Papua, Laporan Jurnalistik Kompas.)

3.3 Keterancaman Ekosistem

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, pada Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di Jayapura, November 2009, secara gamblang menyatakan, sejak tahun 2003 sampai 2010, hutan Papua sudah rusak 5,8 juta hektare. Sedangkan hutan yang perlu diselamatkan adalah sekitar 41,25 juta hektare. Dalam kawasan hutan yang perlu diselamatkan itu, gubernur juga memastikan disediakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya mencapai 50 ribu hektare, 50% konservasi, 30% adalah hutan konversi dan 20% sisanya hutan lindung.

Menjamurnya para investor berebut hutan di Papua adalah karena kekayaan alam yang melimpah ruah di Papua, sehingga menjadi target utama untuk dieksploitasi. Sisi positifnya, negara mendapat sumber penghasilan, tetapi sisi negatifnya adalah merusak keperawanan hutan.

Deforestasi hutan Papua pada periode 1985–1997, menurut Kementerian Kehutanan mencapai 117.523 hektare per tahun. Menurut Noak Kapisa, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua, dalam tulisannya berjudul *‘Integration of the Forest Management Unit within Sustainable Forest Management Policy in Papua’*, deforestasi hutan Papua pada tahun 2000–2001 mencapai 147.200 Ha. Sedangkan tahun 2001–2002 mencapai 160.000 Ha; tahun 2002–2003 mencapai 140.800 Ha; tahun 2003–2004 mencapai 100.800 Ha; dan tahun 2004–2005 mencapai 169.100 Ha (Baplan, 2006). Khusus untuk kawasan hutan Kabupaten Jayapura, deforestasi pada 2006 mencapai

3.256,65 Ha (BPKH X, 2007). Jadi, menurut Kapisa, total deforestasi hutan Papua dari 2000 sampai 2005 atau selama lima tahun mencapai 718.400 hektare, atau rata-rata deforestasi hutan Papua tiap tahun mencapai 143.680 hektare, atau 0.14 juta hektar per tahun.

Jika merujuk pada deforestasi hutan Indonesia yang setiap tahun mencapai rata-rata 1.089.560 hektare, itu berarti deforestasi hutan Papua menduduki peringkat keempat (13.19 %) setelah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Baplan Kehutanan, 2006). Ini berarti hutan Papua masih relatif dalam kondisi baik; namun sebaliknya deforestasi dan degradasi hutan Papua berdampak terjadinya lahan kritis seluas 3.368.893 Ha pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 6.459.954,29 Ha pada tahun 2006 (Ditjen RLPS, 2006).

Menurut Kapisa, ada tiga penyebab deforestasi di Papua. *Pertama*, deforestasi yang terencana karena kebutuhan pembangunan, antara lain alih fungsi hutan untuk petanian dan perkebunan, transmigrasi, permukiman (pertambahan penduduk), pemekaran wilayah pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur jalan. *Kedua*, deforestasi yang tidak terencana karena perbuatan manusia, antara lain praktik-praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, *illegal logging*, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Dan *ketiga* adalah deforestasi akibat bencana alam, antara lain tsunami, kebakaran hutan, serta cuaca ekstrim (tanah longsor, banjir, badai).

Perkara pelik lainnya adalah keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik masyarakat adat. Tetapi faktanya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan hanya bertindak sebagai penonton saja. Menurut Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP), Leo Imbiri, belum ada mekanisme yang pasti soal peran dan untung rugi bagi masyarakat pemilik hutan.

Memang harus diakui pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat masih bersifat setengah hati, di mana posisi tawar mereka masih lemah. Namun dengan Perdasus No. 21/2008 bisa menjadi salah satu jalan guna mendukung posisi tawar dalam memberikan keputusan pemanfaatan SDA.



MIFEE: Peluang atau Ancaman?

Dengan luas wilayah 45.075 Km², Kabupaten Merauke menyimpan segudang potensi untuk agribisnis. Beragam komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikembangkan di sana. Jenis tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan sorgum. Ragam hortikultura yang telah diuji coba dan berkembang baik mencakup bawang merah, cabai, kubis, rambutan, dan jeruk besar. Sedangkan komoditas unggulan dari sektor perkebunan antara lain kelapa, kelapa sawit, kapas, tebu, karet, dan jambu mete. Selain itu, Merauke kaya dengan hasil kayu dan hasil hutan ikutan.

Lahan yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan di Merauke terhampar seluas 2,5 juta Ha. Dari jumlah itu, lahan yang bisa dijadikan sawah sekitar 1,94 juta Ha, dengan potensi terluas berada di Distrik Kimaam (1,1 juta Ha). Maka, tak berlebihan bila Merauke diharapkan menjadi lumbung pangan nasional maupun dunia. Karenanya, Pemerintah Daerah Merauke meluncurkan Program MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) pada 12 Februari 2010m, saat Kabupaten Merauke berulang tahun.

Program MIFEE mencakup pengembangan pertanian seluas ribuan hektare, demi menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional dan daerah mandiri pangan. Dalam konsep MIFEE, Merauke menjadi lahan garapan korporasi yang juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektare dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200 ribu Ha, terdiri dari 40 subkluster. Lahan basah yang bisa dikelola masih tersedia 1,9 juta Ha.

Departemen Kehutanan juga mengalokasikan 585 ribu Ha untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya padi. Status lahan tersebut nantinya disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha.

Pengembangan kawasan pangan dalam skala luas, atau "food estate" di Merauke, diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun. Jumlah yang fantastis. Tapi Pemda Merauke telah mendapat komitmen dari beberapa perusahaan untuk membangun pertanian di sana, antara lain dari Artha Graha, Bangun Tjipta, Comexindo International, Medco Group, Digul Agro Lestari, dan Klinik Agropolitan Gorontalo. Sejumlah perusahaan itu kini sudah memulai aktivitas di lapangan.

Selain keenam investor dalam negeri tersebut, masih ada 28 investor asing yang berniat menanamkan modal untuk pengembangan lahan padi, tebu, kedelai, dan lain-lain. Mereka dari Timur Tengah, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, dan Eropa.

Pemerintah juga menyiapkan kawasan "food estate" Merauke sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Langkah ini akan mempermudah pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dalam jangka panjang.

Namun, rencana muluk itu mendapat tentangan keras dari berbagai pihak. Salah satu sebabnya, proyek mahabesar itu disinyalir hanya akan semakin meminggirkan masyarakat adat Papua. "Suku Marind di Merauke akan terpinggirkan dan tak lagi memiliki tanah, karena semuanya akan dijadikan milik negara," kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind-anim, Albert Gebze Mouyend.

Pelaksanaan MIFEE dianggap bukan solusi mengatasi kerentanan pangan di Papua. Program ini justru semakin membatasi warga untuk mengelola lahan pertanian lokal berbasis komunitas.

Menurut perhitungan salah satu penentangannya, sedikitnya 4 juta orang akan didatangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE. Ini artinya akan ada penambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta suami/istri buruh-tani + 8 juta anak buruh-tani (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta orang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang, atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabupaten Merauke (Papua dan non-Papua), dapat dipastikan bahwa masyarakat pribumi akan "spontan musnah".

Lagi-lagi, pembangunan mengabaikan—kalau bukan menista—kearifan lokal.

Tak Perlu Menebang Hutan, Cukup dengan Kekayaan Tambang dan Gas

Papua adalah satu di antara sedikit tempat di dunia yang budaya tradisional dan hutan tropisnya relatif masih utuh. Namun beberapa kawasan hutan pentingnya sudah hilang, dan status "alam liar" Papua memang terancam.

Argumen standar pembangunan yang mengesahkan penebangan dan alih fungsi hutan Papua itu adalah demi pendapatan pemerintah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan bagi masyarakat. Karenanya, mungkin sekali penebangan dan alih fungsi hutan masih akan terus berlanjut, meski sebenarnya pertumbuhan ekonomi Papua bisa ditingkatkan dan upaya pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan hanya memanfaatkan kekayaan kandungan bahan tambang dan gas Papua saja, tanpa perlu menebang dan mengalihfungsikan hutan yang tersisa.

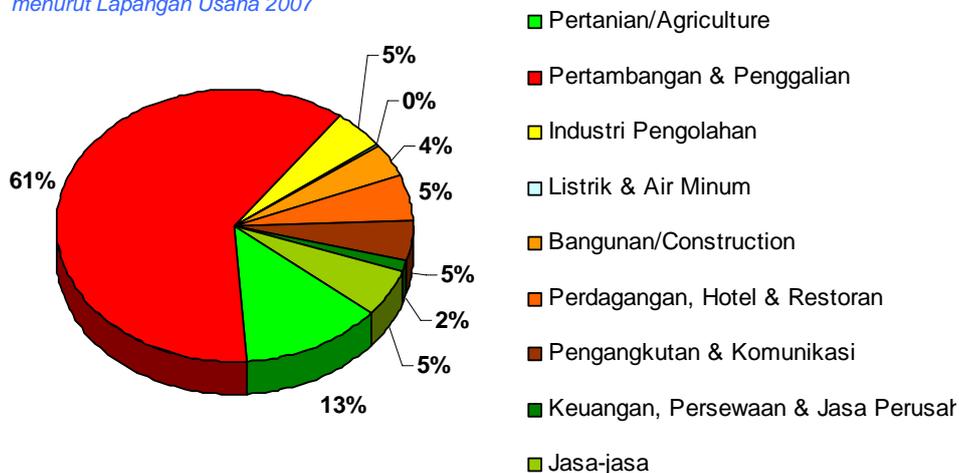
Ekstraksi sumber daya alam sangat memengaruhi ekonomi Papua. Sekitar 75% GDP Papua berasal dari hasil tambang, yang 60%-nya didapat dari Grasberg (dioperasikan oleh Freeport McMoran

Copper and Gold, Inc.) Juga terdapat proyek gas alam BP Tangguh dengan cadangan 14.4 triliun kaki kubik. Proyek ini akan menghasilkan 7 juta ton gas alam cair per tahun (Kedutaan Amerika, Jakarta 2005).

Ekstraksi berbagai sumber daya alam Papua menciptakan keuntungan ekonomi yang mencengangkan—bagai mendapat durian runtuh. Pertumbuhan GDP Papua meningkat rata-rata 10% sejak 1991, kira-kira dua kali lipat pertumbuhan nasional. Rerata GDP per kapita pada 2002 sekitar USD 1,000, menjadikan Papua di atas kertas sebagai provinsi terkaya keempat di Indonesia.

Tetapi, angka itu menyimpan kesenjangan besar. Sementara GDP per orang di Mimika (kabupaten tempat tambang Grasberg berada) berkisar USD 9,000, GDP per orang di Jayawijaya (kabupaten yang terpadat penduduknya) hanya sejumlah kurang dari USD 60. Belum lagi, secara keseluruhan, lebih dari 40% orang Papua hidup dengan penghasilan kurang dari USD 1 sehari (Mollet 2001).

PDRB Provinsi Papua dan Papua Barat atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2007



Apakah tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan hutan Papua? Becermin kepada pengalaman daerah-daerah lain di dunia yang juga kaya energi dan mineral, hal itu sangat dimungkinkan—meski banyak faktor yang berperan dalam keberhasilannya, termasuk menghindari rencana investasi infrastruktur skala besar yang memaksa dilakukannya pembukaan kawasan hutan yang tersisa (Wunder 2003).

Dampak ekonomi sektor sumber daya alam sangat luas, saling terhubung dengan sektor lain, dan kompleks, membentuk keseluruhan bangunan ekonomi yang ada, terutama di tempat yang kaya sumber daya alam seperti Papua. Salah satu wujud keterhubungan sektor sumber daya alam dengan lainnya adalah dalam hal pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah bersifat tergantikan (*fungible*). Pendapatan itu dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan berbagai sektor yang berbeda-beda, tak peduli dari sektor mana

pendapatan itu dihasilkan. Lonjakan tinggi pendapatan dari satu sektor—dalam hal ini sektor pertambangan dan energi—akan mengurangi keperluan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain. Maka, melimpahnya pendapatan dari sumber daya pertambangan dan energi Papua sudah semestinya mampu mengurangi kebutuhan untuk menebang dan atau mengalihfungsikan hutan.

Bagaimanapun, kepentingan nasional Indonesia akan mendorong ekstraksi sumber daya alam lebih banyak lagi, karena kebutuhan ekonomi pada skala nasional lebih besar. Meski demikian, dengan ditingkatkannya bagian pendapatan Pemerintah Papua dari hasil ekstraksi, dan diperkuatnya hak pendapat untuk menentukan keputusan tentang bagaimana industri ekstraksi itu akan dijalankan, kekayaan mineral (tambang dan gas) Papua semestinya mampu menekan kebutuhan untuk melanjutkan praktik-praktik penebangan hutan dan deforestasi.



3.4 Upaya Konservasi Papua



Kebijakan terhadap hutan Papua, atau yang dikenal dengan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sejak September 2007 telah disusun dalam sebuah moratorium bersama antara Gubernur Papua Barnabas Suebu SH dan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi. Untuk melindungi hutan Papua yang luasnya 42.224.840 hektare, kata Gubernur Barnabas Suebu, ia bersama Gubernur Papua Barat telah menandatangani suatu kebijakan.

Kebijakan yang disusunnya itu dituangkan dalam Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi

Papua Barat bernomor 163 Tahun 2007 dan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Peredaran Hasil Hutan.

Luas hutan Tanah Papua yang mencapai 42.224.840 hektare menutupi 95% total lahan yang ada. Dari luas itu, 48% untuk hutan lindung dan konservasi, 30% untuk hutan produksi dan 22% untuk hutan konversi.

Gubernur Barnabas Suebu menegaskan, pada masa lalu, tidak hanya di Papua, tetapi juga provinsi lain telah terjadi kesalahan yang dibuat bangsa dan pemerintah. Kenyataan menunjukkan hutan tropis

hancur, namun tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, terlebih bagi rakyat Papua.

Masalah utama lain yang sangat mencolok adalah hutan sebagai penyumbang pendapatan nomor dua terbesar tetapi lebih dari 80% keluarga Papua hidup dalam kemiskinan. Selain itu adalah pembalakan ilegal dan konflik kewenangan/regulasi atas masalah pengelolaan hutan. "Hutan kaya tetapi rakyat miskin," kata Gubernur.

Melihat kenyataan itu, Gubernur Suebu sangat prihatin dan mencoba menyusun suatu kebijakan yang telah ditandatangani itu bersama Gubernur Papua Barat. Ia pun menyebutkan prinsip-prinsip kebijakan baru untuk hutan Papua:

Pertama, pelarangan total ekspor kayu log dari Papua, baik keluar negeri maupun antarpulau, karena hal itu merupakan proses pembodohan dan pemiskinan bagi rakyat Papua.

Kedua, perlu dilakukan percepatan pengembangan industri kayu rumah tangga dan pembalakan hutan oleh masyarakat (*community logging*). Artinya, setiap perusahaan yang masuk ke Papua harus membangun industrinya di Papua, sehingga kayu yang dikirim keluar Papua adalah kayu yang sudah diolah, bukan log.

Ketiga, penanganan konflik melalui pengaturan akses masyarakat kepada hutan melalui Perdasus. Untuk hal tersebut, hak kepemilikan hutan dikembalikan kepada rakyat. Menurut Gubernur, hutan Papua bukan milik negara tetapi milik rakyat.

Keempat, izin-izin HPH aktif maupun nonaktif akan dicabut kecuali perusahaan tersebut membangun industrinya di Papua.

Kelima, penegakan hukum melalui aparat yang jumlah dan kualitasnya memadai, baik polisi juga polisi kehutanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Keenam, seluruh hutan di Papua didedikasikan untuk menyelamatkan planet bumi dan masa depan kemanusiaan, termasuk melalui pengembangan industri bahan bakar bio (*green energy*) secara hati-hati.

Tanah Papua memiliki kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam berstatus cagar alam, seperti Pegunungan Waylan, Kumbe, Pegunungan Cycloops, Pombo, dan Enarotali; kawasan suaka margasatwa, antara lain: Mamberamo Foja, Pulau Dolok, Danau Bian, dan Pegunungan Jayawijaya; serta kawasan pelestarian alam, seperti Taman Nasional Lorenz, Taman Nasional Wasur, Teluk Youtefa, Taman Wista Alam Nabire, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih.





Taman Nasional Lorentz

Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah satu di antara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Kawasannya membentang dari puncak gunung yang diselimuti salju (5.030 mdpl), hingga membujur ke perairan pesisir pantai dengan hutan bakau dan batas tepi perairan Laut Arafura. Dalam bentangan ini, terdapat spektrum ekologis menajukjubkan dari kawasan vegetasi alpin, sub-alpin, montana, sub-montana, dataran rendah, dan lahan basah.

Selain memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terdapat pula beberapa kekhasan dan keunikan adanya gletser di Puncak Jaya dan sungai yang menghilang beberapa kilometer ke dalam tanah di Lembah Balliem.

Taman nasional ini memiliki lebih kurang 34 tipe vegetasi, di antaranya hutan rawa, hutan tepi sungai, hutan sagu, hutan gambut, pantai pasir karang, hutan hujan lahan datar/lereng, hutan hujan pada bukit, hutan kerangas, hutan pegunungan, padang rumput, dan lumut kerak.

Jenis-jenis tumbuhan di taman nasional ini antara lain nipah (*Nyssa fruticans*), bakau (*Rhizophora apiculata*), *Pandanus julianettii*, *Colocasia esculenta*, *Avicennia marina*, *Podocarpus pilgeri*, dan *Nauclea coadunata*.

Jenis-jenis satwa yang sudah diidentifikasi di Taman Nasional Lorentz di antaranya sebanyak 630 jenis burung ($\pm 70\%$ dari burung yang ada di Papua) dan 123 jenis mamalia. Jenis burung yang menjadi ciri khas taman nasional ini adalah 2 jenis kasuari, 4 megapoda, 31 jenis dara/merpati, 30 jenis kakatua, 13 jenis burung udang, 29 jenis burung madu, dan 20 jenis burung endemik, di antaranya cendrawasih ekor panjang (*Paradigalla carunculata*) dan puyuh salju (*Anurophasis monorthonyx*).

Satwa mamalia tercatat antara lain babi duri moncong panjang (*Zaglossus bruijnii*), babi duri moncong pendek (*Tachyglossus aculeatus*), 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon.

Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO dan Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN.

Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan

ditunjang keanekaragaman budaya yang mengagumkan. Diperkirakan kebudayaan tersebut berumur 30.000 tahun dan merupakan tempat kediaman suku Nduga, Dani Barat, Amungme, Sempan, dan Asmat.

Kemungkinan masih ada lagi masyarakat yang hidup terpencil di hutan belantara ini yang belum mengadakan hubungan dengan manusia modern.

Suku Asmat terkenal dengan keterampilan pahatan patungnya. Menurut kepercayaannya, suku tersebut identik dengan hutan atau pohon. Batang pohon dilambangkan sebagai tubuh manusia, dahan-dahannya sebagai lengan, dan buahnya sebagai kepala manusia. Pohon dianggap sebagai tempat hidup para arwah nenek moyang mereka. Sistem masyarakat Asmat yang menghormati pohon, ternyata berlaku juga untuk sungai, gunung, dan lain-lain.

Lorentz ditunjuk sebagai taman nasional pada tahun 1997, sehingga fasilitas/sarana untuk kemudahan pengunjung masih sangat terbatas, dan belum semua obyek serta daya tarik wisata alam di taman nasional ini diidentifikasi serta dikembangkan.



Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove, dan hutan tropika daratan pulau di Papua. Ia merupakan taman nasional perairan laut

terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%).

Potensi karang Taman Nasional Teluk Cendrawasih tercatat 150 jenis dari 15 famili, dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentase penutupan karang hidup bervariasi antara 30%–40% sampai dengan 64%–65%. Umumnya, ekosistem terumbu karang terbagi menjadi dua zona, yaitu zona rata terumbu (*reef flat*) dan zona lereng terumbu (*reef slope*). Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni karang biru (*Heliopora coerulea*), karang hitam (*Antiphatia* sp.), famili *Faviidae* dan *Pectiniidae*, serta berbagai jenis karang lunak.

Taman Nasional Teluk Cendrawasih terkenal kaya akan jenis ikan. Tercatat kurang lebih 209 jenis ikan menghuni kawasan ini, di antaranya *butterflyfish*, *angelfish*, *damsel fish*, *parrotfish*, *rabbitfish*, dan *anemonefish*.

Jenis moluska antara lain keong *cowries* (*Cypraea* sp.), keong strombidae (*Lambis* sp.), keong kerucut (*Conus* sp.), triton terompet (*Charonia tritonis*), dan kima raksasa (*Tridacna gigas*).

Terdapat empat jenis penyu yang sering mendarat di taman nasional ini, yaitu penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Duyung (*Dugong dugon*), paus biru (*Balaenoptera musculus*),

ketam kelapa (*Birgus latro*), lumba-lumba, dan hiu sering terlihat di perairan Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Terdapat goa alam yang merupakan peninggalan zaman purba, sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam di Pulau Misowaar, goa dalam air dengan kedalaman 30,5 meter di Tanjung Mangguar. Sejumlah peninggalan dari abad 18 masih bisa dijumpai pada beberapa tempat seperti di Wendesi, Wasior, dan Yomber. Umat Kristiani banyak yang berkunjung ke gereja di desa Yende (Pulau Roon), hanya untuk melihat kitab suci terbitan tahun 1898.

Beberapa lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, antara lain Pulau Rumberpon (pengamatan burung, penangkaran rusa, wisata bahari, menyelam, dan *snorkeling*, kerangka pesawat tempur Jepang yang jatuh di laut); Pulau Nusrowi (menyelam dan *snorkeling*, wisata bahari, pengamatan satwa); Pulau Mioswaar (sumber air panas, air terjun, menyelam dan *snorkeling*, pengamatan satwa dan wisata budaya); Pulau Yoop dan perairan Windesi (pengamatan ikan paus dan lumba-lumba); serta Pulau Roon (pengamatan burung, menyelam dan *snorkeling*, air terjun, wisata budaya, dan gereja tua).



Taman Nasional Wasur

Taman Nasional Wasur merupakan perwakilan dari lahan basah yang paling

luas di Papua dan masih sedikit mengalami gangguan aktivitas manusia. Sekitar 70%

luasnya berupa vegetasi savana, sedang lainnya berupa vegetasi hutan rawa, hutan musim, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput, dan hutan rawa sagu yang cukup luas. Jenis tumbuhan yang mendominasi hutan di kawasan taman nasional ini antara lain api-api (*Avicennia sp.*), tancang (*Bruguiera sp.*), ketapang (*Terminalia sp.*), dan kayu putih (*Melaleuca sp.*)

Jenis satwa yang umum dijumpai antara lain kanguru pohon (*Dendrolagus spadix*), kesturi raja (*Psittrichus fulgidus*), kasuari gelambir (*Casuarius casuarius sclateri*), dara mahkota/mambruk (*Goura cristata*), cendrawasih kuning besar (*Paradisea apoda novaeguineae*), cendrawasih raja (*Cicinnurus regius rex*), cendrawasih merah (*Paradisea rubra*), buaya air tawar (*Crocodylus novaeguineae*), dan buaya air asin (*C. porosus*).

Karena keanekaragaman hayatinya yang bernilai tinggi dan, kawasan Taman Nasional Wasur ini dikenal sebagai “Serengiti Papua”.

Lahan basah di taman nasional ini merupakan ekosistem yang paling produktif dalam menyediakan bahan pakan dan perlindungan bagi kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Berbagai jenis satwa seperti burung migran, walabi, dan kasuari sering datang dan menghuni Danau Rawa Biru. Oleh karena itu, Danau Rawa Biru disebut “Tanah Air” karena ramainya berbagai kehidupan satwa. Lokasi ini sangat cocok untuk mengamati atraksi satwa yang menarik dan menakjubkan.

Beberapa lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, antara lain: Danau Rawa Biru, Ukra, Maar, Kakania, Dikbob, Rawa Panjang, Pilmul (pengamatan satwa, danau, menyusuri sungai, berkuda, dan wisata budaya); serta Yanggandur, Soa, Ukra, Onggaya (savana, pengamatan satwa, menyusuri sungai, memancing, dan wisata budaya).



4

Pendanaan Papua

4.1 Upaya Pendanaan Berkelanjutan

A. Yayasan Dana Konservasi Papua *Papua Conservation Fund (PC Fund)*

Yayasan Dana Konservasi Papua didirikan pada 2001 oleh LSM lokal dan internasional, lembaga pemerintah, individu, lembaga penelitian dan sejumlah donor. Yayasan yang lebih dikenal dengan PC-Fund (*Papua Conservation Fund*) ini mengelola *trustfund* (dana abadi) guna memajukan kegiatan pelestarian di Tanah Papua. Berawal dari sebuah Lokakarya Penetapan Prioritas Penting Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Papua pada tahun 1997, yang menyimpulkan bahwa kurangnya pendanaan menjadi salah satu tantangan dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati.

Tujuan PC-Fund adalah menggalang dana yang memadai yang akan dikelola sebagai dana abadi, yang akan memberikan bunga yang memadai dan dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan konservasi di Tanah Papua. Segala kontribusi akan diteruskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dengan bantuan dan dukungan kemitraan.

Misi PC-Fund adalah melindungi keanekaragaman hayati di Tanah Papua melalui penyediaan dana kepada LSM lokal di Papua, lembaga penelitian, dan kemitraan antara LSM lokal maupun internasional. Secara khusus, PC-Fund mendukung upaya konservasi alam melalui kegiatan-kegiatan:

- Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk perbaikan pengelolaan kawasan yang dilindungi, pengembangan proyek-proyek konservasi berbasis masyarakat dan keterpaduan program konservasi dan pembangunan.
- Pemberdayaan organisasi-organisasi masyarakat dan penguatan LSM melalui pelatihan dan pemberian beasiswa; berbagai pelatihan dan lokakarya untuk memperbaiki pola-pola pengelolaan, perencanaan dan program yang menunjang kegiatan konservasi ini; dan penyediaan beasiswa.
- Perbaikan mutu kegiatan-kegiatan konservasi dan gerakan konservasi di tingkat provinsi, terutama dalam perencanaan dan penetapan prioritas kegiatan konservasi, pelaksanaan proyek lapangan dan pengelolaan kelembagaan.
- Pemberdayaan lembaga lokal seperti kelompok-kelompok tradisional/masyarakat adat, termasuk kegiatan-kegiatan penjangkauan dan mobilisasi masyarakat serta pengorganisasian sumber daya dan pengelolaan lingkungan.

- Meningkatkan kesadaran-tahuan akan konservasi antar para pihak yang aktif dalam bidang kehutanan, penguatan usaha-usaha berbasis masyarakat, dan pengembangan ekonomi untuk konservasi jangka panjang dengan cara melakukan usaha-usaha penghijauan, pengembangan pasar, penciptaan iklim investasi yang memihak pada masyarakat dan lingkungan, dan
- Penguatan komunitas berbasis pembangunan ekonomi dalam konservasi jangka panjang.

PC-Fund dikelola oleh satu badan independen, nirlaba, dan dipilih oleh Dewan Pembina (*Board of Directors*) serta Badan Pengawas. *Board Meeting* merupakan keputusan tertinggi dalam mekanisme kerja PC-Fund. Laporan keuangan beserta garis besar kegiatan dan status keuangan diterbitkan setiap tahun. Sejak pendiriannya, PC-Fund telah menyelenggarakan sejumlah pelatihan

pengelolaan keuangan dan strategi pengembangan program untuk beberapa LSM lokal di Tanah Papua, serta telah memberi dukungan dana (*grant*) untuk kegiatan-kegiatan konservasi, penelitian lapangan tentang keanekaragaman hayati, publikasi sejumlah buku lingkungan dan keanekaragaman hayati, termasuk publikasi buku Ekologi Papua.

Sepanjang 2004–2006, PC-Fund telah menyalurkan dana bantuan bagi 11 LSM lokal untuk melaksanakan proyek-proyek konservasi serta mendukung penelitian mahasiswa tentang keanekaragaman hayati dan konservasi di Tanah Papua.

Kriteria utama pemilihan proposal (permohonan dana) yaitu:

- Dukungan aktivitas yang diajukan terhadap visi dan misi PC-Fund;
- Kelayakan proposal; dan
- Anggaran dana (budget)



Donor PCF selama periode 2004 – 2006

DONOR	NILAI DONASI	
British Petroleum (BP)	USD	100,000
Interchurch Organization for development Cooperation (ICCO)	USD	26,993
Conservation International (CI)	USD	111,259

Posisi Asset PCF

POSISI PER	TOTAL
Oktober 2004	Rp 37.568.356
Desember 2005	Rp 2.512.572
	US 91,896
Desember 2006	Rp 2.409.010
	US 92,077

Komposisi Pendanaan Periode 2004–2006

URAIAN	NILAI (Rp)
A. Hibah (<i>Grant</i>)	
a. Tahap I (2004–2005)	544.062.000
b. Tahap II (2006)	420.142.650
TOTAL	964.204.650
B. Pelatihan dan Operasional	
a. Tahun 2004	189.446.740
b. Tahun 2005	251.661.536
c. Tahun 2006	327.298.083
TOTAL	768.406.359
GRAND TOTAL	1.732.611.009

Tata Cara Penyaluran Dana Hibah

- *Call for proposal*
- Review proposal, penilaian atas relevansi proposal dengan tujuan PCF (kelayakan, kerangka logis, dan anggaran) dengan hasil keputusan tolak/terima
- Persiapan dan penandatanganan kontrak
- Transfer dana hibah (3 tahap: 50%, 30%, dan 20%)
- Pelaporan (*progress & final report*)

Daftar Penerima Hibah 2004–2006

2004
1. Yayasan ALMAMATER, Merauke
2. Yayasan Rumsram, Biak
3. Pt. PPMA Papua, Jayapura
4. YAPPEMBRA, Jayapura
5. YALI, Jayapura
6. Br. Henk van Mastrigt and student from Cendrawasih University
7. Br. Henk van Mastrigt and Eddy Rosdiyanto
8. Literatures research and collection in Jakarta and in Manokwari
2005
1. Br. Henk van Mastrigt and student from Cendrawasih University
2. Br. Henk van Mastrigt and Eddy Rosdiyanto
3. Literatures research and collection in Jakarta and in Manokwari
4. Grant to support biodiversity and conservation related projects implemented by Papua-based NGOs

2006
1. YALI, Jayapura
2. Forkam PSDA Papua
3. Yayasan Rumsram, Biak
4. Yalhimo, Manokwari
5. Yayasan Triton, Sorong
6. Yayasan Konpers, Sorong
7. Student field researches from Papua State University, Manokwari and Cenderawasih State University

Sejak tahun 2008, PCF tidak lagi beroperasi, terutama disebabkan oleh kebuntuan pendanaan. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakberhasilan strategi

penggalangan dana serta minimnya dukungan *Board* (Dewan Pembina) dalam upaya-upaya penggalangan dana dan dukungan tersebut.



B. Yayasan Pendukung Penguatan Masyarakat Sipil Papua Papua Civil Society Support Foundation (PCSSF)

Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi terbitnya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk memperjuangkan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak dasarnya, dan mewujudkan kesejahteraannya.

Implementasi UU ini berlangsung sangat lambat dan tersendat-sendat karena berbagai intervensi kepentingan dari dalam dan luar Papua, sedangkan organisasi masyarakat sipil sendiri masih sangat terbatas kapasitasnya, meski memiliki posisi dan peran yang strategis dalam upaya tersebut di atas.

PCSSF didirikan untuk memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil (LSM dan OR) sehingga mampu mempersiapkan masyarakat Papua untuk merumuskan kondisi baru yang

diharapkan, dan mampu mengelola peluang yang tersedia di bawah kerangka otonomi khusus Papua. PCSSF merupakan lembaga pengelola dana hibah pertama dan satu-satunya yang diprakarsai dan dikelola oleh masyarakat sipil Papua.

Proses pendirian PCSSF digagas sejak akhir tahun 1990-an. Tahun 2001, gagasan ini dikonseptualisasikan dan mulai didiskusikan dengan berbagai pihak, seperti: Remdec Jakarta, Yayasan Kemala, MFP-DFID, dan berbagai lembaga *funding* di luar negeri. Pada 2004, akte notaris PCSSF disusun dengan status hukum Perkumpulan. Mulai 2005, PCSSF mendapat dukungan awal dari Yayasan Kemala, MFP-DFID dan Yayasan PKM.

Pada Maret–Mei 2006, serangkaian konsultasi di 6 region—Paruh Burung,

Kepala Burung, Teluk Cendrawasih, Pegunungan Tengah, Jayapura dan sekitarnya, Pantai Selatan— diselenggarakan. Puncaknya adalah pada 29–31 Mei 2006 saat diselenggarakannya Perencanaan Strategis PCSSF/Musyawarah I PCSSF. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 2 Juni 2006. PCSSF terbentuk atas inisiatif dan dukungan penuh dari berbagai pihak, antara lain organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, masyarakat adat, pengusaha, donor internasional, dll. Tercatat sekitar 100 organisasi dalam berbagai bentuk yang berasal dari 6 region (wilayah) di Papua terlibat dalam pembentukan PCSSF.

Visi

PCSSF adalah lembaga pendukung bagi organisasi dan gerakan masyarakat sipil Papua yang bekerja menyelamatkan tanah

dan sumberdaya alam Papua untuk kesejahteraan dan peradaban orang Papua.

Misi

- Menggalang, mengelola dan menyalurkan dana bagi LSM dan OR (masyarakat adat, perempuan, agama) untuk kerja-kerja advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat Papua
- Memberikan dukungan dana untuk upaya-upaya perlindungan hak-hak tanah dan pengelolaan SDA bagi kesejahteraan masyarakat.
- Memberikan dukungan dana untuk meningkatkan kapasitas LSM dan OR di Papua.
- Memberikan dukungan dana untuk memperkuat LSM dan OR dalam pemberian layanan informasi kepada masyarakat Papua.

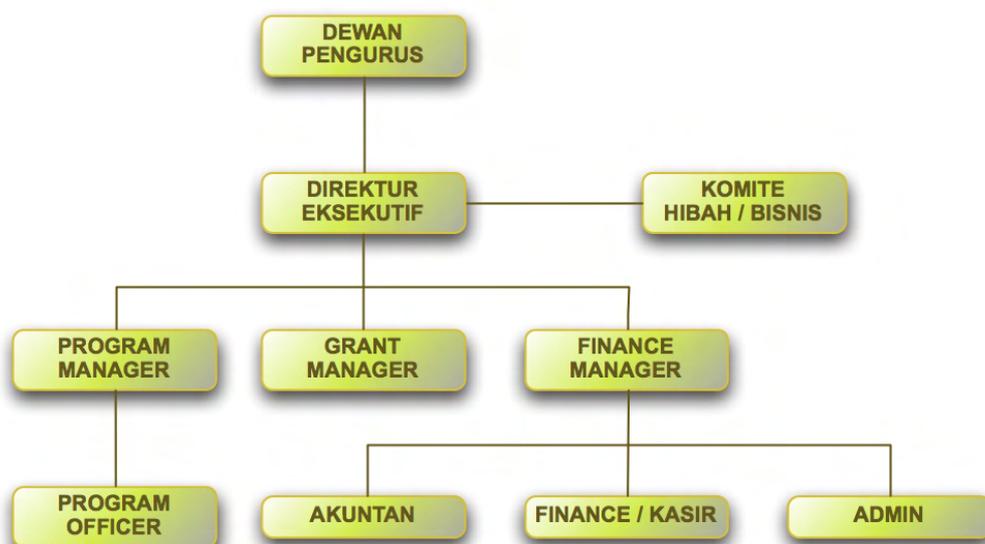


Program Utama yang Didukung PCSSF

- Pemberdayaan masyarakat adat dan perempuan melalui organisasi-organisasi rakyat agar mampu mengelola kekayaannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
- Dukungan melalui layanan penguatan akses pada informasi untuk mendukung advokasi
- Advokasi kebijakan dan hukum yang terkait dengan implementasi UU Otonomi Khusus Papua
- Proteksi terhadap hak-hak dasar Orang Papua
- Proteksi terhadap kelestarian lingkungan dan keaneka ragaman hayati

Struktur Organisasi

Bentuk dan badan hukum organisasi adalah Yayasan. Forum konsultasi organisasi: Musyawarah PCSSF.



Prioritas Kegiatan Kerja

Dalam pemberian dana hibah, PCSSF lebih memprioritaskan kegiatan:

1. Pemetaan tata guna lahan partisipatif
2. Pengembangan ekonomi skala kecil dan menengah
3. Advokasi kebijakan dan hukum
4. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan tingkat deforestasi
5. Penanganan HIV/AIDS pada masyarakat kampung/pedalaman
6. Perluasan akses pada informasi



Prioritas Kelompok Sasaran

Kriteria kelompok yang memiliki peluang untuk bermitra dengan PCSSF adalah:

1. Kelompok swadaya masyarakat dan organisasi rakyat yang sedang menghadapi tantangan yang terkait dengan ruang lingkup/prioritas kerja/kegiatan PCSSF.
2. Memiliki badan hukum dan mekanisme pengelolaan institusi/kelembagaan yang bertanggung gugat. Bagi kelompok rakyat yang tidak berbadan hukum dapat berasosiasi dengan lembaga yang berbadan hukum.

3. Dapat menunjukkan rencana keberlanjutan setelah dukungan proyek berakhir.
 4. Membuktikan atau memiliki hubungan dan kerja sama yang baik dengan masyarakat.
 5. Organisasi calon penerima dukungan terbukti tidak mendukung partai politik tertentu.
 6. Memiliki integritas yang tinggi mengelola kegiatan.
 7. Adanya kesediaan untuk berbagi sumber daya, risiko, beban, wewenang, dan pengambilan keputusan.
 8. Kemitraan tidak memiliki konflik kepentingan.
- Catatan:
- PCSSF tidak memberikan fasilitas atau dukungan kepada organisasi pemerintah dan politik.
 - PCSSF tidak mendukung lebih dari 1 inisiatif oleh 1 organisasi pada waktu yang bersamaan.



Kriteria Kelayakan Inisiatif Mitra

1. Adanya keterlibatan kelompok perempuan dari awal hingga akhir kegiatan.
2. Indikator kemampuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam berskala kecil dan menengah secara kolaboratif dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
3. Perdagangan yang adil. Mempromosikan inisiatif yang membuka akses pada pasar dan menjamin transaksi yang menguntungkan komunitas pengelola sumber daya alam.
4. Memiliki kegiatan yang konkret dan pencapaian yang terukur.
5. Replikasi dan perluasan kebijakan berkaitan dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di berbagai tingkatan (distrik, kabupaten, dan provinsi).
6. Inisiatif praktik pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
7. Inisiatif penguatan terhadap pencapaian target dan pemanfaatan dalam pengembangan komunitas pengguna sumber daya.
8. Inisiatif yang inovatif untuk membuat perubahan yang kongkrit terhadap akar permasalahan.



Dana Pendampingan yang Ditawarkan

PCSSF dalam mendukung kegiatan/program kerja lembaga pengusul menawarkan dana hibah berdasarkan bidang kegiatan dan batasan besaran dana hibah sebagai berikut:

1. **Dana Program < US\$ 20,000.** Dana Program ini ditawarkan oleh PCSSF untuk mendukung pelaksanaan program maupun penguatan kapasitas organisasi maksimal US\$ 20,000.

2. **Dana untuk Perencanaan Program < US\$ 5,000.** Dana untuk perencanaan program ini ditawarkan oleh PCSSF dalam mendukung kegiatan-kegiatan awal perencanaan program, maksimal US\$ 5,000.
3. **Dana Perjalanan < US\$ 5,000.** PCSSF menawarkan dana perjalanan dalam rangka berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan baik didalam maupun diluar Papua, maksimal US\$ 5,000.
4. **Dana untuk Situasi Darurat < US\$ 2,500.** PCSSF juga menyediakan dukungan dana untuk keadaan darurat yang mengakibatkan korban seperti; bencana alam, konflik dan kekerasan, maksimal US\$ 2,500.



Seleksi Proposal

Persetujuan proposal kegiatan yang diajukan kepada PCSSF harus melalui tahap penelaahan proposal PCSSF mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menetapkan tata cara penelaahan proposal dan penetapan pihak-pihak lain yang independent dalam proses penelaahan proposal. Tata Cara penelaahan proposal dilakukan secara bertingkat sesuai dengan kepentingan penelaahan yaitu untuk kepentingan kelengkapan administrasi dan kepentingan substansi.

PCSSF membuka kesempatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Rakyat Lokal Papua untuk memasukkan proposal yang berisi program yang berhubungan dengan prioritas kegiatan PCSSF. Dalam hal ini PCSSF akan menyeleksi proposal yang masuk sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Proposal yang masuk akan

ditindaklanjuti sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan diatur untuk pemrosesan proposal yang masuk.

Bagian Hibah menerima, mencatat proposal, dan membuat daftar proposal yang masuk serta melakukan seleksi administratif, kemudian kelengkapan proposalnya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Prosedur Pengajuan Proposal. Jika syarat administratif kurang lengkap, maka proposal dikembalikan kepada lembaga pengusul untuk di perbaiki. Bila lembaga pengusul tidak dapat memenuhi kelengkapan tersebut dan atau tidak sesuai dengan Prioritas Kegiatan Kerja PCSSF, maka bagian hibah akan menerbitkan Surat Penolakan. Proposal yang lolos seleksi administratif dilanjutkan ke Bagian Program untuk ditelaah secara substansi, dan ke Bagian Keuangan untuk penelaahan anggaran.



Proposal Yang Disetujui Tahun 2007

No.	LEMBAGA	JUDUL PROPOSAL	NILAI
1.	FOKER/ KMAP	Perjalanan Peserta Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) III di Pontianak	39,750,000
2.	Yayasan Paradisea	Seminar Sehari Pembangunan Kembali Peternakan Kupu-kupu Sayap burung yang Berkelanjutan di Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Arfak	35,850,000
3.	AFP3	Lokakarya Strategic Planning AFP3	41,800,000
4.	Yayasan Triton, Sorong	Lokakarya Strategic Planning TRITON	41,450,000
5.	Yayasan Laskar Tubuh Kristus "YOSHUA"	Kebaktian Kebangunan Rohani Berbasis Budaya	25,750,000
6.	Y. RUMSRAM	Pertemuan Konsolidasi Partisipan FOKER – LSM Papua, Regio Teluk Cenderawasih	42,200,000
7.	Pt. PPMA	Pemetaan Wilayah-Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura	193,000,000
8.	DPMA Kemtuk/Koperasi ANUGRAH	Usaha Peternakan MA di Kemtuk	48,100,000
9.	Asosiasi Masyarakat Adat Wi Ma Rawana/YALHIMO Wamena	Pesta Rakyat: Pendidikan dan Penyadaran Lingkungan Hidup Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2007	29,110,000
10.	Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat / BELANTARA	Pertemuan Partisipan FOKER LSM Regio Kepala Burung	41,850,000
11.	Yayasan Triton, Sorong	Mengoptimalkan Kampanye Lewat Media TV Lokal di Sorong	21,250,000
12.	YAPEPA	Lokakarya Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>) bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Selatan Papua	36,820,000
13.	Lembaga Bantuan Hukum - Dewan Adat Byak / LBH-DAB	Konsolidasi dan Penguatan Lembaga Adat Wilayah Saireri	19,400,000
14.	LP3AP (Anak dan Perempuan, Jayapura)	Lokakarya Penetapan Rencana Pengembangan Kapasitas Regio Utara dan Regio Pegunungan Tengah	36,080,000
15.	Dewan Adat Papua / DAP	Konsolidasi Pemahaman Multipihak Pengambil Keputusan dalam Mempercepat Pembahasan dan Pengesahan Rapedasus Lambang Daerah oleh Gubernur dan DPRD	22,000,000

Dukungan pendanaan PCSSF dari MFP DFID berhenti pada 2008. Oleh karena tidak adanya sumber pendanaan lainnya, maka PCSSF kemudian 'vakum' beroperasi hingga sekarang. Upaya revitalisasi lembaga

ini kini dilakukan oleh FOKER LSM dengan tujuan memperkuat peran dan fungsi unit penggalangan dana dan pengelolaan dana pada jaringan FOKER LSM.



C. Kamuki, Community Foundation Papua Barat (CFPB)

Kamuki berdiri karena kepedulian dan komitmen personal yang berasal dari berbagai organisasi profesi (akademisi dan pemerintah) serta organisasi masyarakat sipil di Papua Barat untuk mendorong perubahan dimensi kebijakan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan hidup yang lebih akomodatif, transparan, dan akuntabel guna pencapaian kedaulatan komunitas masyarakat adat atas sumber-sumber kekayaannya. Prakarsa ini dimulai dengan mendorong perubahan kebijakan ekonomi dan lingkungan hidup, yaitu mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan di Tanah Papua.

Selain itu, Kamuki didirikan karena keprihatinan atas lemahnya eksistensi

keberlanjutan dan kemandirian NGO lokal di Papua Barat dalam menghadapi perubahan global kondisi eksternal yang dinamis, cepat, dan sangat kompleks. NGO lokal sebagian besar bergantung pada skema pendanaan mitra donor dari luar, apabila skema pendanaan ini selesai, maka aktifitas NGO selaku agen transformasi sosial mulai kendur dan menuju pada ambang batas kematian organisasi.

Persoalan akuntabilitas kinerja NGO kepada publik lokal, keterbatasan kapasitas SDM dan lemahnya strategi pengembangan program organisasi NGO lokal untuk menghadapi perubahan-perubahan global di Tanah Papua, juga menjadi latar belakang berdirinya Kamuki.



Lahirnya Kamuki

KAMUKI didirikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), Universitas Negeri Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang didukung oleh Kemitraan (*Partnership for Governance Reform*) – *Forest Governance Program* (FGP). Pada 20 Februari 2009, selesai dilakukannya Pertemuan Anggota I Kamuki, dideklarasikan wadah layanan kemitraan regional Papua Barat "Kamuki" kepada publik. Pada awal tahun 2009 itu telah terbentuk secara resmi KAMUKI Papua Barat Community Foundation.

Tanggal 27 Juni 2009, bertempat di Swissbel Hotel Manokwari, melalui FGD

yang difasilitasi oleh Kemitraan Jakarta (*Partnership for Governance Reform Indonesia*) dan membahas strategi layanan regional masyarakat sipil dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan, dibentuk Tim Inisiasi yang beranggotakan: Rudi Maturbongs (Dekan Fahutan Unipa), CY Han Arwam (Kadishutbun Provinsi Papua Barat), J. Bakarbessy (Dishutbun Papua Barat), M.S. Randa (Dishut Manokwari), Flora F. Runggaeri (Pt. Triton Sorong), Jason Mansawan (Yalhimo Papua), Sena Aji B D Handoko (pemerhati gerakan OMS), Thera Sawor (pemerhati gerakan OMS), dan Godlief Kawer (Koordinator

Tim Inisiasi). Tim inisiasi bertugas untuk melakukan konsolidasi dan memperkirakan kebutuhan guna menyusun rancang bangun wadah layanan regional multipihak untuk pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan di Papua Barat.

Tim Inisiasi bekerja dengan dukungan dari Kemitraan Jakarta serta asistensi teknis dari Foker LSM Papua (Kenny Mayabubun).

Upaya yang dilakukan Tim Inisiasi di antaranya: *Focus Group Discussion* tingkat Kabupaten Manokwari dan sekitarnya untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang berkelanjutan pada 19 September 2009; Lokakarya Pengembangan Model Layanan Kemitraan berbasis Regional dan Multipihak untuk mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang berkelanjutan di Papua Barat pada 6–8 November 2008.



Tentang Kamuki

- Kamuki adalah organisasi nirlaba yang berperan utama sebagai lembaga pendukung sumber daya (*support system*) bagi gerakan transformasi sosial organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua.
- Kamuki merupakan pola pendekatan multipihak yang dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama strategis kelompok masyarakat sipil (KSM/CBO dan LSM/NGO) serta personal dari berbagai profesi yang peduli pada gerakan perubahan dalam satu ikatan yang pluralistik, solid, profesional, dan akuntabel dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan di Papua Barat.
- Kamuki juga merupakan wadah pembelajaran bersama (*public learning centre*), wadah transformasi informasi & berbagai pengetahuan/ketrampilan (*dBase Information and knowledge/skill sharing*), wadah pengembangan kapasitas sumber daya (*resource centre development*), wadah penggalangan sumber daya & penyaluran sumber daya (*fund raising & distributor agency*) untuk peningkatan kecakapan sumber daya manusia & kelembagaan organisasi masyarakat sipil yang profesional, transparan, akuntabel, serta mandiri.
- Kamuki ada untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alamnya, terutama sektor kehutanan.
- Mendukung advokasi kebijakan dalam rangka memperluas akses dan penguasaan hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber kekayaan alamnya. Kamuki akan memberi dukungan pada program atau kegiatan yang memiliki aspek: Pengembangan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan; Peningkatan akses informasi bagi masyarakat adat; Pemberdayaan ekonomi masyarakat; Advokasi kebijakan dan praktik-praktik kebijakan untuk memperluas akses dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam.

Program Strategis 2009–2013

- Menghimpun dan mengelola sumber daya keuangan bagi organisasi masyarakat sipil di Papua Barat.
- Mengembangkan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan organisasi masyarakat sipil.
- Membangun komunikasi yang harmonis dan kemitraan strategis untuk perubahan dimensi kebijakan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup (eksosbudkesling) pada berbagai tingkatan (daerah, regional, nasional, dan internasional).



Anggota dan Pengurus Kamuki

1. Thomas Nifinluri
2. Marthina Wonatorey
3. Hubertus Matanubun
4. Jhon Leo Sroyer
5. Nur Rahimi Hastuti
6. Louise M. Marlissa
7. Nikolas D. Imunuplatia
8. Flora F. Runggeari
9. Solichin
10. Guntur Letsoin
11. Donni Karawan
12. Risdiyanto
13. Nico Kalami
14. Teguh Sugiarto
15. Irwan Pasombo
16. Markus S. Oppue
17. Sabatha Rumadas
18. Rosa H. Gasperz
19. Nico Kalami
20. Abner Korwa
21. Victor Simbiak
22. Christian Hamdani
23. Sahat Saragih
24. Dano M. R.Kafara
25. Pietsau Amafnini
26. Jason Mansawan
27. Paris A. Wabia
28. Yonas Baransano
29. Sena ABD Handoko
30. Thera Sawor, *Pengurus (Direktur Eksekutif Kamuki CFPB, 2009–2013)*
31. Mateus S Randa
32. Rudi A. Maturbongs
33. Max J. Tokede
34. Godlief Kawer, *Pengurus (Koordinator Tim Inisiasi, 2009)*
35. Hubertus Matanubun
36. Susan T Salosa
37. Mujianto
38. Juliyantti Gasperz
39. Hubertus Matanubun

Apakah Community Foundation Itu?

Community Foundation (CF) atau “Yayasan Komunitas” dirancang untuk menjadi institusi permanen dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, dimana ia memiliki kapasitas yang sangat baik dalam hal mengalokasikan dan mengelola pendanaan.

Menurut Sussane Feurt (pengamat Community Foundation di AS), Yayasan komunitas merupakan organisasi kemanusiaan yang independen, bekerja di suatu lokasi geografis tertentu dan dari waktu ke waktu berupaya: Membangun dana abadi; Memberikan layanan kepada donasi (individu/lembaga); Memberikan dana hibah; Mengembangkan kegiatan bagi kepentingan masyarakat di wilayah layanan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

CF berkembang pesat di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1997. Namun, sesungguhnya CF bukan hal baru di Indonesia. Warga Kasepuhan di Jawa Barat misalnya, telah mengembangkan ‘*leuit*’ (lambung padi) untuk memastikan warganya terhindar dari kelaparan di musim paceklik.

Masyarakat perantau dari Sumatera Barat juga sejak lama telah mengembangkan filantropi dengan pendekatan kekerabatan (diaspora). Setiap orang diminta untuk membayar iuran sukarela. Dari iuran ini, telah berkembang lebih dari 40 Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera Barat, yang melayani permodalan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Begitu juga di bidang keagamaan. Dompot Dua’fa telah dikenal cukup luas dikalangan muslim diseluruh Indonesia. Bekerja sama dengan Koran Republika menggalang dana publik. Saat ini, dompet dua’fa telah menyalurkan dananya kepada masyarakat miskin untuk modal, pendidikan, kesehatan, dsb.

Tidak ada hal baku dalam pembentukan CF. Prosesnya dapat bervariasi tergantung konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya; yang bahkan juga dipengaruhi oleh individu atau organisasi penggagasnya. Yang terpenting adalah, CF didirikan karena dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat di suatu wilayah.

Ciri khas CF: tidak mengambil keuntungan, merupakan organisasi non pemerintah, bebas pajak, sifatnya melayani publik, dan memiliki dewan pengurus yang independen.

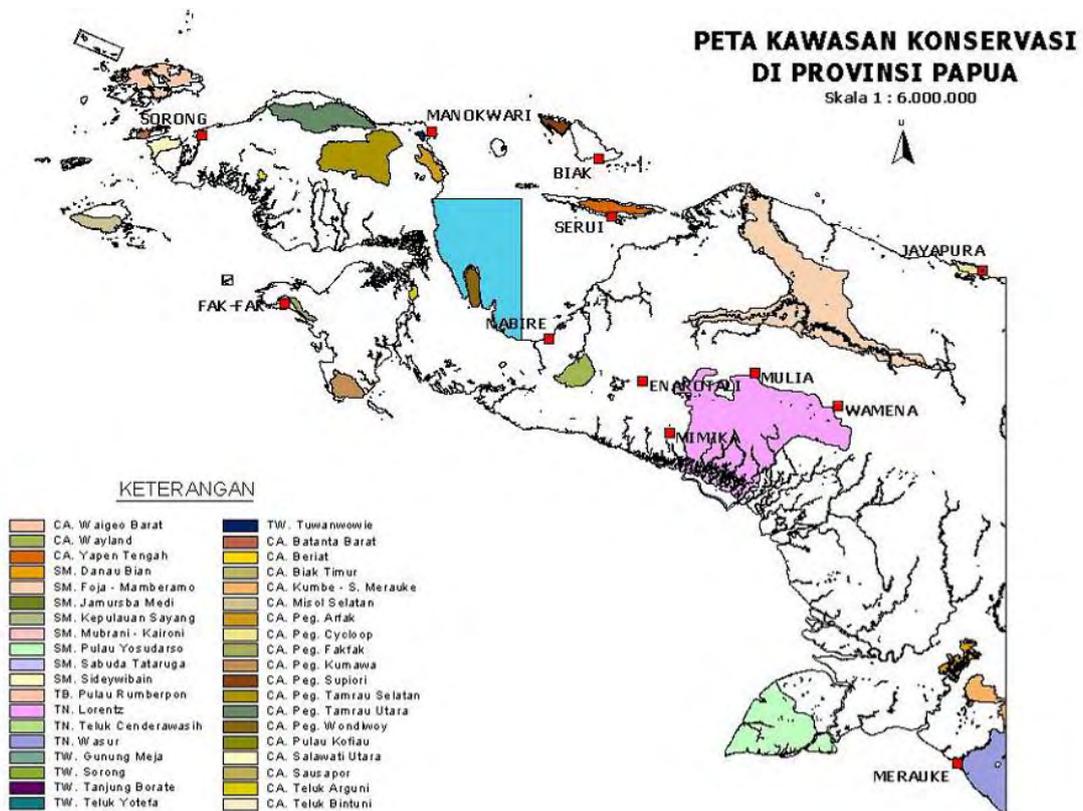
Pendirian CF dimaksudkan untuk memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada anggota masyarakat. Dalam hal manfaat sosial, CF dapat membiayai proyek dengan tujuan meningkatkan jumlah tenaga kerja, meningkatkan efisiensi layanan publik, penguatan masyarakat dan individu, serta membangun dan meningkatkan pendapatan. CF juga mesti berusaha meningkatkan kualitas komunikasi masyarakat, Ornop dengan pemerintah dan dunia usaha, agar bisa menelorkan agenda bersama—sehingga bisa terbangun kerja sama untuk isu tertentu, dialog multipihak, dan kegiatan lainnya.

Keterlibatan pelaku bisnis menjadi penting, diantaranya untuk membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan kredit, atau pemasaran masyarakat/mitra CF. Sedangkan dalam hal hibah, dimaksudkan membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat lokal. CF dituntut untuk sanggup menggalang dan mengelola dana yang berasal dari individu maupun organisasi, bahkan jika memungkinkan membangun dana abadi. CF juga seharusnya kreatif menjembatani keinginan donor dengan kebutuhan lokal, atau menghubungkan individu-individu dermawan dengan lingkungannya, dan membangun sesuatu yang bisa menjadi garapan bersama.

Pada dasarnya, beberapa peran yang biasanya dilakukan sebuah CF adalah:

- Sebagai pemberi hibah. CF tidak mengimplementasikan proyeknya sendiri, tapi memprakarsai dengan memberi dukungan asistensi dan pendanaan, agar memperkuat kapasitas CSO lokal dan komunitas.
- Sebagai fasilitator pendanaan. CF berupaya mencari tambahan sumber dana untuk mendukung proyek, termasuk menjembatani penyelenggara program dengan donor.
- Sebagai katalisator kemitraan. CF mendorong kerjasama antar civil society; dan civil society dengan pemerintah atau dunia usaha untuk membangun platform bersama.
- Memberi perhatian pada isu yang diabaikan pihak lain karena berisiko terlalu berat.
- Mengenalkan kepada pemerintah solusi dan inovasi baru dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial dan ekonomi.

4.2 Kebutuhan Pendanaan Konservasi



Pada 2006, IUCN menerbitkan suatu ulasan mengenai status dan kecenderungan pendanaan konservasi. Kajian itu menyimpulkan bahwa meskipun di mana-mana, di sebagian besar negara di dunia, telah muncul komitmen untuk mengalokasikan pendanaan guna kegiatan pelestarian, status pendanaan yang ada masih sangat kurang mencukupi kebutuhan pendanaan kawasan-kawasan yang perlu dilestarikan.

Karena itulah diperlukan adanya upaya pendanaan yang lestari, demi kelangsungan dan keberlanjutan upaya-upaya konservasi. Tujuannya, memperbesar jumlah dan sumber dana untuk konservasi, guna

melengkapi upaya pendanaan yang selama ini bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah serta dukungan NGO dan berbagai donor bilateral maupun multilateral.

Di Indonesia, kesadaran untuk menggalang dana-lestari demi kepentingan konservasi itu telah lama tumbuh. Terkait dana-lestari itu, salah satu terobosan yang akhir-akhir ini mulai berkembang adalah skema *trust fund*. Pada tanggal 22–23 Juni 2009, Kementerian Perekonomian bekerjasama dengan WWF Indonesia menyelenggarakan *workshop* Pendanaan Berkelanjutan di Jakarta, yang menghasilkan gagasan untuk

penerapan konsep dan mekanisme pengelolaan *trust fund* sebagai salah satu konsep Pendanaan Berkelanjutan.

Status pembiayaan kawasan konservasi di Indonesia sejak 2004 sampai 2006 cenderung meningkat. Total pendanaan

bagi kawasan konservasi pada 2004 adalah sebesar USD 34,89 juta.

Jumlah itu meningkat secara signifikan menjadi USD 51,66 juta pada 2005, dan terus meningkat lagi menjadi USD 53,37 juta pada 2006. Lihat Tabel di bawah.



Tabel Status Pendanaan untuk Kawasan Konservasi di Indonesia 2004–2006 (Juta USD)

No.	SUMBER PENDANAAN	2004	2005	2006
1	Anggaran pemerintah pusat	21,01	31,18	35.99
2	Anggaran Pemerintah daerah	1,15	1,71	2.02
3	NGO	6,97	10,09	11.51
4	Donor bilateral dan multilateral	5,76	8,68	3.85
JUMLAH		34,89	51.66	53,37

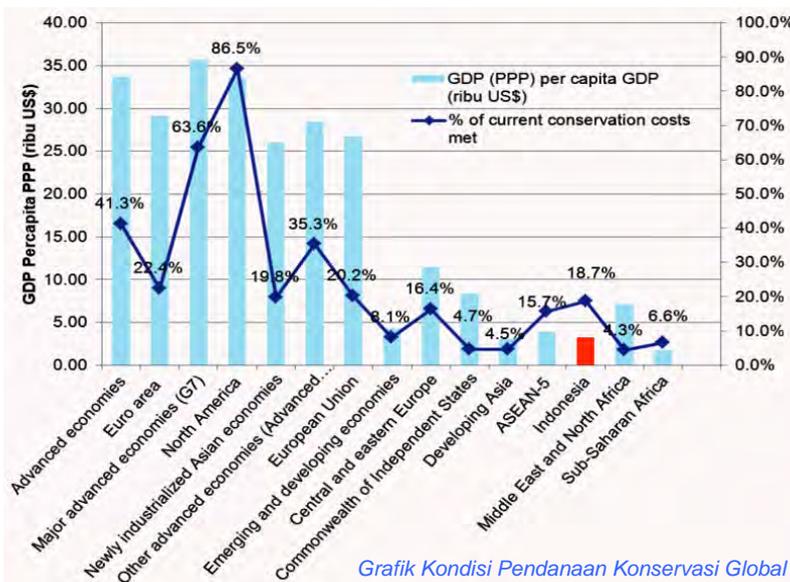
Walaupun jumlahnya meningkat, tetapi jumlah itu masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, dengan negara tetangga Thailand, atau apalagi dengan negara maju seperti Amerika Serikat.

Hamparan hutan Indonesia lebih luas dibanding Thailand. Namun dari penghi-

tungan biaya konservasi per hektare terlihat bahwa biaya konservasi hutan Indonesia jauh lebih rendah dibanding Thailand.

Pada 2004, biaya konservasi hutan Indonesia adalah USD 2,35 per hektare. Angka sebesar itu ternyata hanya sepersepuluh biaya konservasi per hektare

hutan Thailand yang mencapai USD 20,65; dan sangat jauh lebih rendah dibanding biaya konservasi per hektare kawasan di Amerika Serikat yang mencapai USD 76,12.



Tabel Perbandingan Biaya Konservasi dalam USD/Ha antara Indonesia, Thailand, dan Amerika Serikat

No	NEGARA	1996		2004	
		TOTAL AREA	USD/Ha	TOTAL AREA	USD/ Ha
1	Amerika Serikat	31,351,234	52,18	34,155,468	76,12
2	Thailand	6,805,600	13,65	9,380,812	20,65
3	Indonesia	21,324,979	0,44	28,084,706	2,35

Kenyataan di atas menggambarkan diperlukannya upaya serius untuk meningkatkan pembiayaan upaya konservasi di Indonesia: pembiayaan yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu, mula-mula diperlukan semacam penghitungan mengenai seberapa besar biaya yang diperlukan.

Caranya, tentu dengan membandingkan jumlah dana yang secara optimal dibutuhkan dengan jumlah dana yang selama ini tersedia. Selisihnya akan berupa

defisit pembiayaan konservasi: inilah nilai biaya yang perlu diupayakan.

Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan TNC, kebutuhan dana yang optimal untuk kawasan konservasi di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar USD 135,31 juta. Sementara jumlah pembiayaan yang selama ini dapat dipenuhi adalah sebesar USD 53,37 juta. Maka, defisit kebutuhan dana untuk kawasan konservasi di Indonesia pada 2006 adalah sebesar USD 81,94 juta.



Tabel Dana Konservasi di Indonesia dalam USD (2006)

KAWASAN PELESTARIAN	DANA PEMERINTAH	DANA NON-PEMERINTAH	TOTAL DANA	DANA OPTIMAL	DEFISIT
Cagar Alam	6,031,332	3,810,000	9,841,332	40,721,228	30,879,896
Suaka Margasatwa	4,962,460	2,800,000	7,762,460	14,967,461	7,205,001
Taman Nasional	15,957,616	3,100,000	19,057,616	45,929,609	26,871,993
Taman Wisata Alam	3,592,054	3,100,000	6,692,054	15,549,054	8,857,000
Taman Hutan Raya	1,979,528	200,000	2,179,528	3,365,734	1,186,206
Taman Buru	1,497,010	130,000	1,627,010	3,269,282	1,642,272
Taman Laut	3,990,000	2,220,000	6,210,000	11,505,622	5,295,622
JUMLAH	38,010,000	15,360,000	53,370,000	135,307,990	81,937,990

Mengacu kepada angka defisit itu, perkiraan kebutuhan biaya konservasi untuk suatu kawasan atau region tertentu dapat dilakukan. Misalnya, untuk kawasan pelestarian di Tanah Papua yang luasnya 10,02 juta

hektare, yakni sekitar 35,46 % dari total kawasan konservasi di Indonesia yang luasnya 28,26 juta hektare, defisit pembiayaan konservasinya kira-kira mendekati USD 42,5 juta per tahun.

Tabel Perhitungan Kebutuhan Dana Konservasi untuk Tanah Papua (2006)

Kebutuhan operasional konservasi seluruh Indonesia***	:	135,307,990 USD
Ketersediaan dana pemerintah	:	38,010,000 USD
Ketersediaan dana non-pemerintah	:	15,360,000 USD
Defisit operasional per tahun	:	81,937,990 USD
Start-up Cost untuk Kawasan Konservasi Baru	:	± 56,000,000 USD
Defisit Total per tahun	:	137,937,990 USD
Luas kawasan konservasi di Indonesia***	:	28,259,526 Ha
Kebutuhan dana operasional konservasi per Ha per tahun	:	4.88 USD
Luas kawasan konservasi di Tanah Papua	:	8,711,011 Ha
Defisit dana operasional konservasi Tanah Papua per tahun	:	42,519,443 USD

*** Sumber: Kantor Menteri LH dan TNC (2006)

Tetapi yang perlu diingat, nilai defisit USD 42,5 juta bagi pendanaan konservasi Tanah Papua per tahun tersebut itu muncul sebagai hasil penghitungan berdasarkan data tahun 2006. Dasar perhitungan yang dilakukan tersebut di atas hanya dilakukan atas kawasan konservasi saja, belum dilengkapi dengan perhitungan biaya konservasi bagi wilayah-wilayah di luar kawasan konservasi.

Kini 2010. Dengan segala perkembangan yang terjadi selama empat tahun belakangan ini, hampir pasti defisit dana pembiayaan konservasi untuk Tanah Papua akan jauh lebih besar.

Kelangsungan upaya pelestarian sangat ditentukan oleh keberlanjutan aspek pendanaan. Keberlanjutan pendanaan untuk konservasi berarti kemampuan menjamin sumber daya finansial berjangka panjang yang stabil dan memadai. Juga kecakapan mengalokasikan sumber daya finansial itu secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk menutupi keseluruhan biaya kegiatan-kegiatan konservasi. Penghitungan defisit kebutuhan pendanaan di atas menjadi dasar awal bagi gambaran skala dan volume upaya pengembangan strategi pendanaan berkelanjutan bagi konservasi di Tanah Papua.



4.3 Opsi Pengembangan Kelembagaan

Lokakarya Pendanaan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua 3–4 Agustus 2010

Pada akhir tahun 2009 diadakan Konferensi International tentang Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua. Konferensi ini telah membuka mata para pihak, bahwa Tanah Papua kaya akan keanekaragaman hayati namun sangat membutuhkan dukungan pengelolaan secara bijaksana, sehingga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam tetap ada bagi generasi yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua secara berkelanjutan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana secara berkelanjutan pula, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, juga oleh semua pihak termasuk pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan *stakeholder* lainnya di Tanah Papua.

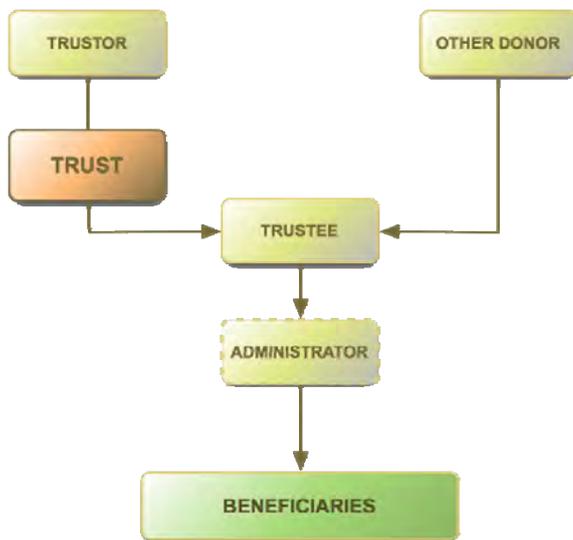
Sebagai salah satu wujud dari hasil Konferensi International tentang Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua, diperlukan lembaga pengelolaan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan konservasi dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua. Pendanaan berkelanjutan atau *sustainable financing* bagi konservasi keanekaragaman hayati merupakan salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan manajemen pengelolaan sumber daya alam.

Gubernur Barnabas Suebu dalam sambutan tertulisnya ketika membuka Lokakarya Pendanaan Konservasi dan

Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua yang diadakan di Jayapura oleh Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini BAPPEDA, bekerja sama dengan WWF Regional Sahul, pada 3–4 Agustus 2010, menyebutkan:

“Penggalangan dana dapat bersumber dari lembaga multi-lateral, pemerintah atau bilateral, korporasi ataupun yayasan filantropi dan juga sumber pendanaan berupa pengalihan hutang negara (Debt for Nature Swap), bentuk ini juga bisa menjadi bagian penting untuk skema pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, manfaat inisiatif pendanaan berkelanjutan ini tidak lagi hanya terfokuskan pada kegiatan perlindungan sumber daya alam semata, namun juga pembangunan berkelanjutan. Upaya menggalang pendanaan berkelanjutan perlu difokuskan pada penetapan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan kredibel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan (termasuk kepada masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan sumberdaya alamnya yang akan dikelola).”

Para pihak menyadari bahwa pendanaan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sudah menjadi kebutuhan mendasar. Beberapa inisiatif telah dibangun guna mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Tanah Papua, terutama dalam hal pendanaan. Namun inisiatif ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Belajar dari pengalaman pendirian lembaga-lembaga pengelolaan dana berkelanjutan di Papua, dan dalam hubungan dengan mekanisme pendanaan konservasi dan pembangunan

berkelanjutan, maka lokakarya ini diadakan. Lokakarya diharapkan mendapat masukan dari para peserta dalam rangka kebutuhan akan mekanisme pendanaan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Lokakarya ini bertujuan untuk:

- Berbagi informasi terkait dengan mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dan
- Membangun kesepakatan serta komitmen bersama para stakeholder di Tanah Papua akan pentingnya mekanisme pendanaan atau trust fund dalam rangka mendukung proses pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.



Perlu Ada Lembaga Pengelolaan Pendanaan

Untuk Kegiatan Konservasi dan Pembangunan Ekonomi Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua secara berkelanjutan, tidak terlepas dari ketersediaan dana secara berkelanjutan, baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor dan stakeholder lainnya.

Menurut Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH, pada tahun 2009 lalu pemerintah Provinsi Papua telah mengadakan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua, hal itu sebagai salah satu wujud hasil konferensi tersebut. Dimana, diperlukannya Lembaga Pengelolaan Pendanaan bagi kegiatan konservasi dan pembangunan ekonomi di tanah Papua.

"Pendanaan berkelanjutan atau sustainable financing bagi konservasi keanekaragaman hayati, merupakan salah satu faktor penting terhadap berkelanjutan manajemen pengelolaan sumber daya alam," ujar Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si pada pembukaan Lokakarya Pendanaan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua, Selasa, [3/8] kemarin di Swissbel Hotel Jayapura.

Menurut Gubernur, pengelolaan dana dapat bersumber



LOKAKARYA : Suasana pembukaan Lokakarya Pendanaan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua, Selasa, [3/8] kemarin di Swissbel Hotel Jayapura.

dari lembaga multilateral, pemerintah atau bilateral, korporasi atau yayasan filantropi dan juga sumber pendanaan berupa pengalihan hutang negara (Debt For Nature Swap), bentuk ini juga dapat menjadi bagian penting untuk skema pendanaan secara berkelanjutan.

"Oleh karena itu, manfaat inisiatif pendanaan berkelanjutan ini tidak lagi hanya terfokus pada kegiatan perlindungan Sumber Daya Alam semata, namun juga pembangunan berkelanjutan," terangnya.

Dikatakan Gubernur, upaya untuk menggalang pendanaan berkelanjutan perlu difokuskan pada penetapan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan serta kredibel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan (termasuk kepada masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan sumber dayanya yang dikelola).

Gubernur Suebu menyampaikan, skema pendanaan berkelanjutan ini bukan hal baru, namun hal ini telah dikembangkan di berbagai negara

seperti, Brasil, Costa Rica, Paraguay dan Filipina, dimana semuanya melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.

Dengan kerangka kebijakan yang terintegrasi, di Indonesia skema ini mulai dikembangkan di beberapa tempat yaitu Sumatera, Kalimantan dan Tanah Papua. "Sudah menjadi kebutuhan bersama dan penting bagi Tanah Papua diperlukannya bentuk-bentuk atau model-model pendanaan, untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Direktur WWF Region Papua, Benja V Mambay mengatakan, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di Tanah Papua, Gubernur telah membentuk Papua Carbon Development Task Force. Kelompok kerja ini berfungsi untuk membantu pemerintah daerah Provinsi Papua, khususnya dalam mempersiapkan sejumlah hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Papua sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki komitmen dalam membangun daerahnya, dengan cara berkelanjutan agar tetap menjamin kelestarian lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, menurut Benja, salah satu aspek yang dipandang perlu adalah mampu menciptakan dukungan pandangan yang berkelanjutan sebagai salah satu hal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.

"Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membagi informasi dan pengalaman tentang pembentukan dan mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan, serta membangun komitmen para pihak untuk mendukung inisiatif pendanaan berkelanjutan bagi konservasi dan pembangunan di Papua," tandas Benja. *[anyong]*

Gubernur: Pengelolaan Hutan Butuh Dana Berkelanjutan



Antara - Rabu, 4 Agustus

Kirim Kirim via YM Cetak



Gubernur: Pengelolaan Hutan Butuh Dana Berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua secara berkelanjutan membutuhkan dana secara berkelanjutan pula, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Butuh perhatian yang serius terkait pengelolaan dan pendanaan hutan di Tanah ini," kata Gubernur Papua melalui Sekretaris daerah Papua Ely Loupaty dalam lokakarya pendanaan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang dilakukan oleh World Wild Fund for Nature Indonesia (WWF) region Sahul, di Jayapura, Papua, Selasa.

la menjelaskan sebagai salah satu wujud dari hasil konferensi internasional keanekaragaman hayati di Tanah Papua pada November tahun lalu, adalah diperlukannya lembaga pengelolaan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan konservasi dan pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

"Perlunya suatu lembaga atau lembaga independen untuk pendanaan konservasi hutan di Tanah Papua," katanya.

Kepada semua pihak termasuk swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor dan stakeholder lainnya di Tanah Papua diminta untuk peduli akan keberlangsungan kehidupan hutan Papua yang menopang paru-paru dunia.

"Kepedulian semua pihak selain pemerintah untuk mengelola hutan di Papua seperti pihak swasta, stakeholder, LSM ataupun lembaga lainnya sangat diperlukan," katanya.

Pendanaan berkelanjutan bagi konservasi keanekaragaman hayati merupakan salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan manajemen pengelolaan sumber daya alam.

Penggalangan dana dapat bersumber dari lembaga multilateral, pemerintah atau bilateral, korporasi ataupun yayasan filantropi juga sumber pendanaan berupa pengalihan hutang negara bentuk ini bisa menjadi bagian penting untuk skema pendanaan berkelanjutan ini tidak lagi hanya terfokuskan pada kegiatan perlindungan sumber daya alam semesta, namun juga pembangunan berkelanjutan.

Upaya penggalangan pendanaan berkelanjutan, menurut dia, perlu juga difokuskan pada penetapan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan kredibel, dengan memberikan manfaat berimbang kepada para pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat adat yang hidup disekitar kawasan sumber daya alam yang dikelola.

"Skema pendanaan berkelanjutan ini bukan hal yang baru, tetapi telah ada di beberapa negara seperti di Madagaskar, Kamerun, Brazil, Costa Rica, Paraguay dan Filipina. Di Indonesia skema ini baru di beberapa tempat yaitu di Sumatera, Kalimantan dan di Tanah Papua," katanya.

Dengan adanya kesempatan ini agar partisipatif aktif dari para peserta lokakarya dalam memberikan kontribusi pemikiran, guna membangun mekanisme model pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu Benja V. Mambai direktur world wild fund for Nature Indonesia (WWF) region Sahul mengatakan tujuan dari lokakarya tersebut adalah membagi informasi dan pengalaman tentang pembentukan dan mekanisme serta membangun komitmen para pihak untuk mendukung insiatif pendanaan berkelanjutan bagi konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.

"Diharapkan dengan lokakarya ini maka kita semua memiliki pemahaman dan komitmen bersama dalam membangun sebuah institusi pendanaan yang berkelanjutan di Papua dengan memperhatikan keberadaan lembaga-lembaga pendanaan yang sebelumnya dibentuk di Papua," katanya.

Pada kesempatan itu juga atas nama pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Suebu menyampaikan ucapan terimakasih kepada para peserta lokakarya, narasumber dan WWF Papua.

"Sumbangan pemikiran sangat diperlukan dan terimakasih kepada WWF Papua yang telah berinisiatif dengan komitmennya untuk bekerja di Papua," katanya.

Lokakarya yang akan dilaksanakan selama dua hari tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat, wakil DPRP Papua dan Papua Barat, MRP, UPT-Departemen kehutanan, lembaga donor, LSM, akamedisi, dan perorangan.

Berita Utama

- Twente Kurang M
- Arema Resmi Ika
- Presiden: Kita H
- Fauzi Bowo: DKI
- Kali Ini Tommy J

Introducing
Sponsored
a whole new
reason to
YAHOO!
Find out more

Introducing
Sponsored
a whole new
reason to
YAHOO!
Find out more

LAINNYA DI YAHOO!

- Financial news o
- Stars and latest r
- Best travel destin

Trust Fund bagi Konservasi

Satu tema yang mengemuka dalam lokakarya tersebut adalah inisiasi pembentukan *Conservation Trust Fund* (CTF) bagi Tanah Papua. CTF diharapkan mampu menjadi pijakan (*anchor*) bagi strategi pendanaan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan konservasi melalui pengelolaan beragam sumber dana berjangka panjang atau dana yang diperoleh sendiri dari kawasan.

Trust Fund secara umum diterjemahkan sebagai dana amanah atau dana perwalian.

Dana amanah (*Trust Fund*) didefinisikan sebagai sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (*Trust*) yang oleh orang atau lembaga (*Trustor/ Donor/ Grantor*) dititipkan atau diserahkan untuk di kelola dengan baik oleh sebuah lembaga (*Trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*Beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan. (*Article 2 The Hague Convention of 1st July*

1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition that denotes trust as: or the purposes of this Convention, the term "Trust" refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a Trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose.)

Dana yang telah dititipkan maupun diserahkan tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, oleh karenanya disebut sebagai dana amanah. Dana amanah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan amanah awal pada saat dana tersebut dibentuk.

Sedang beberapa bentuk dana amanah secara umum, berdasarkan jenis amanah pengelolaannya adalah:

1. Dana Abadi (*Endowment Fund*)
2. Dana Bergulir (*Revolving Fund*)
3. Dana Menurun (*Sinking Fund*)
4. Dana Amanah Kombinasi (*Mixed Trust Fund*)



Dana Abadi (*Endowment Fund*)

Dana Abadi adalah dana yang dititipkan/ diserahkan untuk dikelola secara abadi, tanpa batasan waktu. Dana yang bisa digunakan hanyalah hasil investasi dari dana abadi tersebut. Dana abadi dikelola sebagai harta atau *asset*, bukan sebagai penghasilan atau *income*, dengan demikian pengelolaan dana abadi merupakan pengelolaan aset. Pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*) yang berasal dari

aktivitas investasi dana abadi adalah yang merupakan kategori penghasilan (*income*).

Dana abadi harus dikelola dengan dua tujuan utama secara bersamaan yaitu: mempertahankan nilai intrinsik (*real value*) dana abadi sepanjang waktu, dan memberikan pendapatan yang pasti bagi pembiayaan program. Mempertahankan nilai intrinsik dana abadi adalah perpaduan

seni pengelolaan investasi, penganggaran, dan penggunaan hasil investasi tersebut. Total hasil investasi minimal sama dengan *rate* pengeluaran tahunan ditambah biaya

yang diperlukan untuk melakukan aktivitas investasi, dengan tetap memperhitungkan laju inflasi yang terjadi.



Dana Bergulir (*Revolving Fund*)

Dana Bergulir adalah dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya dana digunakan bagi pinjaman, modal usaha, ataupun *initial costs*.

Dana bisa bergulir karena mendapatkan penerimaan/pendapatan dari pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk.

Dana bergulir pada umumnya diperuntukkan bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran dana ini biasanya membutuhkan pengelolaan secara berkelompok dan tanggung renteng, dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat, atau koperasi.



Dana Menurun (*Sinking Fund*)

Dana Menurun adalah dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang disepakati. Model pengelolaan dana ini memang diharapkan untuk dapat menyerap habis dana pada akhir periode program yang telah ditentukan. Jika dana tidak sepenuhnya dapat terserap, pihak pengelola dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode, disertai dengan revisi ataupun

realokasi anggaran. Namun, pihak pemberi dana juga berhak menolak permohonan dan meminta pengembalian atas sisa dana yang tidak terserap tersebut.

Dana menurun biasanya digunakan bagi *trust fund* yang dibentuk untuk program-program penanggulangan bencana, terutama bagi masa-masa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.



Dana Amanah Kombinasi (*Mixed Trust Fund*)

Kombinasi antara tiga bentuk *Trust Fund* yang telah disebutkan di atas biasa disebut Dana Amanah Kombinasi (*Mixed Trust Fund*).

Kunci Keberhasilan Inisiasi *Trust Fund* bagi Konservasi

Lokakarya juga mencatat beberapa hal yang diyakini menjadi prasyarat dan kunci keberhasilan inisiasi *trust fund* bagi konservasi, sebagai berikut:

- Keseimbangan keterwakilan kepentingan para pihak;
 - Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari *Board* (Dewan Pembina) dalam menjaga visi dan misi, pengembangan strategi intervensi, dan pendanaan serta dalam penggalangan dana (*fundraising*);
 - Fokus pada pengukuran dampak konservasi pada tujuan-tujuan konservasi (pengelolaan populasi, pembinaan habitat, peningkatan/pemberdayaan masyarakat);
 - Diperlukan adanya momentum politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk suatu visioning eco-regional;
 - Didasarkan pada kajian defisit pendanaan, rencana kelola kawasan/kegiatan, dan kajian mekanisme pendanaan yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas serta besaran kegiatan yang akan ditangani.
- Sedangkan beberapa petikan pembelajaran dari pengelolaan CTF sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah sebagai berikut (*Sumber: Rapid Review of Conservation Trust Funds May 2008, CFA*):
- Penilaian komprehensif terakhir menemukan bahwa 11 dari 21 CTFs di dunia yang dipelajari memiliki dua atau lebih sumber pendanaan.
 - Hampir 75% dana berasal dari hibah GEF dan DNS (sebagian besar dengan AS, pemerintah Jerman, dan Belanda) dan sebagian besar sisanya berasal dari pemerintah nasional dan lembaga-lembaga bilateral serta multilateral.
 - Dalam beberapa kasus, LSM internasional telah memainkan peran besar dalam memobilisasi sumber daya.
 - Adanya strategi konservasi tingkat nasional yang menghadirkan penilaian menyeluruh atas kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.
 - Adanya dukungan politik di tingkat tertinggi di sebuah negara, dengan keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam manajemen CTF sehari-hari.
 - Adanya penggalangan dana dan dukungan teknis dari organisasi-organisasi internasional.
 - Proses konsultatif yang meliputi dan mencerminkan masukan semua pemangku kepentingan utama dalam desain CTF.
 - Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin CTF, baik di tingkat senior dan staf manajemen.



Kesimpulan dan Rekomendasi Lokakarya: Dana Lestari Tanah Papua

Pada akhirnya lokakarya menyepakati tiga hal penting yaitu:

- Kesepakatan untuk membangun kembali kelembagaan dan mekanisme pengelolaan pendanaan keberlanjutan untuk konservasi di Tanah Papua;
- Kesepakatan untuk melakukan sosialisasi dan menggalang komitmen berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat untuk mendukung kelembagaan pendanaan berkelanjutan di Tanah Papua;
- Menindaklanjuti hasil lokakarya. Maka dibentuklah kelompok kerja ad-hoc untuk bekerja dan mengawal rumusan mandat lokakarya sampai dengan inisiasi untuk pembentukan kelembagaan *trust fund* di Tanah Papua.

Ketiga kesepakatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Urgensi pengembangan dana berkelanjutan adalah:

- Dalam konteks proses: merupakan tindak lanjut Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati (2009) serta selaras dengan kebijakan dan program pemerintah untuk membentuk *task force* perubahan iklim.
- Dalam konteks strategis: upaya memenuhi kebutuhan akan pemenuhan kesenjangan dana konservasi, mengatasi tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam, serta menggalang kerja sama para pihak,

terutama pihak swasta yang melekat kewajiban untuk pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

- Dalam konteks *positioning*: mendukung kebijakan pro-konservasi dari Pemerintah Daerah Papua, mempromosikan kontribusi konservasi Papua dalam konteks global dan nasional, serta mendorong praktik konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Sosialisasi dan menggalang dukungan kepada para pihak diarahkan sebagai berikut:

- Menetapkan target group: pemerintah, LSM, dan Swasta.
- Materi sosialisasi: Konsep gagasan *Trust Fund*, pembelajaran selama ini, dan lanskap pendanaan.
- Menetapkan target dan sumber pendanaan, kelembagaan, serta mekanisme pengelolaan dana berkelanjutan.

3. Harapan dan mandat untuk kelembagaan pendanaan konservasi di Tanah Papua adalah:

- Memiliki board yang kredible dan marketable.
- Memiliki manajemen unit yang profesional.
- Didukung kebijakan yang secara legal memayungi pengelolaan dana konservasi.

- Komitmen untuk menggalang dana lokal dari para pihak, selain dana dari luar.
 - Sinergi dengan kelembagaan pada tingkat nasional.
4. Kelembagaan diamanatkan untuk memiliki Visi dan Misi yang mengandung prinsip sebagai berikut:
- VISI:
 - a. Mulai dari sumberdaya yang dipunyai di lokal:
 - Memiliki integritas
 - Mengutamakan kebutuhan lokal (*local need*)
 - Mengacu pada kepentingan lokal (*local interest*)
 - MISI
 - b. Mengandung dimensi pemberdayaan;
 - c. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi;
 - d. Pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat adat;
 - e. Melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati;



Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengawal mandat lokakarya, dibentuklah kelompok kerja yang disebut sebagai Komite Ad-Hoc dengan komposisi:

- Bapak Agus Rumansara (*Green Investment Task Force Papua*).
- Bapak Frans Wospakrik (Wakil MRP).
- Bapak Noak Kapisa (Kepala BPSDA-LH).
- Bapak Budi Wardana (WWF-Indonesia).
- Didukung *supporting team*: Bapak Benja, Joseph Watofa (WWF-Papua), Peter Kamarea (CI Indonesia Papua Program), Marthen Marisan (BP SDA-LH).

Sekretariat Komite Ad-Hoc adalah di ruang kelompok kerja perubahan iklim pada Kantor BPSDA-LH. Kegiatan Tim Ad-Hoc adalah:

- Sosialisasi kepada para pihak;
- Telaah dan kajian *Trust Fund* di Papua terhadap dukungan Regulasi/SK.
- Inisiasi terbentuknya kelembagaan *Trust Fund*.
- Opsi penggalangan pendanaan dan bentuk pengelolaan *outsbore*.

Tim akan bekerja selama 5 bulan dan melaporkan mandat kepada forum peserta lokakarya dan Gubernur Papua sebagai pemberi mandat utama.

4.4 Catatan Akhir: Demi Papua yang Lebih Baik



Menurut penghitungan yang dilakukan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan TNC, defisit kebutuhan dana untuk kawasan konservasi di Indonesia pada 2006 adalah sebesar USD 81,94 juta. Mengacu kepada angka defisit itu, perkiraan kebutuhan biaya konservasi untuk kawasan pelestarian di Tanah Papua yang luasnya 10,02 juta hektare, defisit pembiayaan konservasinya kira-kira mendekati USD 42,5 juta per tahun.

Perlu diingat, nilai defisit USD 42,5 juta tersebut muncul sebagai hasil penghitungan berdasarkan data tahun 2006. Dasar perhitungan yang dilakukan tersebut di atas hanya dilakukan atas kawasan konservasi saja, belum dilengkapi dengan

perhitungan biaya konservasi bagi wilayah-wilayah di luar kawasan konservasi. Kini tahun 2010, dengan segala perkembangan yang terjadi selama empat tahun belakangan ini, hampir pasti defisit dana pembiayaan konservasi untuk Tanah Papua akan jauh lebih besar.

Kelangsungan upaya pelestarian sangat ditentukan oleh keberlanjutan aspek pendanaan. Keberlanjutan pendanaan untuk konservasi berarti kemampuan menjamin sumber daya finansial berjangka panjang yang stabil dan memadai. Juga kecakapan mengalokasikan sumber daya finansial itu secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk menutupi keseluruhan biaya kegiatan-kegiatan konservasi.

Lokakarya Pendanaan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua 3–4 Agustus 2010 menghasilkan kesepakatan untuk membangun kelembagaan dan mekanisme pengelolaan pendanaan berkelanjutan demi konservasi di Tanah Papua. Selain itu, kesepakatan untuk segera melakukan sosialisasi serta menggalang komitmen berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun

kelompok masyarakat, guna mendukung pengembangan kelembagaan pendanaan konservasi berkelanjutan di Tanah Papua.

Berikut ini adalah beberapa catatan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan pendanaan keberlanjutan untuk konservasi di Tanah Papua—berdasarkan hasil kajian singkat ini.



Menuju Papua yang Lebih Damai dan Berkeadilan



Tidak bisa dipungkiri, pengembangan mekanisme pendanaan konservasi berkelanjutan di Tanah Papua akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya-upaya

perbaikan tata pemerintahan yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Upaya mengatasi permasalahan di Papua diharapkan nantinya akan memasuki tahapan baru yang jauh lebih konstruktif dan progresif.

Dukungan komitmen politik bagi pembentukan Dana Lestari Tanah Papua sangatlah dibutuhkan secara menyeluruh, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Korelasi dan penyelarasan praksara ini terhadap berbagai langkah dan kebijakan pembangunan Papua menjadi keniscayaan.



Mendorong Komitmen Multi-Pihak

Pelestarian Tanah Papua sebagai bagian barat dari Pulau Nugini—pulau nomor dua terbesar di dunia—merupakan tanggung jawab dunia. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Provinsi Papua mengatakan bahwa rakyat Papua akan mendedikasikan wilayahnya bagi kesejahteraan tidak hanya

penduduk Indonesia, namun juga bagi kesejahteraan umat manusia di dunia.

Langkah awal yang dimandatkan lokakarya pendanaan konservasi berkelanjutan adalah sosialisasi dan menggalang komitmen berbagai pihak baik pemerintah, swasta

maupun kelompok masyarakat, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Penggalangan dana utama bagi Dana Lestari Tanah Papua merupakan penggalangan dana dari donor-donor internasional. Sesuai dengan kajian CFA, 2008; hampir 75% dana *Conservation Trust Fund* di dunia berasal dari hibah GEF dan DNS dan sebagian besar sisanya berasal dari

pemerintah nasional dan lembaga-lembaga bilateral dan multilateral.

Penggalangan dana dari korporat, terutama korporasi yang beroperasi di Tanah Papua harus diprioritaskan, sebagai langkah awal untuk memperoleh *intial capital*. Modal awal ini diharapkan nantinya mampu menarik pendanaan dari pihak-pihak donor yang jumlahnya lebih besar dan bersifat jangka panjang (dana abadi).



Mengembangkan Skema Non Konvensional

Upaya pendanaan konservasi kini tidak boleh hanya dipandang sebagai *cost-center* saja. Konservasi harus mulai dimaknai sebagai langkah yang bersifat investasi. Jasa ekosistem sebuah kawasan sudah mulai dapat diperhitungkan dan

mekanisme keuangannya sedang mengalami proses pengembangan cepat.

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diterima oleh manusia dari lingkungan alam. Insentif jasa ekosistem adalah



pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan/atau non-finansial atas

pengelolaan suatu kawasan. Beberapa jenisnya dalam kategori sektoral: kehutanan lestari, produk-produk hutan non kayu lestari, perikanan dan budi daya air lestari, pertanian lestari. Sedangkan dalam kategori tematik: karbon hutan, pembayaran jasa air, penggantian keanekaragaman hayati, serta ekowisata dan rekreasi.

Selain penggalangan dana multipihak, baik yang terutama dari lembaga donor maupun yang bersumber dari korporasi, mekanisme penggalangan dana yang berbasis jasa ekosistem akan menjadi pilihan alternatif pembiayaan kawasan-kawasan konservasi yang harus mulai segera dikembangkan.



Melestarikan Alam dan Budaya

Melestarikan Papua adalah upaya menjaga warisan alamnya, sekaligus warisan budayanya. Budaya Tanah Papua tidak pernah bisa dilepaskan dari pola relasi manusia dengan alamnya. Orang asli Papua hanya sekitar 1,5 juta jiwa pada 2008 atau kurang dari 1% dari penduduk Indonesia, padahal luasnya sebanding dengan 22% keseluruhan luas wilayah Indonesia.

Di Papua saja (tak termasuk Papua Nugini), lebih kurang 269 bahasa saat ini hidup dan dituturkan oleh orang-orang lokal Papua. Karena bahasa adalah alat komunikasi sekaligus merupakan identitas kelompok (suku), hal itu menunjukkan bahwa sedikitnya ada 269 kelompok etnis yang berbeda di Papua. Menurut sensus penduduk papua tahun 2000, penduduk asli Papua terdiri atas 312 suku, namun sumber lain dari E.D. Sefa dalam

Ensiklopedi Suku Bangsa di Papua (2005) hanya tercatat 201 suku.



Keanekaan budaya manusia dan pengetahuan adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman budaya dicerminkan oleh keanekaragaman bahasa, kepercayaan, sistem pengelolaan lahan dan sumber daya alam, sistem

pengetahuan, kesenian, musik, struktur sosial, seleksi tanaman pertanian dan pola makan yang kesemuanya membantu masyarakat menghadapi perubahan.

Melestarikan Tanah Papua, adalah upaya melestarikan budaya asli Papua.

Kepunahan kelompok budaya, bahasa maupun tradisi mereka, mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dunia. Sebab, pengetahuan dan teknologi penting

tentang hubungan ekologis antara keanekaragaman hayati beserta manfaat dan bentuk pemanfaatannya dapat ikut musnah bersama dengan kepunahan mereka. Kepunahan tersebut tentu saja akan merupakan bencana besar bagi kita, umat manusia.

*Melestarikan alam dan budaya Tanah Papua,
Menyelamatkan peradaban,
Memuliakan manusia dan kebidupan semesta.*

